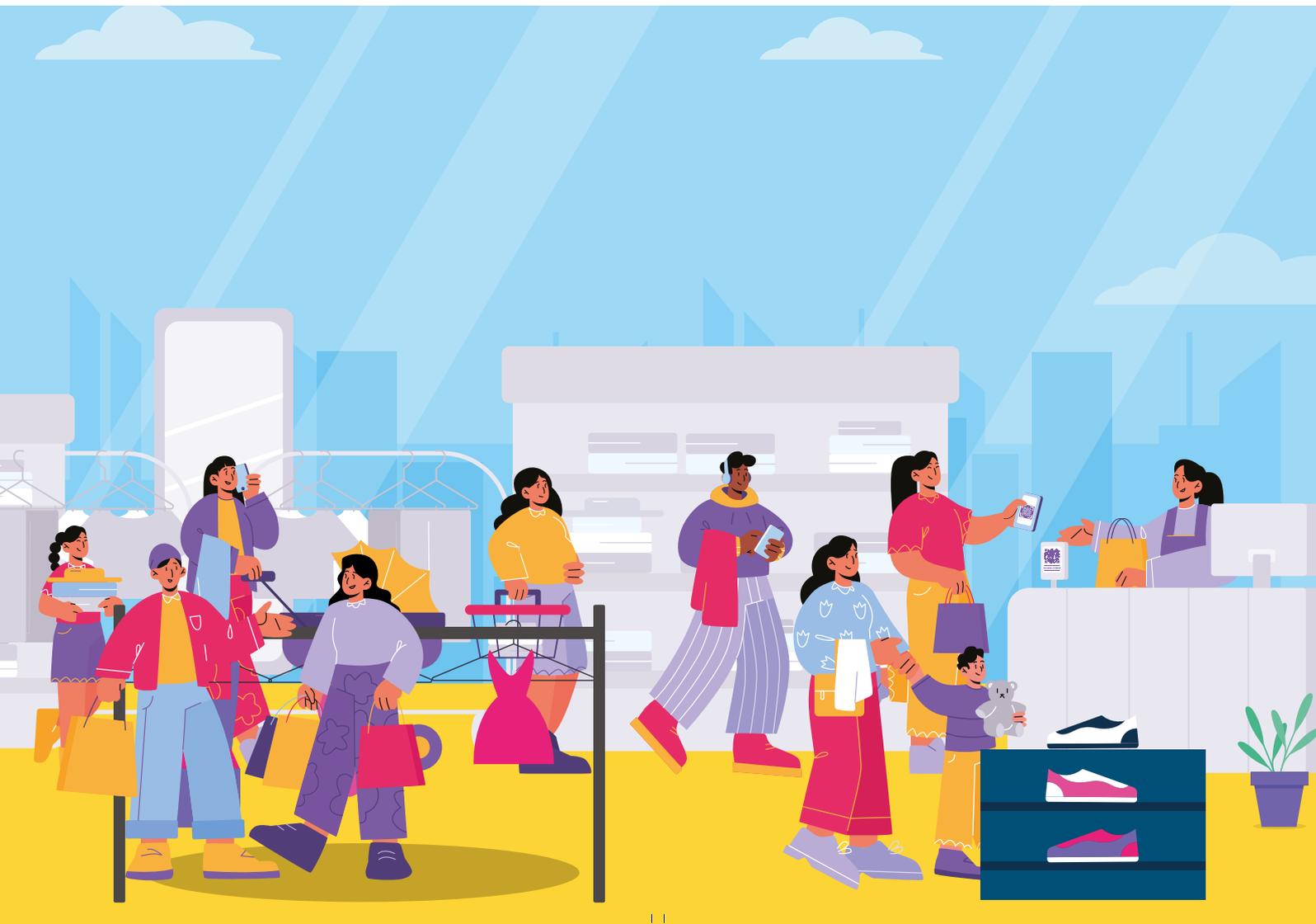


Laporan Perekonomian

Provinsi Kepulauan Riau

AGUSTUS 2023





LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Agustus 2023

Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Kepulauan Riau

Tim Perumusan KEKDA Provinsi

Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau

Agustus 2023

Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kepulauan Riau dipublikasikan setiap triwulan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Penerbitan laporan ini bertujuan sebagai: 1) Laporan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia mengenai kondisi perkembangan ekonomi dan keuangan di Provinsi Kepulauan Riau, dan 2) Informasi kepada *stakeholders* di daerah mengenai perkembangan ekonomi dan keuangan terkini.

1. Perkembangan Makro Ekonomi Daerah,
2. Perkembangan Keuangan Daerah,
3. Perkembangan Inflasi,
4. Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM,
5. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah,
6. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan, serta
7. Prospek Perekonomian Daerah.

Tim Penulis

Tim Perumusan KEKDA Provinsi

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau
Jalan Engku Putri No. 1, Kota Batam - Indonesia

Kata Pengantar

Kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau periode Agustus 2023 dapat diselesaikan. Dalam laporan ini juga dikemukakan hal-hal lain terkait dengan tugas Bank Indonesia antara lain asesmen perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau secara umum serta prospeknya. Bank Indonesia menyadari bahwa peran perekonomian regional menjadi semakin penting dalam konteks pertumbuhan ekonomi nasional. Implementasi otonomi daerah serta potensi ekonomi regional yang besar telah terbukti ikut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau secara rutin melakukan asesmen perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Asesmen perekonomian mencakup perkembangan ekonomi makro regional, inflasi, perbankan dan sistem pembayaran. Asesmen perekonomian Provinsi Kepulauan Riau dilakukan setiap triwulan dan laporan dimaksud dikenal dengan Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Penyusunan Laporan Perekonomian dimaksud sebagai upaya memenuhi kebutuhan stakeholder eksternal serta bagi Kantor Pusat Bank Indonesia.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau atas kerja samanya dalam mendukung penyediaan data. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Perekonomian ini, harapan kami hubungan yang baik ini dapat ditingkatkan lagi di masa yang akan datang. Kami menyadari isi dari laporan yang kami susun ini masih mempunyai banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk lebih meningkatkan kualitas Laporan Perekonomian ini sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar.

Semoga Tuhan Yang Maha Pemurah senantiasa melimpahkan ridho-Nya dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam meningkatkan kinerja kita semua.

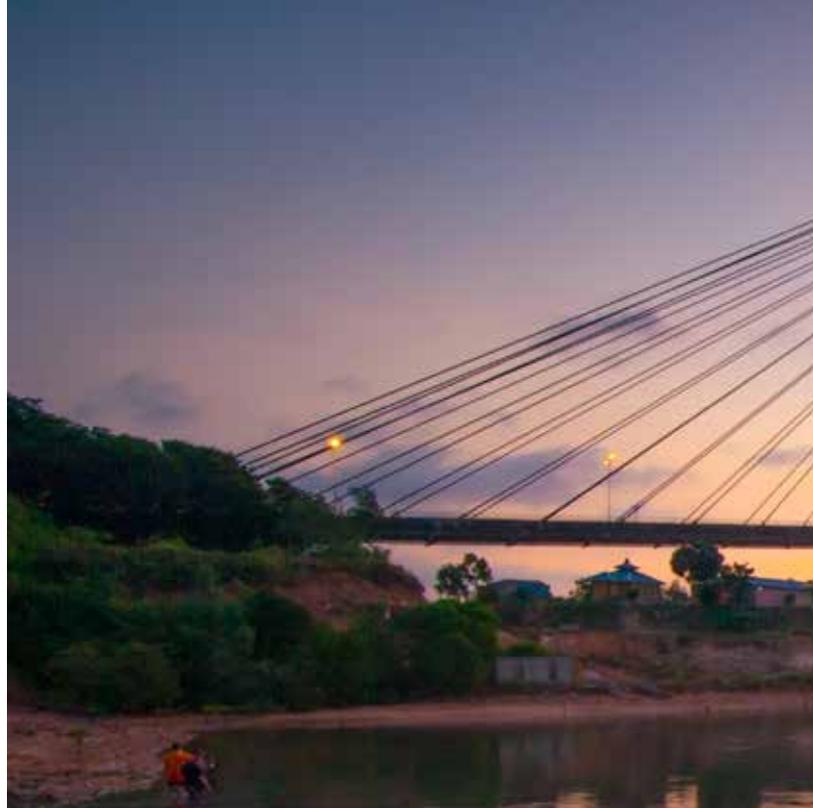
Batam, Agustus 2023
Kepala Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Kepulauan Riau

TTD

Suryono
Direktur

Daftar Isi

Tim Perumusan KEKDA Provinsi	II
Kata Pengantar	III
Daftar Isi	IV
Daftar Tabel	VI
Daftar Gambar	VII
Daftar Grafik	VIII
Ringkasan Eksekutif	X
Lampiran	57



Bab I	
Perkembangan Makro Ekonomi Daerah	1
1.1 PERTUMBUHAN EKONOMI SISI PENGELUARAN	4
1.1.1 Konsumsi Rumah Tangga	4
1.1.2 Konsumsi Pemerintah	5
1.1.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB	5
1.1.4 Kegiatan Ekspor-Impor	6
1.2 PERTUMBUHAN EKONOMI BERDASARKAN LAPANGAN USAHA	7
1.2.1 Lapangan Usaha Industri Pengolahan	8
1.2.2 Lapangan Usaha Konstruksi	8
1.2.3 Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	9
1.2.4 Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian	9
BOKS 1	
Laporan Liaison Triwulan II 2023 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau	11

Bab II	
Perkembangan Keuangan Daerah	13
2.1 REALISASI PENDAPATAN	15
2.2 REALISASI BELANJA	16
2.3 ANGGARAN DAN REALISASI APBN DI WILAYAH KEPRI	17

Bab III	
Perkembangan Inflasi Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepulauan Riau	19
3.1 PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT KELOMPOK BARANG DAN JASA	21
3.2 PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT KOTA	22
3.2.1 Inflasi Kota Batam	22
3.2.2 Inflasi Kota Tanjungpinang	22
3.3 ARAH PERKEMBANGAN INFLASI	23
3.4 UPAYA PENGENDALIAN INFLASI	23

Bab IV	
Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM	25
4.1 PERKEMBANGAN PERBANKAN PROVINSI KEPRI	27
4.1.1 Perkembangan Aset Perbankan	27
4.1.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan	28
4.1.3 Perkembangan Kredit Perbankan	28
4.1.2 Intermediasi dan Risiko Kredit Perbankan	29
4.2 ASESMEN PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM	30
4.2.1 Ketahanan Sektor Korporasi	30
4.2.2 Ketahanan Sektor Rumah Tangga	30
4.2.3 Ketahanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	31

BOKS 2	
Flagship Event Gebyar Melayu Pesisir Untuk Peningkatan Promosi Produk UMKM Unggulan Kepulauan Riau	33



Bab V

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

5.1	TRANSAKSI PEMBAYARAN TUNAI	37
5.1.1	Aliran Uang Kartal Masuk/Keluar (<i>Inflow/Outflow</i>)	37
5.1.2	Penyediaan Uang Kartal Layak Edar	37
5.1.3	Upaya Menekan Peredaran Uang Palsu (UPAL)	37
5.2	TRANSAKSI PEMBAYARAN NONTUNAI	38
5.2.1	Transaksi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (RTGS)	38
5.2.2	Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)	38
5.2.3	Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (UE)	38
5.2.4	Perkembangan QRIS	39
5.2.5	Intensifikasi Sistem Pembayaran Nontunai	40
5.2.6	Pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	40
5.2.7	Bantuan Sosial Nontunai	40
5.3	TRANSAKSI KUPVA BB DAN PJP LR	40
5.3.1	Perkembangan Transaksi KUPVA Bukan Bank (KUPVA BB)	41
5.3.2	Perkembangan Transaksi Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR)	41

BOKS 3

Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Sebagai Bentuk Sinergi Dalam Rangka Akselerasi Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Digital di Provinsi Kepulauan Riau	43
--	----

Bab VI

Kesejahteraan Masyarakat dan Ketenagakerjaan

6.1	KETENAGAKERJAAN	47
6.1.1	Ketenagakerjaan	47
6.2	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	48
6.2.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	48
6.2.2	Kemiskinan	48
6.2.3	Gini Ratio (GR)	49
6.2.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	50

Bab VII

Prospek Perekonomian Daerah

7.1	PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI	53
7.2	PROSPEK INFLASI	54
7.3	REKOMENDASI	56

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera	3
Tabel 1.2	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Pengeluaran	4
Tabel 1.3	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Lapangan Usaha	7
Tabel 2.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan II 2023	15
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan II 2023	16
Tabel 2.3	Akumulasi Anggaran dan Realisasi Belanja APBN Wilayah Provinsi Kepri	17
Tabel 2.4	Anggaran Belanja Infrastruktur APBN Wilayah Provinsi Kepri	18
Tabel 3.1	Inflasi Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang, dan Kota Batam	21
Tabel 3.2	Penyumbang Inflasi Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepri Juni 2023	21
Tabel 3.3	Penyumbang Deflasi Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepri Juni 2023	21
Tabel 3.4	Inflasi Tahunan Kepulauan Riau Menurut Kelompok Barang dan Jasa (% , yoy)	22
Tabel 3.5	Andil Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa di Kota Penghitungan IHK (% - yoy)	23
Tabel 4.1	Perkembangan Indikator Utama Perbankan Kepri	27
Tabel 4.2	Penyaluran Kredit (Spasial)	29
Tabel 4.3	Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga	32
Tabel 5.1	Penyaluran PKH Tahap 2 di Wilayah Provinsi Kepri	41
Tabel 6.1	Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kepri	47
Tabel 6.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan	47
Tabel 6.3	Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri	47
Tabel 6.4	Tenaga Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri (%)	48
Tabel 6.5	Nilai Tukar Petani Provinsi Kepri	49
Tabel 6.6	Profil Kemiskinan di Provinsi Kepri	49
Tabel 6.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri Menurut Komponen	50
Tabel 6.8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota	50
Tabel 7.1	Risiko Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2023	54
Tabel 7.2	Risiko Inflasi Kepulauan Riau Tahun 2023	55

Daftar Gambar

Gambar B2.1	Kunjungan Gubernur Kepri dalam <i>Showcasing</i> di Kabupaten Karimunan Riau	34
Gambar B2.2	Kurasi Produk UMKM Unggulan	34
Gambar B2.3	Pelayanan Perizinan	34
Gambar B2.4	Edukasi Digitalisasi Pembayaran (QRIS)	34
Gambar B2.5	Kunjungan Menparekraf dalam <i>Showcasing</i>	34
Gambar B2.6	Wakil Presiden mengunjungi <i>Booth</i> UMKM	34
Gambar B2.7	Pembukaan Gerai Nusantara di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta	34
Gambar B2.8	Bupati Bintang Bertransaksi menggunakan QRIS di <i>Booth</i> Bank Indonesia	34
Gambar B3.1	Kegiatan Rapat Koordinasi, <i>Focus Group Discussion</i> , dan <i>High Level Meeting</i>	43
Gambar B3.2	Sosialisasi, <i>Experience</i> , <i>On Boarding</i> , dan <i>Showcasing</i> QRIS	44
Gambar B3.3	Nonton Bersama <i>Live Streaming</i> Pembukaan FEKDI 2023	44

Daftar Grafik

Grafik 1.1	Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Triwulanan)	3	Grafik 2.1	Komposisi Realisasi Pendapatan Triwulan II 2023	15
Grafik 1.2	Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Tahunan)	3	Grafik 2.2	Perkembangan Realisasi Pendapatan Triwulan II 2023	15
Grafik 1.3	Struktur Ekonomi Sisi Pengeluaran	4	Grafik 2.3	Realisasi Pendapatan Pada Masing-masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri	16
Grafik 1.4	Indeks Keyakinan Konsumen	4	Grafik 2.4	Komposisi Realisasi Belanja Triwulan II 2023	17
Grafik 1.5	Komponen Indeks Keyakinan Konsumen Saat ini	4	Grafik 2.5	Perkembangan Realisasi Belanja Triwulan II 2023	17
Grafik 1.6	Realisasi Belanja APBD	5	Grafik 2.6	Realisasi Belanja pada Masing-Masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri	17
Grafik 1.7	Perkembangan Realisasi APBD Wilayah Kepri	5	Grafik 3.1	Inflasi Triwulan II 2023 Regional Sumatera (yoy)	21
Grafik 1.8	Simpanan Pemerintah Daerah pada Perbankan	5	Grafik 3.2	Perkembangan Inflasi Kepulauan Riau, Nasional dan Sumatera Triwulan II 2023	21
Grafik 1.9	Likert Scale Investasi (Hasil Liaison)	5	Grafik 3.3	Perkembangan Inflasi Tahunan Kepulauan Riau, Batam, dan Tanjungpinang (yoy)	22
Grafik 1.10	Perkembangan Barang Modal	5	Grafik 4.1	Perkembangan Aset Perbankan	27
Grafik 1.11	Perkembangan Ekspor Total	6	Grafik 4.2	Pertumbuhan Aset Berdasarkan Kelompok Bank	27
Grafik 1.12	Perkembangan Ekspor Komoditas Nonmigas dan Migas	6	Grafik 4.3	Perkembangan DPK Perbankan	28
Grafik 1.13	Perkembangan Ekspor Produk Elektronik dan Mesin	6	Grafik 4.4	DPK Perbankan Berdasarkan Jenis Simpanan	28
Grafik 1.14	Index of Industrial Production (IIP) Singapura untuk Peralatan Elektronik	6	Grafik 4.5	Perkembangan Kredit Perbankan	28
Grafik 1.15	Perkembangan Impor	7	Grafik 4.6	Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan	28
Grafik 1.16	Perkembangan Impor Nonmigas - BEC	7	Grafik 4.7	Porsi Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan	29
Grafik 1.17	Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB (%)	7	Grafik 4.8	Perkembangan Suku Bunga Kredit	29
Grafik 1.18	Index of Industrial Production (IIP) Singapura untuk Machinery & Equipment	8	Grafik 4.9	Kredit Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	29
Grafik 1.19	Perkembangan Pengadaan/Penjualan Semen	8	Grafik 4.10	Kredit Sektor Industri Pengolahan	29
Grafik 1.20	Perkembangan Kredit Konstruksi	8	Grafik 4.11	Intermediasi dan Risiko Kredit Perbankan Kepri	29
Grafik 1.21	Kredit Perorangan Multiguna	9	Grafik 4.12	Perkembangan Kredit Korporasi	30
Grafik 1.22	Kredit Perdagangan Besar dan Eceran	9	Grafik 4.13	Pangsa Kredit Korporasi (5 LU Terbesar)	30
Grafik 1.23	Perkembangan Harga Gas Alam Indonesia	9	Grafik 4.14	Survei Konsumen	30
Grafik 1.24	Perkembangan Harga Minyak Dunia	9	Grafik 4.15	Survei Konsumen	30
Grafik B1.1	LS Penjualan Domestik dan PDRB Industri Pengolahan	11	Grafik 4.16	Kredit Rumah Tangga	31
Grafik B1.2	LS Ekspor dan Proyeksi PDRB Ekspor	11	Grafik 4.17	Kredit Konsumsi	31
Grafik B1.3	LS Penjualan Domestik dan PDRB Industri Pengolahan	12	Grafik 4.18	DPK Perseorangan	31
Grafik B1.4	LS Ekspor dan Proyeksi PDRB Ekspor	12	Grafik 4.19	Pangsa DPK Perseorangan	31
			Grafik 4.20	Perkembangan Kredit UMKM	32

Daftar Grafik

Grafik 5.1	Perkembangan Inflow dan Outflow Kepri	37
Grafik 5.2	Perkembangan Pertumbuhan Inflow dan Outflow	37
Grafik 5.3	Perkembangan Pemusnahan UTLE	37
Grafik 5.4	Perkembangan Temuan Uang Palsu	38
Grafik 5.5	Perkembangan RTGS di Provinsi Kepri	38
Grafik 5.6	Perkembangan Transaksi Kliring di Provinsi Kepri	38
Grafik 5.7	Perkembangan Transaksi Kartu Debit	39
Grafik 5.8	Perkembangan Transaksi Kartu Kredit	39
Grafik 5.9	Perkembangan Transaksi UE di Provinsi Kepri	39
Grafik 5.10	Perkembangan QRIS berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Kepri	39
Grafik 5.11	Perkembangan Merchant QRIS berdasarkan Kelompok Usaha	39
Grafik 5.12	Perkembangan Volume Transaksi QRIS di Provinsi Kepri	39
Grafik 5.13	Perkembangan Jumlah Pengguna QRIS di Provinsi Kepri	40
Grafik 5.14	Perkembangan Transaksi KUPVA	41
Grafik 5.15	Pergerakan Transaksi KUPVA & Nilai Tukar Rupiah	41
Grafik 5.16	Perkembangan Transaksi Pada PJP LR	41
Grafik 6.1	Perkembangan NTP	48
Grafik 6.2	NTP Berdasarkan Subsektor	48
Grafik 6.3	Perkembangan Gini Ratio Provinsi Kepri	49
Grafik 6.4	Gini Ratio Provinsi di Wilayah Sumatera	50
Grafik 6.5	Perkembangan IPM Provinsi Kepri	50
Grafik 7.1	Pertumbuhan Ekonomi Negara Mitra Dagang (% yoy)	53
Grafik 7.2	Perkembangan Inflasi Negara Mitra Dagang (% yoy)	53
Grafik 7.3	Likert Scale Perkiraan Investasi	54

Ringkasan Eksekutif

Perekonomian Kepri pada triwulan II 2023 tumbuh 5,04% (yoy), menurun dari triwulan sebelumnya yakni 6,51% (yoy).

Dari sisi pengeluaran, akselerasi terutama didorong oleh komponen konsumsi pemerintah, investasi, dan net ekspor.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), percepatan pertumbuhan ekonomi didorong oleh LU Konstruksi, Infokom, Akmamin, dan Transportasi.

Realisasi pendapatan daerah sampai triwulan II 2023 tercatat mengalami penurunan dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu. Namun, realisasi belanja daerah tercatat meningkat.

Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan II 2023 tumbuh positif sebesar 5,04% (yoy), meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,51% (yoy). Pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi di wilayah Sumatera secara kumulatif sebesar 5,77% (ctc) dan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan wilayah Sumatera sebesar 4,90% (yoy) atau 4,84% (ctc), namun lebih rendah dari Nasional sebesar 5,17% (yoy).

Akselerasi pertumbuhan disebabkan oleh komponen Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) / Investasi, dan Net Ekspor. Belanja modal pemerintah sejalan dengan pembangunan infrastruktur yang masif, terutama untuk pembangunan infrastruktur. Pangsa komponen investasi yang cukup tinggi dipengaruhi oleh upaya pelaku usaha dalam meningkatkan kapasitas produksi maupun realisasi belanja infrastruktur oleh pemerintah. Selain itu, Kinerja Net Ekspor di Kepri yang tumbuh terakselerasi disebabkan oleh penurunan Total Impor yang lebih dalam dibandingkan dengan penurunan Total Ekspor.

Pertumbuhan LU Konstruksi meningkat didorong oleh pembangunan infrastruktur yang masif dilakukan setelah tertunda selama pandemi Covid-19. Pertumbuhan LU Informasi dan Komunikasi mengalami peningkatan signifikan yang disebabkan oleh telah selesainya pembangunan infrastruktur jaringan seperti *Base Transceiver Station* (BTS) di beberapa daerah di Kepri dan juga didorong oleh Kepri menjadi stasiun peluncuran satelit Satria-1 (Satelit Republik Indonesia). Lebih lanjut, akselerasi pada sektor yang berkaitan dengan pariwisata seperti (LU Penyediaan Akmamin dan Transportasi) dipengaruhi oleh masih tingginya jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Kepri.

Realisasi pendapatan Pemda di wilayah Provinsi Kepri sampai dengan triwulan II 2023 tercatat sebesar 39,66%, sementara realisasi belanja mencapai 34,17% dari total anggaran. Realisasi pendapatan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 40,62%. Penurunan pendapatan terutama terjadi pada semua pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sementara itu, realisasi belanja mengalami peningkatan dari 33,20% di triwulan II 2022 menjadi sebesar 34,17% di triwulan II 2023, disebabkan kenaikan belanja operasi khususnya belanja pegawai dan belanja transfer berupa belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.

Ringkasan Eksekutif

Indeks Harga Konsumen (IHK) Gabungan 2 Kota di Provinsi (Kepri triwulan II 2023 menunjukkan terjadinya inflasi sebesar 2,64% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,77% (yoy). Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas pangan, transportasi dan makanan jadi. Penurunan harga komoditas pangan antara lain aneka sayuran seperti aneka cabai, minyak goreng, dan aneka sayuran seperti bayam dan kangkung seiring dengan perbaikan terhadap pasokan komoditas tersebut. Selain itu, penurunan harga kelompok transportasi sejalan dengan penurunan tarif angkutan udara seiring dengan penurunan harga bahan bakar. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK tetap berada dalam rentang sasaran inflasi yaitu $3,0\pm 1\%$ hingga akhir tahun 2023.

Kinerja Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) di Provinsi Kepri masih terjaga meskipun mengalami perlambatan pada triwulan II 2023. Perlambatan tersebut tercermin dari penurunan laju penyaluran kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK), namun tetap disertai dengan terjaganya kualitas kredit. Risiko kredit pada segmen korporasi, segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), maupun segmen kredit sektor rumah tangga masih terjaga ($< 5\%$). Penyaluran kredit oleh bank berdasarkan lokasi proyek di Provinsi Kepri tumbuh sebesar 8,73% (yoy), lebih rendah dari triwulan I 2023 yang tumbuh sebesar 10,88% (yoy). Selain itu, DPK yang dihimpun oleh perbankan di Provinsi Kepri tumbuh sebesar 7,92% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,32% (yoy).

Aktivitas transaksi pembayaran tunai menggunakan Rupiah dan transaksi Uang Kertas Asing di Provinsi Kepri mengalami peningkatan pada triwulan II 2023. Selain itu, transaksi pembayaran nontunai turut mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran digital khususnya *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Aktivitas transaksi pembayaran tunai pada triwulan II 2023 mencatatkan *net outflow* sebesar Rp1,56 triliun, berbeda arah dibandingkan triwulan I 2023 yang tercatat *net inflow* sebesar Rp14,63 miliar. Perkembangan aliran uang tersebut sejalan dengan pola musiman kebutuhan uang tunai yang meningkat selama periode HBKN Idul Fitri. Selain itu, aktivitas pembayaran nontunai secara tahunan meningkat. Hal ini tercermin dari peningkatan transaksi QRIS dan Uang Elektronik (UE) yang didukung oleh meningkatnya preferensi dan akseptasi masyarakat terhadap penggunaan transaksi nontunai.

Inflasi Provinsi Kepri pada triwulan II 2023 menurun disebabkan oleh penurunan harga komoditas pangan, transportasi dan makanan jadi.

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) di Kepri pada triwulan II 2023 masih terjaga meskipun mengalami perlambatan.

Sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian, aktivitas sistem pembayaran tunai mencatatkan net inflow sejalan dengan pola musiman permintaan uang tunai di awal tahun. Selain itu, transaksi non tunai tercatat mengalami akselerasi.

Ringkasan Eksekutif

Tingkat kesejahteraan masyarakat terus mengalami perbaikan.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan perbaikan tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Nilai Tukar Petani (NTP) serta penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) seiring dengan tren pemulihan ekonomi yang terus berlanjut.

Perekonomian Kepri tahun 2023 diperkirakan lebih baik didukung oleh perbaikan pertumbuhan pada sejumlah sektor dan inflasi yang relatif terkendali.

Perekonomian global diperkirakan tumbuh melambat namun lebih baik dari estimasi sebelumnya sejalan dengan penghapusan kebijakan Zero Covid di Tiongkok, penghapusan status darurat Covid-19, perbaikan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan beberapa negara maju di Eropa seiring dengan perbaikan upah dan keyakinan konsumen, perbaikan rantai pasokan global, serta pertumbuhan negara berkembang yang masih kuat. Kondisi tersebut turut mempengaruhi penurunan inflasi terutama di negara berkembang. Sejalan dengan prakiraan ekonomi global yang lebih optimis, perekonomian domestik tetap kuat dan berpotensi lebih tinggi. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri secara keseluruhan tahun 2023 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya didukung oleh perbaikan pertumbuhan di beberapa sektor dan perkembangan inflasi di daerah yang relatif terkendali.

Tekanan inflasi pada tahun 2023 terjaga yang didukung oleh perbaikan rantai pasokan, normalisasi harga komoditas dan sinergi TPID dan GNPIP.

Tekanan inflasi domestik termasuk Provinsi Kepri diperkirakan dapat dijaga direntang sasaran inflasi nasional $3,0 \pm 1\%$ (yoy). Hal tersebut didukung oleh perbaikan rantai pasokan, normalisasi harga pangan dan energi global, serta upaya pengendalian inflasi di daerah yang terus diperkuat melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) khususnya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).



Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I

Perkembangan Makro Ekonomi Daerah



Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan II 2023 tumbuh positif sebesar 5,04% (yoy), meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,51% (yoy). Pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi di wilayah Sumatera secara kumulatif sebesar 5,77% (ctc) dan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan wilayah Sumatera sebesar 4,90% (yoy) atau 4,84% (ctc), namun lebih rendah dari Nasional sebesar 5,17% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2023 didorong oleh peningkatan konsumsi pemerintah dan PMTB (Investasi). Selain itu, permintaan masyarakat relatif tinggi pasca pelonggaran kebijakan PPKM.

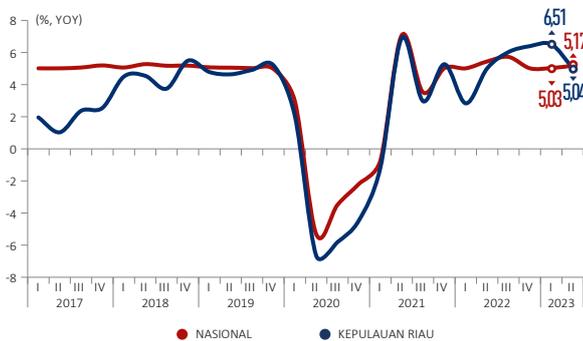


Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan Provinsi Kepri pada triwulan II 2023 tercatat sebesar Rp49.155,31 miliar atau tumbuh 5,04% (yoy). Perekonomian Provinsi Kepri konsisten mengalami akselerasi pertumbuhan sejak triwulan I 2022 yang tercatat sebesar 2,83% (yoy), terus menguat pada triwulan II, III dan IV tahun 2022, masing-masing sebesar 5,01% (yoy), 6,03% (yoy) dan 6,40% (yoy), serta masih tetap tumbuh terakselerasi pada triwulan I 2023 sebesar 6,51% (yoy). Pada triwulan II 2023 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri mengalami deselerasi sebesar 5,04% (yoy) karena *base year effect* pada periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri pada triwulan II 2023 merupakan yang tertinggi di wilayah Sumatera secara kumulatif sebesar 5,77% (ctc) dan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan wilayah Sumatera sebesar 4,90% (yoy) atau 4,84% (ctc), namun lebih rendah dari Nasional sebesar 5,17% (yoy). Serta, merupakan tertinggi ke-6 secara nasional setelah Maluku Utara (20,26% ctc), Sulawesi Tengah (12,49% ctc), Kalimantan Timur (6,89% ctc), Bali (5,83% ctc), dan Sulawesi Utara (5,79% ctc).

Percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh peningkatan konsumsi pemerintah dan PMTB (investasi) serta konsumsi LNPR. Sementara, konsumsi rumah tangga melambat, total ekspor berkontraksi, dan total impor berkontraksi lebih dalam sehingga secara total net ekspor tercatat meningkat. Selain itu, kondisi mobilitas

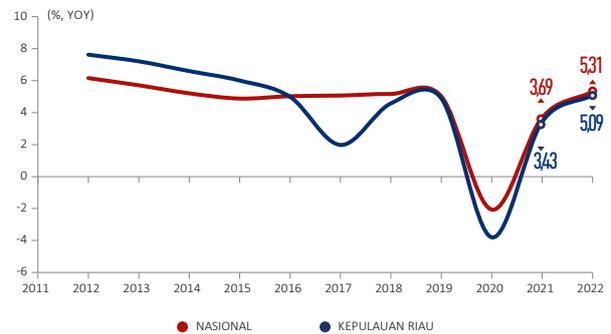
masyarakat terus membaik pasca pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak akhir Desember 2022 dan penghapusan status darurat COVID-19 di seluruh dunia oleh WHO pada Mei 2023 sehingga mendorong permintaan masyarakat yang tinggi pasca pelonggaran kebijakan PPKM. Selain itu, pertumbuhan juga didukung pembangunan infrastruktur yang masif sejalan dengan peningkatan konsumsi pemerintah. Kondisi tersebut selanjutnya meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendorong peningkatan kegiatan pada lapangan usaha transportasi, hotel, dan restoran. Di samping itu, aktivitas produksi industri pengolahan masih tinggi terutama untuk mesin dan perkapalan sekalipun industri pengolahan mengalami tren yang menurun.

Secara spasial di wilayah Sumatera, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri triwulan II 2023 lebih tinggi dari wilayah Sumatera, namun lebih rendah dari Nasional yang tumbuh masing-masing sebesar 4,90% (yoy) dan 5,17% (yoy). Pertumbuhan tertinggi selanjutnya di wilayah Sumatera dicapai oleh Sumatera Selatan dan Sumatera Utara masing-masing sebesar 5,17% (ctc) dan 5,03% (ctc). Adapun pangsa/distribusi PDRB Provinsi Kepri tahun 2023 terhadap wilayah Sumatera tercatat sebesar 7,32% dan merupakan terbesar ke-5 setelah Riau (23,50%), Sumatera Utara (22,63%), Sumatera Selatan (14,02%) dan Lampung (9,81%).



Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 1.1 Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Triwulanan)



Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 1.2 Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Tahunan)

Tabel 1.1 Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera

No	Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2023 (% , yoy)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2023 (% , yoy)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2023 (% , qtq)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2023 (% , qtq)	Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021 (% , yoy)	Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 (% , yoy)	Andil Pertumbuhan 2022 (% , yoy)	Pangsa Ekonomi 2022 (%)
1	Riau	3,88	Δ 4,88	-0,80	Δ 1,26	3,36	Δ 4,55	0,97	23,50
2	Sumatera Utara	4,87	Δ 5,19	-0,45	Δ 2,88	2,61	Δ 4,73	1,09	22,63
3	Sumatera Selatan	5,11	Δ 5,24	-0,11	Δ 4,57	3,58	Δ 5,23	0,72	14,02
4	Lampung	4,96	▽ 4,00	0,79	Δ 8,15	2,77	Δ 4,28	0,44	9,81
5	Kepulauan Riau	6,51	▽ 5,04	-3,31	Δ 0,72	3,43	Δ 5,09	0,39	7,32
6	Sumatera Barat	4,80	Δ 5,14	-0,69	Δ 1,82	3,29	Δ 4,36	0,32	6,76
7	Jambi	5,00	▽ 4,86	-2,08	Δ 4,81	3,69	Δ 5,13	0,33	6,55
8	Aceh	4,63	▽ 4,37	-7,06	Δ 3,08	2,79	Δ 4,21	0,24	5,02
9	Kep. Bangka Belitung	4,37	Δ 5,13	-4,51	Δ 6,06	5,05	▽ 4,40	0,10	2,26
10	Bengkulu	4,07	Δ 4,18	-2,38	Δ 6,73	3,27	Δ 4,31	0,09	2,14
SUMATERA		4,79	Δ 4,90	-1,23	Δ 3,34	3,18	Δ 4,69	4,69	100,00

Δ Menguat dibandingkan triwulan sebelumnya
▽ Melambat dibandingkan triwulan sebelumnya

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Pengeluaran

PDRB Sisi Pengeluaran	2020					2021					2022					2023		Arah TW
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	
1. Konsumsi RT	4,57	-1,71	0,01	-1,19	0,39	-0,98	4,10	-1,05	0,19	0,54	1,15	3,66	7,44	6,43	4,65	5,52	3,46	▼
2. Konsumsi LNPRT	-7,23	-11,79	-6,70	0,78	-6,33	1,87	5,90	4,73	0,31	3,14	3,09	4,20	5,93	-2,11	2,75	0,65	5,77	▲
3. Konsumsi Pemerintah	7,59	-13,73	2,35	-16,12	-8,42	-4,91	10,20	-9,28	0,75	-0,60	-1,53	-1,77	-1,29	0,67	-0,67	5,29	10,35	▲
4. PMTB (Investasi)	4,39	-8,64	-5,42	-9,33	-4,98	0,09	6,98	4,32	1,81	3,22	1,18	1,89	4,96	7,46	3,89	7,71	7,81	▲
5. Perubahan Inventori	-139,12	-66,18	109,27	-182,42	-94,46	-323,44	-198,31	1,14	-68,81	285,74	-47,94	-39,53	35,05	-1.316,70	430,88	269,72	607,31	▲
6. Total Net Ekspor	-5,38	-9,92	-25,40	21,33	-6,89	-7,91	20,04	16,97	30,82	13,30	13,64	18,59	6,33	-5,04	7,83	2,91	7,56	▲
a. Total Ekspor	9,17	-3,47	-9,32	-4,64	-2,44	0,67	12,85	10,19	10,94	8,56	9,90	12,88	13,34	3,45	9,80	3,15	-6,14	▼
b. Total Impor	11,27	-2,83	-7,58	-6,53	-1,97	1,72	12,19	9,60	9,05	8,09	9,48	12,32	13,99	4,41	10,01	3,17	-7,57	▼
Pertumbuhan PDRB	2,02	-6,81	-5,81	-4,46	-3,80	-1,19	6,90	2,97	5,27	3,43	2,83	5,01	6,03	6,40	5,09	6,51	5,04	▼

▲ Menguat
▼ Melambat

Sumber: BPS (data diolah)

1.1 PERTUMBUHAN EKONOMI SISI PENGELUARAN

Distribusi perekonomian Provinsi Kepri pada triwulan II 2023 didominasi oleh PMTB/investasi dengan pangsa sebesar 42,88% diikuti Konsumsi Rumah Tangga sebesar 41,43% dari total PDRB. Pangsa komponen investasi yang cukup tinggi dipengaruhi oleh upaya pelaku usaha pada sektor industri dalam meningkatkan kapasitas produksi dengan menambah barang modal maupun investasi aset pembangunan bangunan untuk ekspansi usaha. Selain itu, belanja modal pemerintah juga cukup besar terutama untuk pembangunan infrastruktur. Selanjutnya konsumsi rumah tangga memiliki pangsa tertinggi kedua dan mengalami pertumbuhan yang masih tinggi seiring mobilitas masyarakat yang semakin baik.

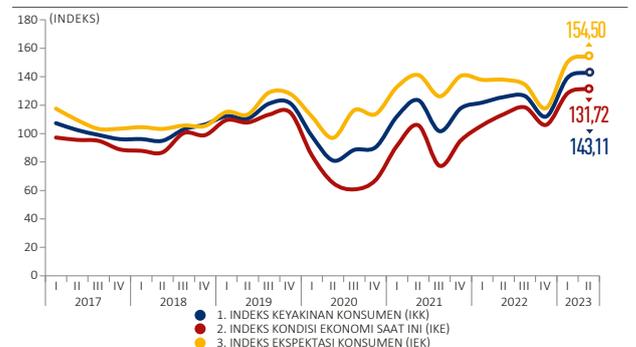
Sementara itu komponen net ekspor yakni aktivitas perdagangan dengan luar negeri, memiliki pangsa terbesar ke tiga yaitu sebesar 12,10% dari total PDRB Provinsi Kepri. Kinerja net ekspor Provinsi Kepri tetap positif didorong oleh ekspor barang dari logam, elektronik, optik, dan alat angkutan laut.

1.1.1 Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi Rumah Tangga pada triwulan II 2023 tumbuh sebesar 3,46% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (5,52% yoy). Konsumsi masyarakat yang tetap tinggi didukung oleh peningkatan mobilitas masyarakat seiring pencabutan aturan

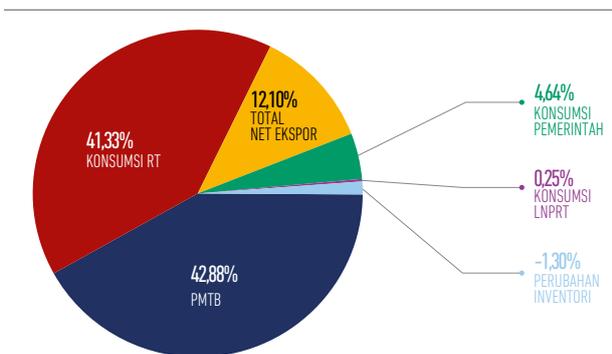
PPKM pada akhir Desember 2022 dan pencabutan status darurat COVID 19 oleh WHO pada Mei 2023. Kondisi ini juga tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen¹ (IKK) triwulan II 2023 sebesar 143,11 yang meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 139,36. Peningkatan IKK tersebut didorong oleh peningkatan dua komponen pembentuknya yaitu Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Indeks tersebut juga berada di atas 100 yang mengindikasikan bahwa konsumen memiliki persepsi yang positif dan optimis terkait kondisi ekonomi saat ini dan ke depan.

Secara rinci, IKE yang lebih optimis dari triwulan sebelumnya terjadi pada seluruh komponen pembentuknya yaitu Indeks Penghasilan Konsumen, Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja dan Indeks Konsumsi Barang-Barang Kebutuhan Tahan Lama.



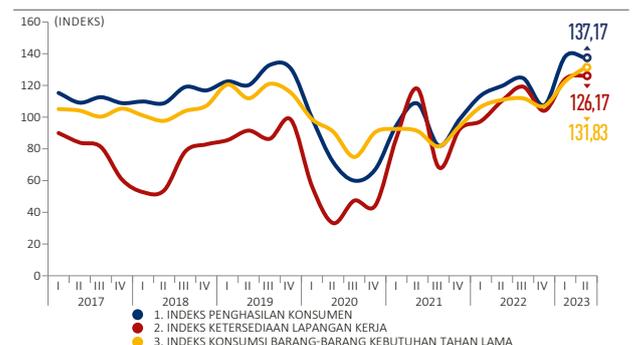
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.4 Indeks Keyakinan Konsumen



Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 1.3 Struktur Ekonomi Sisi Pengeluaran



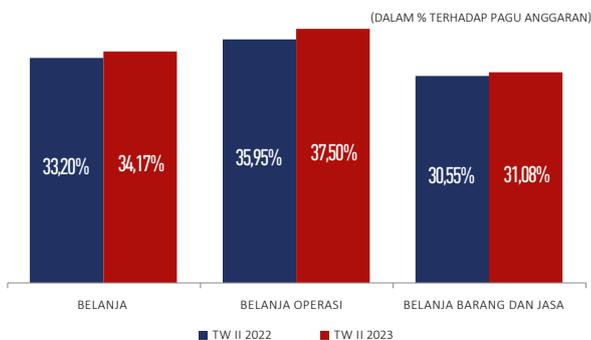
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.5 Komponen Indeks Keyakinan Konsumen Saat ini

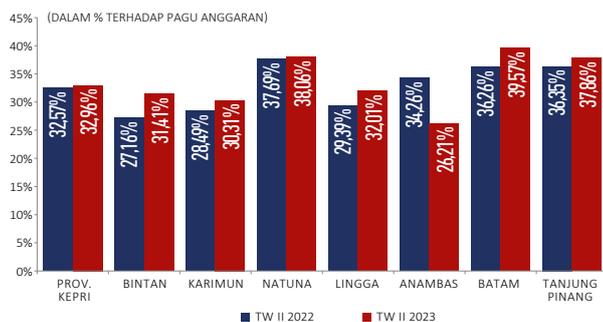
1.1.2 Konsumsi Pemerintah

Komponen konsumsi pemerintah pada triwulan II 2023 mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan II 2023, konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 10,35% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,29% (yoy). Perbaikan tingkat konsumsi pemerintah dipengaruhi oleh tingkat realisasi belanja pemerintah yang meningkat terutama pada pos belanja operasi. Pos belanja pada APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepri pada triwulan II 2023 terealisasi sebesar 34,17% dari pagu anggaran, lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 33,20%. Secara khusus, realisasi belanja operasi meningkat dari 35,95% di triwulan II tahun sebelumnya menjadi 37,50% pada triwulan II 2023. Tingkat realisasi belanja barang dan jasa tercapai sebesar 31,08%, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 30,55%.

Secara spasial, provinsi Kepri dan enam kabupaten/kota mengalami peningkatan realisasi belanja pada periode triwulan II 2023 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, hanya Kabupaten Anambas yang mengalami penurunan realisasi belanja pada periode triwulan II 2023 dibandingkan triwulan II 2022. Peningkatan konsumsi pemerintah juga tercermin pada penurunan jumlah simpanan pemerintah di perbankan pada triwulan II 2023 yang tercatat 12,79% meningkat dari periode sebelumnya yang sebesar 2,05% (yoy).



Grafik 1.6 Realisasi Belanja APBD

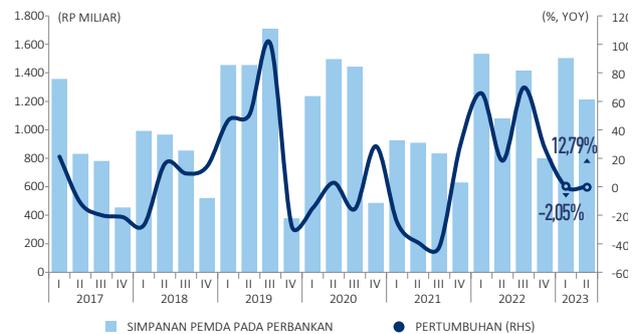


Grafik 1.7 Perkembangan Realisasi APBD Wilayah Kepri

Berdasarkan struktur PDRB Provinsi Kepri pada triwulan II 2023, konsumsi pemerintah memiliki pangsa sebesar 4,64%. Belanja pemerintah terutama belanja modal dan belanja bantuan sosial mempunyai dampak lanjutan pada pertumbuhan lapangan usaha lainnya sehingga realisasi belanja lebih awal akan menjadi pendorong bagi sektor lainnya untuk berkembang.

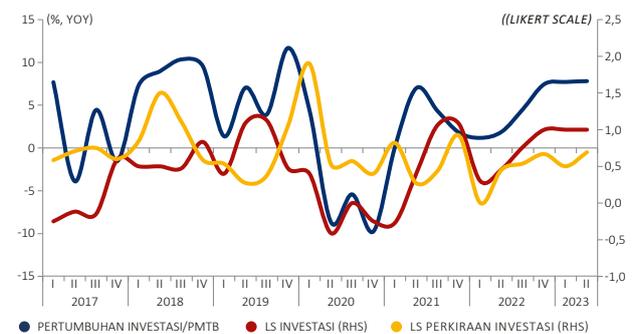
1.1.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB

PMTB atau investasi di Provinsi Kepri pada triwulan II 2023 tumbuh tinggi sebesar 7,81% (yoy) dan menguat dibandingkan triwulan sebelumnya (7,71% yoy). Peningkatan tersebut terkonfirmasi dari perkiraan *likert scale* investasi hasil liaison terhadap sejumlah perusahaan di Provinsi Kepri pada triwulan II 2023 yang bertahan di level positif, sementara *likert scale* investasi hasil liaison cenderung stabil. Meskipun demikian, peningkatan investasi tertahan oleh pertumbuhan impor barang modal sebesar 97,17% (yoy) yang lebih



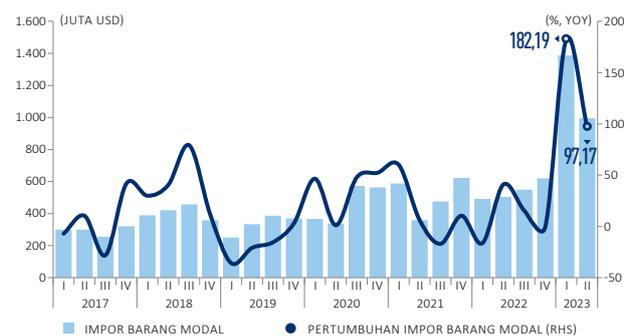
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 1.8 Simpanan Pemerintah Daerah pada Perbankan



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 1.9 Likert Scale Investasi (Hasil Liaison)



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 1.10 Perkembangan Barang Modal



rendah dibandingkan pada triwulan I 2023 sebesar 182,19% (yoy). Peningkatan PMTB tersebut didorong oleh realisasi belanja modal pemerintah untuk khususnya pembangunan infrastruktur.

1.1.4 Kegiatan Ekspor-Impor

Pertumbuhan PDRB net ekspor Provinsi Kepri pada triwulan II 2023 tercatat sebesar 7,56% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,91% (yoy). Nilai total ekspor luar negeri dari Provinsi Kepri (migas dan nonmigas) pada triwulan II 2023 berkontraksi sebesar 28,57% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 14,84% (yoy). Penurunan ekspor terutama bersumber dari nonmigas yang berkontraksi dari sebesar 8,94% (yoy) pada triwulan II 2023 lebih rendah dibandingkan triwulan II 2023 yang masih tumbuh sebesar 22,16% (yoy). Sementara itu, ekspor migas masih mengalami kontraksi dari sebesar 7,35% (yoy) pada triwulan sebelumnya berkontraksi lebih dalam menjadi 15,88% (yoy) pada triwulan II 2023 sebagai dampak dari penurunan produksi di Kabupaten Kepulauan Anambas, meski telah membaik pada triwulan sebelumnya. Adapun pangsa nonmigas masih mendominasi ekspor Provinsi Kepri dengan pangsa sebesar 78,45%, sedangkan ekspor migas memiliki pangsa sebesar 24,11%. Kinerja ekspor pada triwulan II 2023 mengalami kontraksi sebesar 6,14% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan I 2023 sebesar 3,15% (yoy).

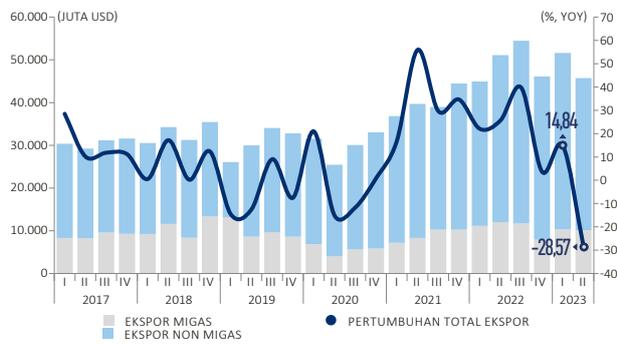
Penurunan kinerja ekspor nonmigas Provinsi Kepri terutama didorong oleh penurunan ekspor produk elektronik dan produk mesin. Nominal ekspor produk elektronik pada triwulan II 2023

tercatat tumbuh sebesar 2,40% (yoy), menurun dari 50,56% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Negara tujuan utama ekspor yakni Singapura dan Amerika Serikat. Kondisi tersebut sejalan dengan *Index of Industrial Production (IIP)* Singapura untuk peralatan listrik yang pada triwulan I 2023 berada pada level yang lebih rendah yakni sebesar 122,49 dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 123,58.

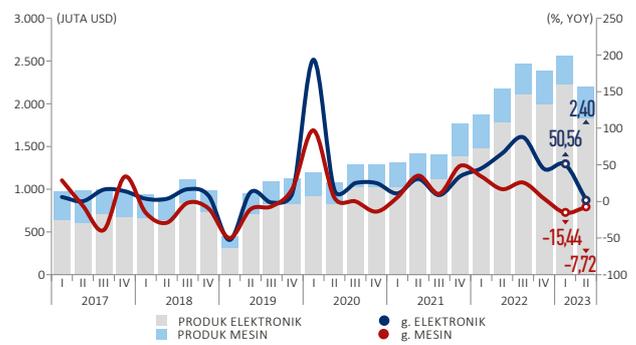
Sejalan dengan ekspor luar negeri, pertumbuhan nominal impor dari luar negeri ke Provinsi Kepri juga tercatat mengalami perlambatan.

Total impor Provinsi Kepri pada triwulan II 2023 berkontraksi 7,57% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,17% (yoy). Begitupula berdasarkan data nominal impor, total nilai impor turun dari tumbuh sebesar 22,07% (yoy) pada triwulan I menjadi tumbuh sebesar 6,55% (yoy). Hal tersebut terutama didorong oleh impor komoditas nonmigas yang memiliki pangsa 84,29% dari total impor diikuti impor migas dengan pangsa 15,71%. Nilai impor nonmigas dari luar negeri pada triwulan II 2023 tumbuh melambat 14,11% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 22,36% (yoy). Kinerja impor berkontraksi lebih dalam daripada kinerja ekspor sehingga net ekspor tercatat tumbuh positif dan turut mendorong pertumbuhan kinerja PDRB pada triwulan II 2023.

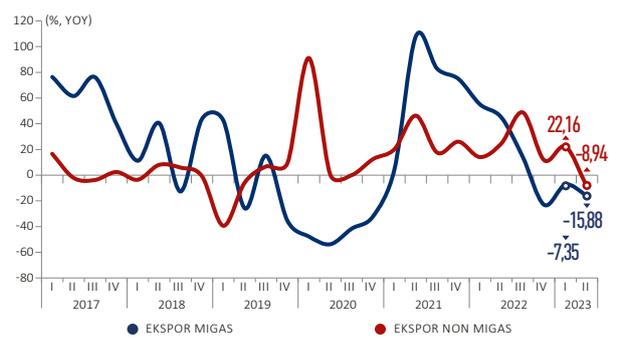
Menurut penggunaannya, pada triwulan II 2023, impor nonmigas dari luar negeri tersebut terdiri bahan baku, barang modal, dan barang konsumsi dengan pangsa masing-masing 66,86%, 27,29%, dan 5,85%. Impor bahan baku mengalami kontraksi lebih dalam sebesar 34,22% (yoy) pada triwulan I 2023 daripada triwulan sebelumnya



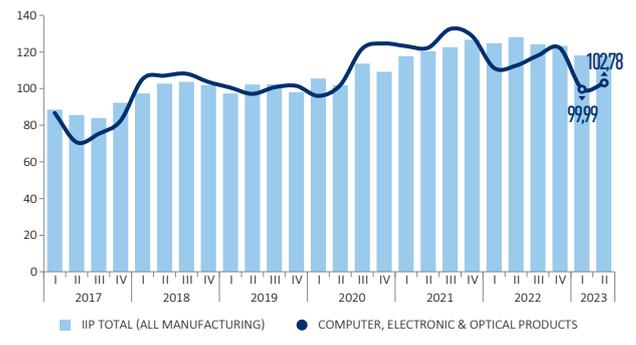
Grafik 1.11 Perkembangan Ekspor Total



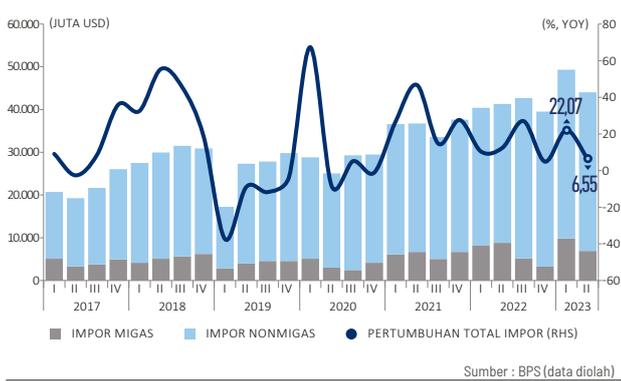
Grafik 1.13 Perkembangan Ekspor Produk Elektronik dan Mesin



Grafik 1.12 Perkembangan Ekspor Komoditas Nonmigas dan Migas



Grafik 1.14 Index of Industrial Production (IIP) Singapura untuk Peralatan Elektronik

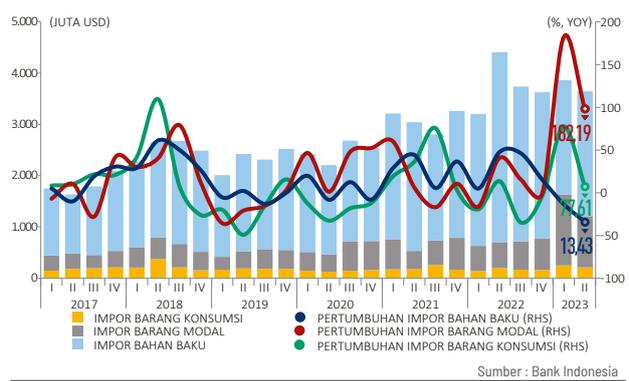


Grafik 1.15 Perkembangan Impor

yang berkontraksi sebesar 13,43% (yoy) seiring aktivitas produksi di beberapa industri pengolahan yang menurun tercermin dari penurunan kapasitas utilisasi akibat penurunan penjualan baik ekspor maupun domestik. Begitu pula dengan impor barang modal yang tumbuh melambat sebesar 27,29% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 35,90% (yoy). Demikian halnya impor barang konsumsi tumbuh melambat sebesar 5,85% (yoy) ditengarai oleh penurunan pembelian barang konsumsi oleh masyarakat.

1.2 PERTUMBUHAN EKONOMI BERDASARKAN LAPANGAN USAHA

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pembangunan masif terus yang berlanjut pada triwulan II 2023 sehingga mampu mendorong kinerja sektor terkait. Meskipun demikian, hampir seluruh lapangan



Grafik 1.16 Perkembangan Impor Nonmigas - BEC



Grafik 1.17 Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB (%)

Tabel 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Lapangan Usaha

PDRB SISI LAPANGAN USAHA	2020					2021					2022					2023		ARAH TW
	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,62	-6,16	-6,60	-6,61	-4,39	-15,45	0,79	2,78	2,82	-2,65	3,00	3,53	2,41	5,19	3,55	4,67	-2,44	▼
Pertambangan dan Penggalian	-0,96	-3,95	-1,75	-9,60	-4,17	-6,98	3,41	-2,20	3,80	-0,74	-7,05	8,37	-4,06	-22,89	-7,00	-14,87	-0,51	▲
Industri Pengolahan	4,29	1,34	0,93	6,50	3,25	7,33	7,61	3,79	7,13	6,45	4,16	2,28	4,87	6,73	4,55	7,77	-0,27	▼
Pengadaan Listrik, Gas	1,92	-5,01	-7,41	-6,62	-4,38	0,61	1,76	6,31	8,61	4,32	10,93	18,53	17,62	18,35	16,38	12,08	11,03	▼
Pengadaan Air	0,15	-11,07	-5,75	7,72	-2,78	0,68	5,09	-7,00	1,69	0,01	-0,71	3,27	24,05	9,31	8,82	11,53	-3,28	▼
Konstruksi	4,70	-11,41	-8,59	-9,24	-6,40	0,05	9,42	8,75	1,40	4,74	0,69	-0,01	2,89	17,95	5,45	7,53	10,48	▲
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,81	-11,03	-21,10	-18,89	-12,72	-17,16	-1,96	11,88	15,60	1,07	19,19	21,77	7,38	6,97	13,59	5,11	2,19	▼
Transportasi dan Pergudangan	-7,21	-62,78	-45,88	-40,84	-40,23	-30,67	56,21	-16,19	14,69	-1,70	19,06	32,43	81,05	31,11	38,37	33,07	21,77	▼
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-19,59	-57,37	-43,74	-40,26	-41,01	-18,27	21,64	-27,51	5,92	-6,69	5,02	45,32	98,36	60,29	49,71	82,70	44,71	▼
Informasi dan Komunikasi	5,58	17,17	19,47	23,85	16,55	19,46	7,02	7,00	6,21	9,59	6,04	-12,43	16,53	23,58	8,66	24,53	51,60	▲
Jasa Keuangan	-1,22	-4,86	-5,07	-1,17	-3,10	-0,21	4,37	1,64	-2,74	0,73	4,96	-3,68	5,13	10,49	4,17	4,94	12,83	▲
Real Estate	2,59	-9,65	-11,22	-14,88	-8,33	-14,66	-0,62	0,88	1,95	-3,56	1,01	2,55	5,67	9,25	4,64	11,35	7,51	▼
Jasa Perusahaan	-31,07	-52,56	-51,56	-33,68	-41,88	-11,60	41,22	36,52	7,83	14,14	0,73	3,86	18,47	18,73	10,65	34,00	27,36	▼
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,95	3,06	11,07	11,80	7,97	-9,24	3,89	-22,10	-6,61	-8,42	-9,65	13,54	8,62	-1,06	3,36	8,03	3,39	▼
Jasa Pendidikan	2,20	-11,85	-11,06	-11,90	-8,20	-11,43	3,77	-3,85	-0,72	-3,38	-1,00	2,44	6,01	5,85	3,32	8,82	7,44	▼
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,28	-8,94	3,18	-3,16	-2,05	12,45	31,04	5,04	4,51	12,30	0,39	-11,55	4,94	6,15	-0,02	6,21	-7,37	▼
Jasa lainnya	-30,69	-96,12	-79,17	-66,95	-68,83	-45,07	637,66	16,27	-8,83	-3,40	6,73	140,12	94,80	58,95	69,97	37,38	8,79	▼
PERTUMBUHAN PDRB	2,02	-6,81	-5,81	-4,46	-3,80	-1,19	6,90	2,97	5,27	3,43	2,83	5,01	6,03	6,40	5,09	6,51	5,04	▼

▲ Menguat
▼ Melambat

Sumber: BPS (data diolah)

usaha di Provinsi Kepri mengalami pertumbuhan yang melambat terutama pada LU Industri Pengolahan serta Perdagangan Besar dan Eceran. Sementara itu, pertumbuhan didukung oleh LU Konstruksi, Informasi dan Komunikasi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Transformasi dan Pergudangan, serta Jasa Keuangan dan Asuransi.

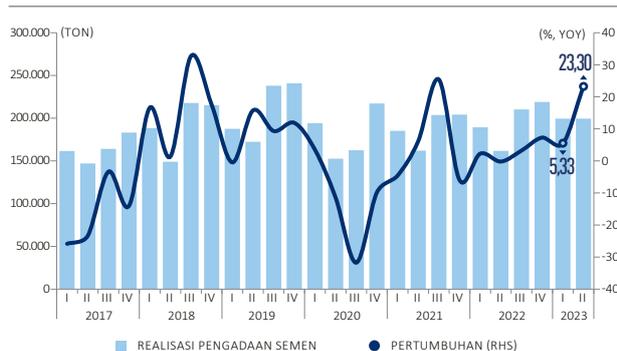
Secara struktur, perekonomian Provinsi Kepri pada triwulan II 2023 masih didominasi oleh LU Industri Pengolahan dengan pangsa 38,23%. Pangsa terbesar kedua yakni LU Konstruksi sebesar 19,26%, diikuti LU Pertambangan dan Penggalian, serta LU Perdagangan Besar dan Eceran masing-masing sebesar 12,53% dan 9,61%. Pertumbuhan LU Industri Pengolahan mengalami perlambatan sejalan dengan perlambatan permintaan global terhadap produk elektronik yang tercermin dari penurunan *output forecast* dari Singapura untuk industri manufaktur. Meskipun demikian, pertumbuhan LU Konstruksi yang meningkat masih menyokong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Peningkatan pertumbuhan LU Konstruksi didorong oleh pembangunan infrastruktur yang masif dilakukan setelah tertunda selama pandemi COVID-19. Pertumbuhan LU Infokom kategori Informasi dan Komunikasi mengalami peningkatan signifikan yang disebabkan oleh telah selesainya pembangunan infrastruktur jaringan seperti *Base Transceiver Station* (BTS) di beberapa daerah di Kepri dan juga didorong oleh Kepri menjadi stasiun peluncuran satelit Satria-1 (Satelit Republik Indonesia). Lebih lanjut, akselerasi pada sektor yang berkaitan dengan pariwisata seperti LU Penyediaan Akomomodasi, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Transportasi yang dipengaruhi oleh masih tingginya jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Kepulauan Riau.

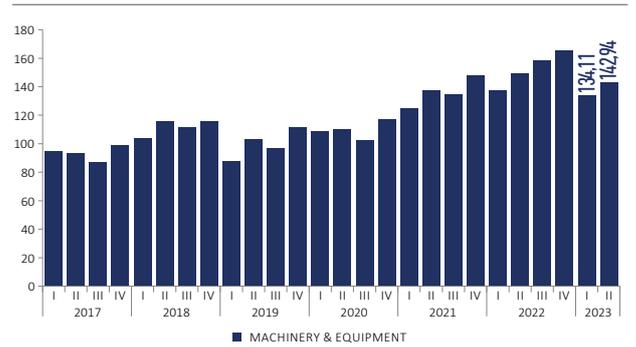
Adapun LU Perdagangan Besar dan Eceran masih tumbuh tinggi meski melambat dari triwulan sebelumnya. Peningkatan aktivitas pariwisata tersebut dipengaruhi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan sejalan dengan pembukaan *border* dengan Singapura yang efektif dilakukan mulai April tahun 2022 seiring dengan pengumuman secara global pencabutan status darurat COVID-19 oleh WHO pada Mei 2023.

1.2.1 Lapangan Usaha Industri Pengolahan

LU Industri Pengolahan pada triwulan II 2023 mengalami kontraksi sebesar 0,27% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar



Grafik 1.19 Perkembangan Pengadaan/Penjualan Semen

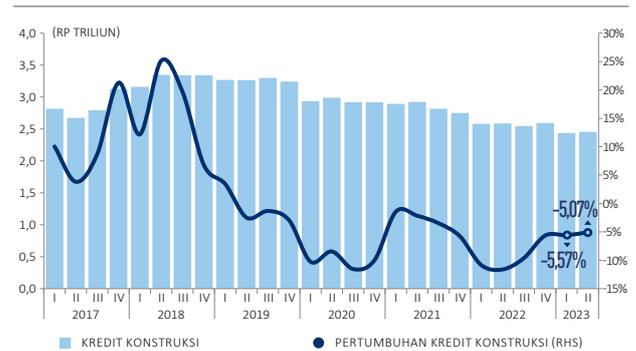


Grafik 1.18 Index of Industrial Production (IIP) Singapura untuk Machinery & Equipment

7,77% (yoy) dan memberikan andil -0,11% terhadap pertumbuhan Provinsi Kepri. Deselerasi pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan tersebut terkonfirmasi dari PDRB total ekspor dan total impor yang tumbuh melambat pada triwulan II 2023. Meskipun demikian, kinerja industri pengolahan masih disokong oleh aktivitas industri pengolahan di Singapura khususnya pada industri mesin sebagaimana tercermin dari peningkatan IIP Singapura untuk kelompok *machinery and equipment* pada triwulan II 2023 yang masih di level yang tinggi sebesar 142,94, lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya yang sebesar 134,11.

1.2.2 Lapangan Usaha Konstruksi

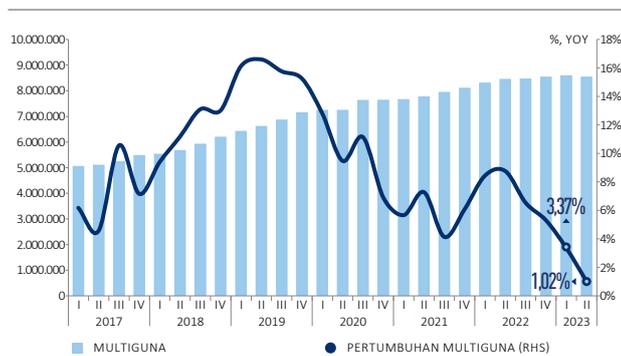
LU Konstruksi pada triwulan II 2023 tetap tumbuh dan mencatatkan andil pertumbuhan tertinggi terhadap PDRB Provinsi Kepri. LU Konstruksi pada triwulan II 2023 tumbuh sebesar 10,48% (yoy), tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,53% (yoy). Pertumbuhan kinerja LU Konstruksi terkonfirmasi dari pengadaan/penjualan semen yang terakselerasi dari triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 5,33% (yoy) menjadi sebesar 23,30% (yoy) pada triwulan II 2023. Selain itu, kredit perbankan untuk LU Konstruksi di Provinsi Kepri pun membaik dari 5,57% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 5,07% (yoy). Pertumbuhan LU Konstruksi tersebut memberikan andil tertinggi sebesar 1,84% terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri. Hal tersebut sejalan dengan berlanjutnya pembangunan proyek infrastruktur yang cukup masif dan masih tingginya aktivitas investasi perusahaan di Provinsi Kepri



Grafik 1.20 Perkembangan Kredit Konstruksi

1.2.3 Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor

Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran pada triwulan II 2023 tumbuh melambat sebesar 2,19% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,11% (yoy). Perlambatan tersebut seiring dengan tren pemulihan ekonomi yang mulai melandai karena hampir mencapai normalnya. Moderasi pertumbuhan pada LU Perdagangan juga tercermin dari perlambatan kredit perseorangan terutama kredit multiguna dari pertumbuhan sebesar 3,37% (yoy) menjadi 1,02% (yoy). Namun demikian, kredit pada LU Perdagangan Besar dan Eceran masih tumbuh sebesar 5,76% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 19,61% (yoy). Hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat dan pelaku usaha cukup optimis melihat kondisi ekonomi ke depan namun masih waspada dalam konsumsi.



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 1.21 Kredit Perorangan Multiguna

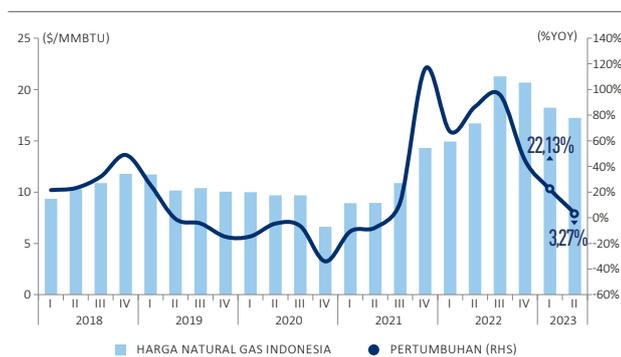
1.2.4 Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian

Pada triwulan II 2023 kinerja LU Pertambangan dan Penggalian masih berkontraksi sebesar 0,51% (yoy), namun membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 14,87% (yoy). LU Pertambangan dan Penggalian masih mengalami kontraksi namun membaik dibandingkan triwulan sebelumnya karena perbaikan pada kinerja produksi migas di Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas. Sementara itu, kinerja LU Pertambangan dan Penggalian tertahan oleh harga minyak dan gas yang mengalami perlambatan. Harga minyak dunia berlanjut mengalami penurunan hingga berkontraksi lebih dalam mencapai sebesar 30,88% (yoy) pada triwulan II 2023. Penurunan tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 19,42% (yoy). Kondisi yang sama juga terjadi pada harga gas alam yang pada triwulan II 2023 tercatat melambat sebesar 3,27% (yoy), lebih rendah dari harga pada triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 22,13% (yoy).



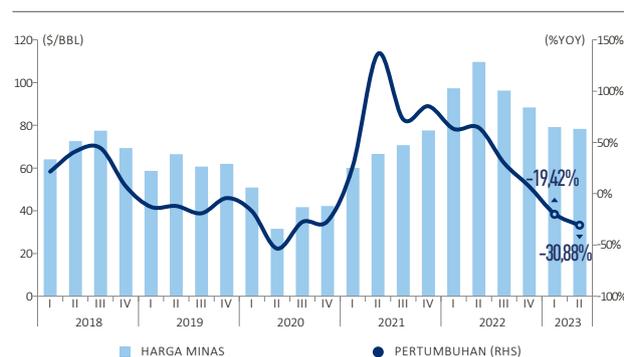
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 1.22 Kredit Perdagangan Besar dan Eceran



Sumber : Index Mundi (data diolah)

Grafik 1.23 Perkembangan Harga Gas Alam Indonesia



Sumber : Bloomberg (data diolah)

Grafik 1.24 Perkembangan Harga Minyak Dunia





BOKS 1

Laporan *Liaison* Triwulan II 2023

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau

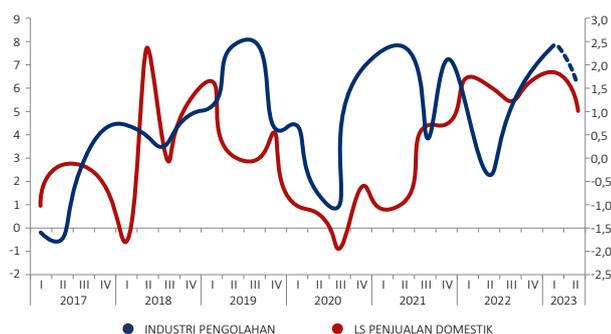
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau melakukan *liaison* kepada sejumlah responden dari berbagai sektor ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk mendapatkan gambaran perkembangan perekonomian Provinsi Kepri. Sektor ekonomi yang menjadi fokus pada triwulan II 2023 terdiri dari Industri Pengolahan (46,2%), Perdagangan Besar dan Eceran (15,4%), Pertambangan dan Penggalian (15,4%), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (15,4%), serta Pengadaan Listrik, Gas (7,7%). Ruang lingkup analisa laporan *liaison* mencakup permintaan domestik dan ekspor, kapasitas utilitas, persediaan, investasi, biaya, harga jual dan margin, tenaga kerja, pembiayaan serta prakiraan kondisi dimasa yang akan datang.

Dari sisi permintaan domestik di wilayah Provinsi Kepri, produksi dan penjualan domestik tumbuh positif meskipun sedikit melambat sebagaimana tercermin dari nilai *likert* sebesar 1,00, lebih rendah dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,50, serta lebih rendah dibandingkan triwulan I 2023 sebesar 1,78 (Grafik B1.1). Peningkatan permintaan domestik ditopang oleh sektor perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, penyediaan akomodasi, makan dan minum, penyediaan listrik dan gas serta sektor pertambangan dan penggalian. Peningkatan pada sektor perdagangan besar dan eceran serta penyediaan akomodasi, makan dan minum didorong oleh periode Ramadhan dan Idul Fitri disertai dengan pencabutan kebijakan PPKM sehingga meningkatkan jumlah kunjungan fisik namun penjualan daring berkurang. Di sisi lain, terjadi penurunan pada industri pengolahan disebabkan oleh penurunan permintaan akibat perusahaan tidak lagi memenangkan tender proyek. Sedangkan pada sektor pertambangan dan penggalian, penjualan mengalami penurunan akibat kapasitas tambang khususnya nonmigas yang belum optimal serta dampak dari kendala perpanjangan izin berusaha perusahaan. Pada sektor pengadaan listrik dan gas mengalami peningkatan dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan di sektor komersial (kawasan industri) seiring pertambahan jumlah kawasan.

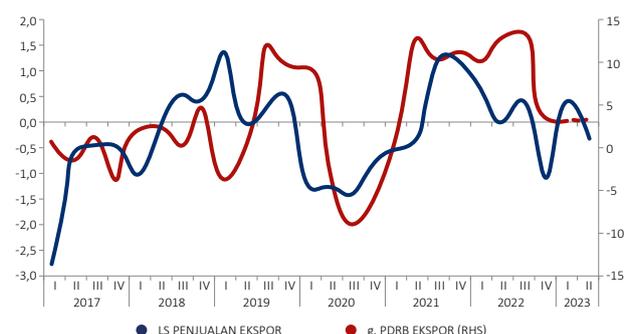
Sementara itu, kinerja penjualan ekspor dan prakiraan penjualan mengalami penurunan tercermin dari nilai *likert scale* sebesar -0,30, lebih rendah dibanding triwulan yang sama tahun lalu sebesar 0,00 dan triwulan I 2023 sebesar 0,38 (Grafik B1.2). Penurunan ini terutama terjadi di sektor industri pengolahan serta pertambangan dan penggalian. Pada sektor industri pengolahan, penurunan sejalan dengan permintaan global yang melambat akibat kebutuhan elektronik global khususnya *smartphone* yang berkurang karena berakhirnya sistem kerja WFH sejak berakhirnya pandemi COVID-19. Selain itu, kondisi geopolitik Rusia-Ukraina turut mempengaruhi penjualan ekspor perusahaan disebabkan permintaan yang menurun, kenaikan harga bahan primer, serta inflasi yang menyebabkan kebutuhan masyarakat untuk produk *personal care* dan *customer purchasing power* menurun. Sementara itu, penurunan pada sektor pertambangan dan penggalian disebabkan oleh menurunnya pasokan bahan baku serta kendala teknis seperti kerusakan mesin.

Rata-rata tingkat **kapasitas utilisasi** dari perusahaan yang menjadi kontak pada periode laporan tercatat sebesar 79,23%, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 86,21%. Penurunan terutama terjadi pada sektor industri pengolahan serta pertambangan dan penggalian. Penurunan pada sektor industri pengolahan disebabkan oleh *plant* produksi yang berhenti beroperasi pada Juni 2023 yang memiliki porsi penjualan sebesar 10,5% dari total penjualan perusahaan. Selain itu, perusahaan lainnya menginformasikan penurunan kapasitas utilisasi disebabkan oleh penjualan yang menurun. Sedangkan, pada sektor pertambangan dan penggalian, penurunan disebabkan oleh terhambatnya produksi karena kerusakan mesin

Di sisi lain, tingkat **persediaan** juga mengalami penurunan selaras dengan proyeksi inventori Bank Indonesia pada triwulan II 2023 sebesar 59,57% (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi pada triwulan I 2023



Grafik B1.1 LS Penjualan Domestik dan PDRB Industri Pengolahan



Grafik B1.2 LS Ekspor dan Proyeksi PDRB Ekspor

yang tumbuh sebesar 269,72% (yoy). Penurunan persediaan terutama terjadi pada sektor industri pengolahan serta sektor pertambangan dan penggalian. Pada sektor industri pengolahan, persediaan mengalami penurunan disebabkan pelepasan *plant* produksi seiring pencapaian program *inventory reduction*. Sementara itu, tingkat persediaan pada sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan akibat dampak kerusakan mesin menyebabkan kebutuhan untuk persediaan juga menurun.

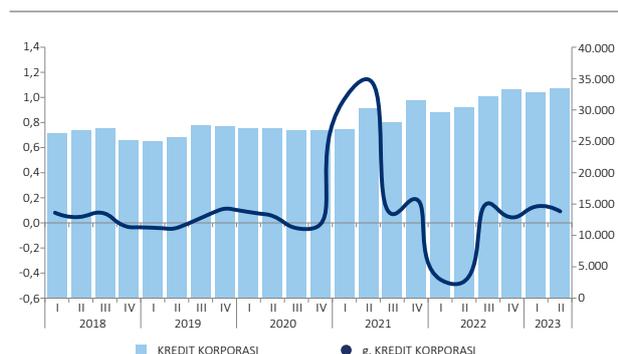
Secara umum, **investasi** tumbuh positif dan stabil dibanding triwulan sebelumnya yang tercermin dari *likert scale* yang tetap sama sebesar 1,00. Sebagian perusahaan tidak berencana melakukan ekspansi dan penambahan investasi karena keputusan investasi merupakan kewenangan pusat dan menunggu pengurusan izin berusaha. Investasi yang tetap tumbuh didorong oleh peningkatan investasi perusahaan dari sektor perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi makan dan minum, serta industri pengolahan. Pada sektor perdagangan besar dan eceran, perusahaan menginformasikan terdapat investasi penambahan gerai toko. Sedangkan pada sektor industri penyediaan makan dan minum didorong oleh penambahan alat operasional, *maintenance* gedung, dan pembukaan *café* di hotel. Selain itu, pada industri pengolahan terdapat investasi *multi years* yang masih berjalan hingga tahun 2026. Peningkatan investasi pada sektor industri pengolahan dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk maupun kapasitas produksi. Penambahan investasi pada sektor penyediaan makan dan minum serta perdagangan besar dan eceran didorong oleh mobilitas masyarakat yang terus meningkat setelah kondisi pandemi yang berangsur normal kembali.

Secara umum, variabel biaya mengalami penurunan terutama pada komponen biaya bahan baku dan biaya energi. Komponen biaya bahan baku mengalami penurunan didorong oleh penurunan permintaan yang mempengaruhi biaya operasional perusahaan dan normalisasi ketersediaan persediaan semikonduktor di pasar sebagai bahan baku. Komponen biaya energi cenderung lebih stabil dan biaya tenaga kerja mengalami peningkatan seiring dengan kenaikan UMK di tahun 2023. Penurunan biaya bahan baku tercermin pada peningkatan harga komoditas *palladium*, *copper*, dan timah sebagai bahan baku industri elektronik.

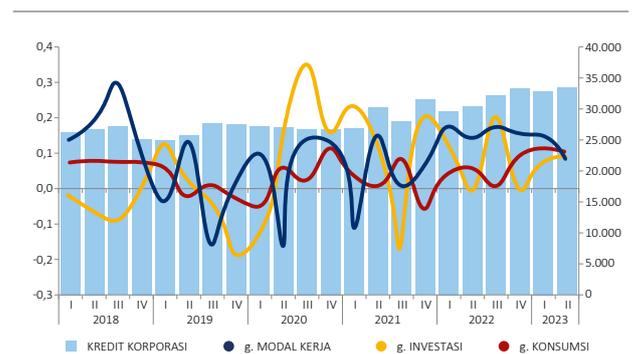
Secara umum harga jual pada triwulan II 2023 meningkat dibandingkan tahun lalu terutama pada sektor perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta pertambangan dan penggalian dipengaruhi oleh adanya kenaikan biaya produksi yang direspons perusahaan dengan menyesuaikan harga jual untuk menahan penurunan margin. Pada sektor perdagangan besar dan eceran, harga jual mengalami peningkatan didorong peningkatan harga jual dari *supplier*. Sementara itu, pada sektor penyediaan akomodasi makan dan minum mengalami peningkatan karena tarif kamar hotel yang meningkat karena perusahaan tidak menaikkan harga selama pandemi COVID-19. Pada sektor pertambangan dan penggalian, perusahaan menaikkan harga jual seiring dengan biaya operasional yang meningkat serta harga komoditas global yang turut mengalami peningkatan. Penetapan harga jual untuk sektor industri pengolahan pada umumnya dilakukan dengan menerapkan *cost plus margin*.

Jumlah **tenaga kerja** mengalami penurunan sejalan dengan efisiensi yang dilakukan perusahaan seiring dengan meningkatnya biaya tenaga kerja setiap tahun. Penurunan tenaga kerja terjadi di sektor perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, serta pertambangan dan penggalian. Pada sektor perdagangan besar dan eceran, jumlah tenaga kerja mengalami penurunan seiring kontrak yang tidak diperpanjang bagi sebagian pegawai untuk efisiensi perusahaan. Sedangkan pada sektor industri pengolahan, penurunan terjadi disebabkan oleh pengurangan lini produksi yang membutuhkan banyak sumber daya manusia akibat penurunan penjualan pada triwulan II 2023. Sementara itu, penurunan terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian didorong oleh mutasi pegawai ke cabang perusahaan seiring dengan menurunnya produksi.

Secara umum pembiayaan pada perusahaan PMA dan multinasional menggunakan dana internal perusahaan atau dari *headquarter*. Sedangkan, kontak yang merupakan PMDN, menggunakan dua alternatif pembiayaan, yaitu dari internal perusahaan atau pinjaman dari perbankan. Sebagian besar perusahaan liaison pada triwulan II 2023 menginformasikan pembiayaan diperoleh dari pembiayaan internal. Jumlah penyaluran pembiayaan/kredit perbankan di Kepri khususnya pada segmen korporasi yang mengalami penurunan sebesar 0,09% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,11% (yoy). Hal ini juga tercermin dari penurunan kredit korporasi terutama kredit modal kerja pada triwulan II 2023 dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya (Grafik B1.4).



Grafik B1.3 LS Penjualan Domestik dan PDRB Industri Pengolahan



Grafik B1.4 LS Ekspor dan Proyeksi PDRB Ekspor

BAB II

Perkembangan Keuangan Daerah

Realisasi Pendapatan Pemda Wilayah Kepri



Tw II
2023

39,66%
Rp 5,47T

Tw II
2022

40,64%
Rp 5,19T

Realisasi Belanja Pemda Wilayah Kepri



Tw II
2023

34,17%
Rp 4,94T

Tw II
2022

33,20%
Rp 4,47T

Realisasi Belanja APBN



Tw II
2023

32,62%
Rp 2,96T

Tw II
2022

33,15%
Rp 2,20T

Realisasi Belanja Infrastruktur APBN



Tw II
2023

25,79%
Rp 674,57M

Tw II
2022

20,02%
Rp 237,60M



Realisasi pendapatan Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hingga triwulan II 2023 tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu disebabkan oleh realisasi penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Sementara itu, realisasi belanja pemerintah tercatat meningkat yang terjadi pada pos belanja operasi dan belanja transfer.



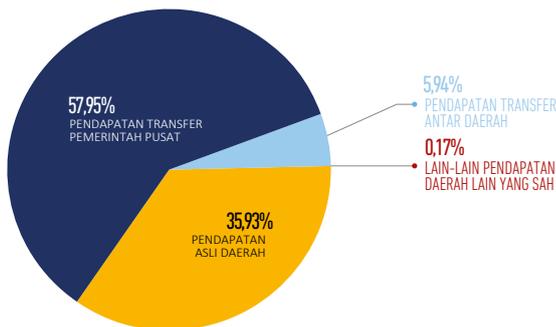
Realisasi pendapatan Pemda di wilayah Provinsi Kepri sampai dengan triwulan II 2023 tercatat sebesar 39,66%, sementara realisasi belanja mencapai 34,17% dari total anggaran. Realisasi pendapatan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 40,62%. Penurunan pendapatan terutama terjadi pada semua pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sementara itu, realisasi belanja mengalami peningkatan dari 33,20% di triwulan II 2022 menjadi sebesar 34,17% di triwulan II 2023, disebabkan kenaikan belanja operasi khususnya belanja pegawai dan belanja transfer berupa belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.

2.1 REALISASI PENDAPATAN

Realisasi pendapatan seluruh Pemda di wilayah Provinsi Kepri pada triwulan II 2023 mencapai 39,66% dari total anggaran atau sebesar Rp5,47 triliun. Persentase realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2022 yang mencapai 40,62% dari total anggaran atau Rp5,19 triliun. Penurunan tersebut disebabkan

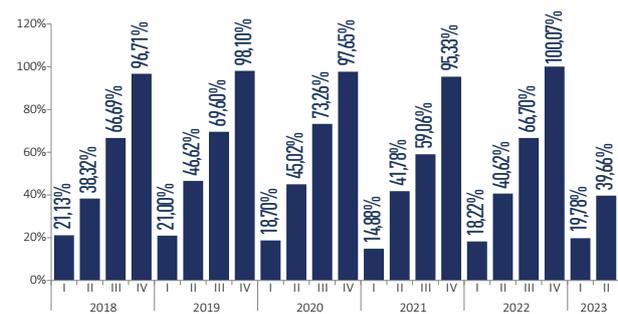
menurunnya realisasi dari pos Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah dari sebesar 41,50% menjadi 36,12% serta menurunnya realisasi dari pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari sebesar 36,38% menjadi 30,11% pada triwulan II 2023.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada seluruh Pemda di Provinsi Kepri hingga triwulan II 2023 tercatat sebesar Rp3,17 triliun atau 36,12% dari pagu anggaran, lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp3,33 triliun atau 41,50% dari pagu anggaran. Penurunan tersebut berasal dari seluruh pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat seperti Dana Perimbangan yang mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik/Non Fisik, serta Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) tersebut disebabkan oleh penyiapan syarat penyaluran DAU spesifik tahap dua oleh pemerintah daerah dan juga adanya proses verifikasi sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun sebelumnya untuk satuan pendidikan penerima dana yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) daerah.



Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

Grafik 2.1 Komposisi Realisasi Pendapatan Triwulan II 2023



Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

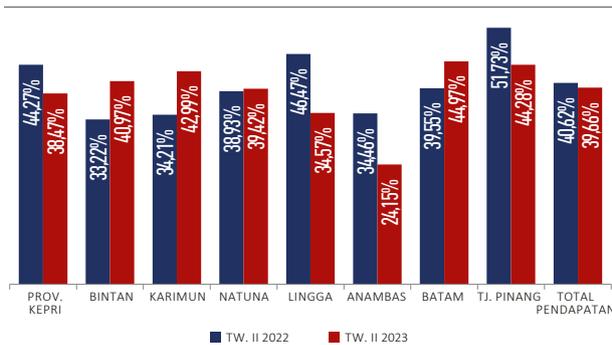
Grafik 2.2 Perkembangan Realisasi Pendapatan Triwulan II 2023

Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan II 2023

JENIS ANGGARAN	ANGGARAN		REALISASI		Porsi (%)
	Rp	Struktur (%)	Rp	Realisasi (%)	
Pendapatan Asli Daerah	4.289,46	33,24%	1.965,00	45,81%	35,93%
Pajak Daerah	3.421,50	26,51%	1.647,37	48,15%	
Retribusi Daerah	233,26	1,81%	76,85	32,94%	
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	61,77	0,48%	34,99	56,64%	
Lain-lain PAD yang Sah	572,92	4,44%	205,80	35,92%	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	8.775,46	67,99%	3.169,54	36,12%	57,95%
Dana Perimbangan	8.494,54	65,82%	3.062,81	36,06%	
Dana Insentif Daerah (DID)	63,13	0,49%	26,23	41,56%	
Dana Desa	217,79	1,69%	80,49	36,98%	
Pendapatan Transfer Antar Daerah	691,92	5,36%	324,95	46,96%	5,94%
Pendapatan Bagi Hasil	685,72	5,31%	323,95	47,24%	
Bantuan Keuangan	6,20	0,05%	1,00	16,13%	
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	31,49	0,24%	9,48	30,11%	0,17%
Hibah	7,12	0,06%	0,00	0,00%	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	24,37	0,19%	9,48	38,90%	
TOTAL PENDAPATAN	13.788,33	100,00%	5.468,97	39,66%	

Sumber: BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (diolah)

Berdasarkan wilayah kewenangan, realisasi pendapatan tertinggi dicapai Pemerintah Kota Batam dengan jumlah pendapatan sebesar Rp1,45 triliun atau 44,97% dari total anggaran. Capaian realisasi tertinggi berikutnya yakni Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Karimun masing-masing sebesar 44,28% dan 42,99% dari pagu anggaran tahun ini.



Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

Grafik 2.3 Realisasi Pendapatan Pada Masing-masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri

2.2 REALISASI BELANJA

Realisasi belanja Pemda di wilayah Provinsi Kepri sampai dengan triwulan II 2023 tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini sejalan dengan peningkatan aktivitas pembangunan dan perekonomian di Kepri yang dipengaruhi oleh pelonggaran mobilitas masyarakat seiring dengan kasus Covid-19 yang semakin terkendali. Realisasi belanja Pemda hingga triwulan II 2023 telah mencapai 34,17% dari pagu anggaran atau sebesar Rp4,94 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang hanya mencapai 33,20% atau sebesar Rp4,47 triliun. Peningkatan realisasi belanja terjadi pada pos belanja operasi khususnya belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta pada pos belanja transfer berupa belanja bagi hasil dan bantuan keuangan. Realisasi belanja Pemda berdasarkan pos pengeluaran didominasi oleh belanja operasi dengan porsi 81,56%, diikuti belanja transfer sebesar 10,54%, belanja modal sebesar 7,85%, dan belanja tak terduga sebesar 0,05%.

Realisasi belanja operasi tercapai sebesar 37,50% dari pagu anggaran atau tercatat sebesar Rp4,03 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan II 2023

JENIS ANGGARAN	ANGGARAN		REALISASI		Porsi (%)
	Rp	Struktur (%)	Rp	Realisasi (%)	
Belanja Operasi	10.742,36	77,01%	4.028,74	37,50%	81,56%
Belanja Pegawai	5.043,68	36,16%	2.298,22	45,57%	
Belanja Barang dan Jasa	4.946,29	35,46%	1.537,42	31,08%	
Belanja Bunga	13,14	0,09%	4,56	34,71%	
Belanja Subsidi	2,45	0,02%	1,42	57,98%	
Belanja Hibah	722,90	5,18%	184,91	25,58%	
Belanja Bantuan Sosial	13,90	0,10%	2,21	15,92%	
Belanja Modal	2.454,36	17,60%	387,61	15,79%	7,85%
Belanja Modal Tanah	12,76	0,09%	1,39	10,89%	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	498,21	3,57%	72,85	14,62%	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	706,10	5,06%	72,84	10,32%	
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.200,12	8,60%	229,01	19,08%	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35,06	0,25%	10,94	31,20%	
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	2,10	0,02%	0,58	27,65%	
Belanja Tidak Terduga	51,97	0,37%	2,64	5,07%	0,05%
Belanja Transfer	1.208,67	8,66%	520,58	43,07%	10,54%
Belanja Bagi Hasil	675,44	4,84%	337,03	49,90%	
Belanja Bantuan Keuangan	533,23	3,82%	183,55	34,42%	
TOTAL BELANJA	14.457,35	103,64%	4.939,57	34,17%	
SURPLUS/DEFISIT	-669,03		529,40		
Pembiayaan Neto	684,43		128,10		
Penerimaan Pembiayaan Daerah	770,77		149,70		
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	86,34		21,60		
SILPA TAHUN BERKENAAN	15,41		657,51		

Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (diolah)

mencapai 36,59% dari pagu anggaran atau sebesar Rp3,65 triliun.

Jika dirinci lebih lanjut, belanja pegawai sampai dengan triwulan II 2023 tercapai 45,57% atau sebesar Rp2,29 triliun, lebih tinggi dibanding triwulan yang sama tahun lalu yakni sebesar 44,39%. Selain itu, belanja barang dan jasa mengalami kenaikan realisasi menjadi 31,08% dari sebesar 31,00% pada triwulan II 2022. Demikian pula dengan, belanja hibah terealisasi 25,58% dari pagu, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 24,43%.

Realisasi belanja juga didorong oleh kenaikan realisasi belanja transfer bagi hasil retribusi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa serta belanja bantuan keuangan kepada Desa. Realisasi belanja transfer tercapai 43,07% dari pagu anggaran atau sebesar Rp520,58 miliar, meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercapai 39,16% atau sebesar Rp429,39 miliar. Peningkatan ini didorong oleh bertambahnya penerimaan pada pos pajak dan retribusi daerah yang di dalamnya terdapat komponen bagi hasil daerah seperti pajak kendaraan bermotor, dan pajak BBM.

Di sisi lain, penyerapan pos belanja modal pada triwulan II 2023 hanya mencapai 15,79% atau sebesar Rp387,61 triliun dari pagu anggaran, lebih rendah dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 16,97% dari pagu anggaran atau Rp392,10 miliar. Hal ini disebabkan karena kegiatan pembangunan gedung, bangunan, jalan, irigasi serta jaringan yang masih dalam

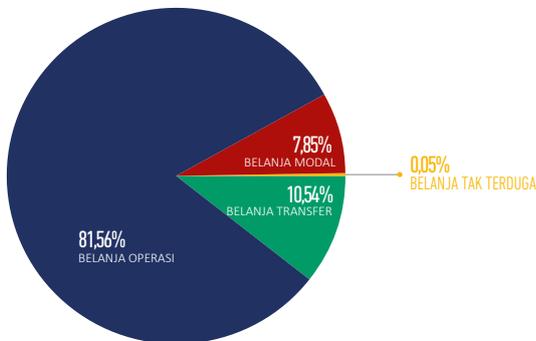
tahap awal pembayaran, sehingga diprediksi akan terjadi peningkatan realisasi di triwulan III dan IV 2023.

Berdasarkan wilayah administrasi, Pemda dengan tingkat realisasi belanja tertinggi sampai dengan triwulan II 2023 yakni Kota Batam yang mencapai 39,57% dari total anggaran atau sebesar Rp1,31 triliun, diikuti Kabupaten Natuna yang mencapai 38,06% atau sebesar Rp417,76 miliar, dan Kota Tanjungpinang yang mencapai 37,86% atau sebesar Rp398,36miliar.

2.3 ANGGARAN DAN REALISASI APBN DI WILAYAH KEPRI

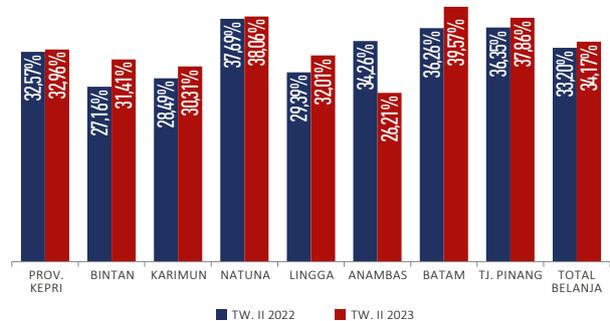
Realisasi belanja APBN di wilayah Provinsi Kepri sampai dengan triwulan II 2023 mencapai Rp2,96 triliun atau sebesar 32,62% dari pagu, lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2022 yang mencapai Rp 2,20 triliun atau 33,15% dari pagu. Peningkatan realisasi terjadi pada pos belanja pegawai, barang, dan modal yang masing-masing mencapai Rp1,06 triliun, Rp1,33 triliun dan Rp0,51 triliun pada triwulan II 2023, meningkatkan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya masing-masing sebesar Rp0,87 triliun, Rp1,01 triliun dan Rp0,26 triliun.

Secara keseluruhan, pagu belanja APBN di Provinsi Kepri pada 2023 tercatat mengalami kenaikan dari sebelumnya sebesar Rp6,64 triliun pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp9,06 triliun pada tahun 2023 atau



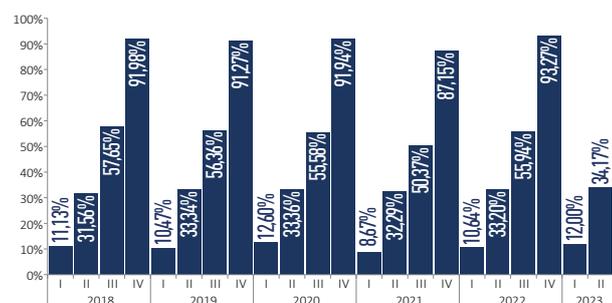
Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

Grafik 2.4 Komposisi Realisasi Belanja Triwulan II 2023



Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

Grafik 2.6 Realisasi Belanja pada Masing-Masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri



Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

Grafik 2.5 Perkembangan Realisasi Belanja Triwulan II 2023

Tabel 2.3 Akumulasi Anggaran dan Realisasi Belanja APBN Wilayah Provinsi Kepri

NO	Jenis Belanja	Triwulan II 2022			Triwulan II 2023		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Pegawai	1.768,13	870,79	49,25%	2.129,77	1.064,89	50,00%
2	Barang	3.182,33	1.012,19	31,81%	3.974,86	1.330,51	33,47%
3	Modal	1.437,46	262,85	18,27%	2.706,65	505,64	18,68%
4	Bansos	2,55	1,01	39,70%	4,60	1,51	32,91%
5	Lain-Lain	248,64	54,00	21,72%	246,44	53,54	21,73%
TOTAL		6.639,12	2.200,65	33,15%	9.062,32	2.956,09	32,62%

Sumber: Kajian Fiskal Regional Triwulan II 2023, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri

naik 36,50%. Peningkatan pagu anggaran terjadi pada hampir semua pos belanja seperti pos belanja pegawai, barang, modal, dan bansos. Pagu anggaran belanja naik di tahun ini karena perbaikan kondisi ekonomi yang mendorong tingkat serapan pendapatan negara.

Target belanja Kementerian/Lembaga (K/L) pada triwulan II 2023 berkisar 40% atau Rp3,62 triliun. Dengan demikian, realisasi dan target belanja masih terdapat gap sebesar 7,38% atau sebesar Rp668,83 miliar karena realisasi belanja barang yang belum setinggi yang diharapkan. Sementara itu, kendala dalam penyerapan belanja barang dan modal dikarenakan proses realisasi pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan progres pekerjaan sehingga pembayaran diperkirakan akan meningkat pada triwulan III dan IV 2023.

Sejumlah langkah strategis telah dilakukan untuk percepatan realisasi APBN di Provinsi Kepri pada triwulan II 2023. Penyelenggaraan kegiatan *one on one meeting* dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker berpagu anggaran besar dalam rangka mitigasi kendala pelaksanaan anggaran dari satker bersangkutan. Pemerintah juga memberikan insentif dalam bentuk *treasury award* bagi satker dengan kinerja pelaksanaan anggaran terbaik untuk memotivasi peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran satker. Selain itu, satker telah didorong untuk melakukan kontrak pra Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai upaya percepatan realisasi anggaran tahun 2023. Demikian juga, realisasi satker pada triwulan yang berjalan terus dilakukan *monitoring* dan juga peringatan untuk melakukan percepatan realisasi anggaran secara berkala.

Di sisi lain, belanja untuk proyek pengembangan konektivitas udara terealisasi 49,48% dari total anggaran atau sebesar Rp77,27 miliar, diantaranya untuk pekerjaan lanjutan pembangunan terminal kargo di Kota Batam. Selain itu, realisasi untuk proyek peningkatan konektivitas darat mencapai 23,30% atau Rp437,54 miliar untuk lanjutan kegiatan pelaksanaan pembebasan lahan, pemeliharaan Jalan Toapaya Km. 46, Kab. Bintan, pembangunan dan reservasi jalan dan jembatan pada kawasan Bintan serta penanganan jalan dan jembatan Sp. Sekunyam - Desa Cemaga di Kab. Natuna. Sementara itu, belanja proyek untuk pengembangan konektivitas laut mencapai 30,61% atau Rp123,61miliar, salah satunya untuk peningkatan Jalan Pelabuhan Parit I di Kab. Karimun. Belanja proyek untuk pembuatan dan pemeliharaan bendungan dan SDA telah terealisasi sebesar Rp36,14 miliar atau 20,29% dari total anggaran.

Tabel 2.4 Anggaran Belanja Infrastruktur APBN Wilayah Provinsi Kepri

No	Jenis Proyek	Triwulan II 2022			Triwulan II 2023		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Konektivitas Udara	103,76	41,49	39,99%	156,19	77,27	49,48%
2	Konektivitas Laut	415,17	70,09	16,88%	403,78	123,61	30,61%
3	Konektivitas Darat	377,72	48,16	12,75%	1,877,98	437,54	23,30%
4	Program Ketahanan Sumber Daya Air	290,31	77,86	26,82%	178,14	36,14	20,29%
Total		1.186,96	237,60	20,02%	2.616,09	674,57	25,79%

Sumber: Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2023, Kanwil Dirjen Perbendaharaan Prov. Kepri

BAB III

Perkembangan Inflasi Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepulauan Riau

Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepulauan Riau (yoy)



Tw II 2023

2,64%



Tw I 2023

4,77%

Kota Batam (yoy)



Tw II
2023

2,75%



Tw I
2023

4,83%

Kota Tanjungpinang (yoy)



Tw II
2023

1,78%



Tw I
2023

4,28%

Indeks Harga Konsumen (IHK) Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan II 2023 menunjukkan terjadinya inflasi sebesar 2,64% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,77% (yoy). Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas pangan, transportasi dan makanan jadi. Penurunan harga komoditas pangan antara lain aneka sayuran seperti aneka cabai, minyak goreng, dan aneka sayuran seperti bayam dan kangkung seiring dengan perbaikan terhadap pasokan komoditas tersebut. Selain itu, penurunan harga Kelompok Transportasi sejalan dengan penurunan tarif angkutan udara seiring dengan penurunan harga bahan bakar. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK tetap berada dalam rentang sasaran inflasi yaitu $3,0 \pm 1\%$ hingga akhir tahun 2023.



Inflasi gabungan 2 Kota IHK di Provinsi Kepri tercatat 2,64% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,77% (yoy). Inflasi yang tercatat lebih rendah tersebut disebabkan oleh penurunan harga pada: (1) Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; (2) Kelompok Transportasi; dan (3) Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran. Secara spasial, inflasi gabungan 2 Kota IHK di Provinsi Kepri mengalami penurunan. Inflasi di Kota Batam mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya dari 4,83% (yoy) menjadi 2,75% (yoy) pada triwulan II 2023. Kondisi yang sama juga terjadi di Kota Tanjungpinang yang mengalami penurunan inflasi dari 4,28% (yoy) menjadi 1,78% (yoy). Pada saat yang sama, inflasi Nasional juga menurun dari 4,97% (yoy) menjadi sebesar 3,52% (yoy) pada triwulan II 2023.

Pada bulan Juni 2023, inflasi gabungan 2 Kota IHK di Provinsi Kepri tercatat mengalami inflasi sebesar 0,49% (mtm), lebih tinggi dibandingkan pada triwulan I 2023 yang mengalami deflasi sebesar 0,29% (mtm). Inflasi pada Juni 2023 terutama dipengaruhi oleh angkutan udara, telur ayam ras, aneka sayuran dan cabai rawit yang mengalami kenaikan seiring dengan peningkatan permintaan sejalan dengan HBKN Idul Adha pada Juni 2023. Sementara itu, inflasi tertahan terutama oleh penurunan harga bensin seiring dengan dampak lanjutan penurunan harga bensin non subsidi, penurunan harga emas perhiasan mengikuti harga internasional, dan daging ayam ras yang mengalami normalisasi setelah naik pada bulan sebelumnya.

3.1 PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT KELOMPOK BARANG DAN JASA

Inflasi gabungan 2 Kota IHK di Provinsi Kepri pada triwulan II 2023 tercatat 2,64% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,77% (yoy). Apabila dibandingkan dengan

Tabel 3.1 Inflasi Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang, dan Kota Batam

Kelompok	2020				2021				2022				2023	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Inflasi Nasional	2,96	1,96	1,42	1,68	1,37	1,33	1,60	1,87	2,64	4,35	5,95	5,51	4,97	3,52
Inflasi Kepri	1,09	0,24	0,10	1,18	1,56	1,52	2,07	2,26	3,24	5,89	6,79	5,83	4,77	2,64
Inflasi Tanjungpinang	1,40	-0,32	-0,03	1,66	1,44	1,22	1,31	0,86	2,15	5,27	6,12	4,96	4,28	1,78
Inflasi Batam	1,06	0,33	0,12	1,12	1,57	1,55	2,17	2,45	3,39	5,98	6,87	5,95	4,83	2,75

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 3.2 Penyumbang Inflasi Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepri Juni 2023

No	Komoditas	Kelompok	Andil Deflasi (% mtm)
1	Angkutan Udara	Transportasi	0,204
2	Telur Ayam Ras	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,098
3	Bayam	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,065
4	Sawi Hijau	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,062
5	Cabai Rawit	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,027
6	Rokok Kretek Filter	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,025
7	Bawang Putih	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,024
8	Beras	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,023
9	Ketimun	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,019
10	Kangkung	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,017

Sumber: BPS (data diolah)

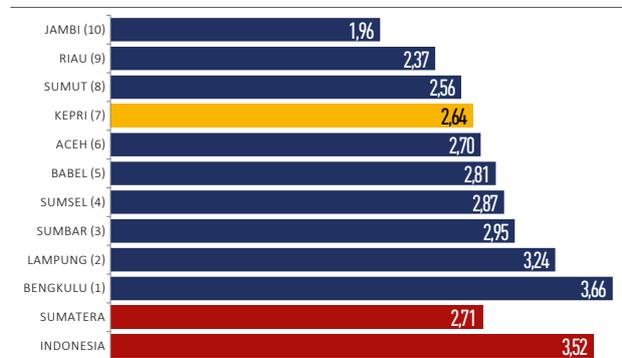
Tabel 3.3 Penyumbang Deflasi Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepri Juni 2023

No	Komoditas	Kelompok	Andil Inflasi (% mtm)
1	Bensin	Transportasi	-0,076
2	Emas Perhiasan	Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	-0,033
3	Daging Ayam Ras	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,029
4	Kacang Panjang	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,027
5	Ikan Mujair	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,015
6	Sotong	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,014
7	Ikan Kembung/Ikan Gembung/ Ikan Banyar/Ikan Gembolo/ Ikan Aso-Aso	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,013
8	Wortel	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,009
9	Kentang	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,007
10	Ayam Hidup	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,006

Sumber: BPS (data diolah)

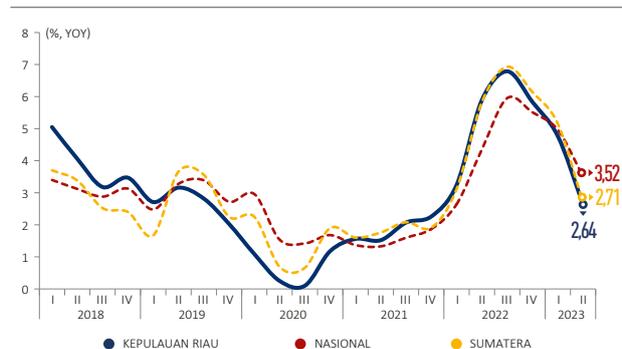
inflasi gabungan kota IHK di Provinsi lainnya di wilayah Sumatera, inflasi gabungan 2 Kota IHK di Provinsi Kepri termasuk dalam peringkat ke-7 dari 10 provinsi di Sumatera atau lebih rendah dari inflasi gabungan kota IHK di wilayah Sumatera yang tercatat sebesar 2,71% (yoy) dan lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Nasional sebesar 3,52% (yoy). Inflasi gabungan 2 Kota di Provinsi Kepri yang sempat memuncak pada triwulan III 2022, telah berangsur mengalami penurunan sejalan dengan normalisasi harga barang/jasa pasca penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi pada triwulan III 2023.

Melihat perkembangan inflasi per kelompok barang dan jasa, penurunan tekanan inflasi 2 Kota IHK di Provinsi Kepri pada triwulan



Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 3.1 Inflasi Triwulan II 2023 Regional Sumatera (yoy)



Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 3.2 Perkembangan Inflasi Kepulauan Riau, Nasional dan Sumatera Triwulan II 2023

Tabel 3.4 Inflasi Tahunan Kepulauan Riau Menurut Kelompok Barang dan Jasa (% , yoy)

No	Kelompok	2021								2022								2023			
		I		II		III		IV		I		II		III		IV		I		II	
		Andil	Inflasi																		
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	0,78	2,72	0,84	2,98	1,47	5,23	1,23	4,26	1,45	5,02	3,54	12,31	2,88	9,95	2,17	7,39	1,91	6,49	0,37	1,20
2	Pakaian dan Alas Kaki	0,01	0,19	0,05	0,91	0,08	1,41	0,11	1,98	0,16	2,88	0,13	2,44	0,08	1,36	0,08	1,43	0,12	2,18	0,14	2,70
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,03	0,19	0,06	0,32	0,07	0,38	0,08	0,43	0,17	0,93	0,20	1,10	0,27	1,52	0,36	2,04	0,41	2,37	0,38	2,26
4	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,04	0,82	0,08	1,54	0,06	1,25	0,07	1,38	0,23	4,70	0,25	5,05	0,27	5,36	0,24	4,94	0,13	2,64	0,09	1,75
5	Kesehatan	0,03	1,59	0,03	1,54	0,03	1,42	0,04	2,24	0,02	1,03	0,02	0,77	0,01	0,56	0,01	0,31	0,00	0,25	0,01	0,54
6	Transportasi	0,13	1,12	-0,18	-1,43	0,08	0,70	0,15	1,20	0,41	3,42	0,87	7,24	2,33	19,69	2,05	16,93	1,47	12,24	1,16	9,49
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,09	-1,49	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	-0,05	-0,22	-0,33	-0,02	-0,25	-0,02	-0,39	-0,02	-0,30	0,01	0,13	0,00	0,03
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,02	0,91	0,03	1,51	0,02	1,06	0,03	1,39	0,02	1,03	0,04	1,90	0,05	2,15	0,05	2,21	0,05	2,28	0,01	0,61
9	Pendidikan	0,19	3,14	0,19	3,14	0,11	1,80	0,11	1,80	0,11	1,80	0,11	1,80	0,17	2,77	0,17	2,76	0,17	2,82	0,16	2,82
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,26	3,30	0,24	3,00	0,24	3,03	0,37	4,71	0,31	3,76	0,42	5,20	0,44	5,40	0,31	3,81	0,17	2,03	0,04	0,43
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,15	2,36	0,17	2,56	-0,10	-1,42	0,08	1,23	0,39	5,95	0,33	4,94	0,32	4,88	0,41	6,32	0,33	4,89	0,28	4,24
	Umum		1,56		1,52		2,07		0,00		3,24		5,89		6,79		5,83		4,77		2,64

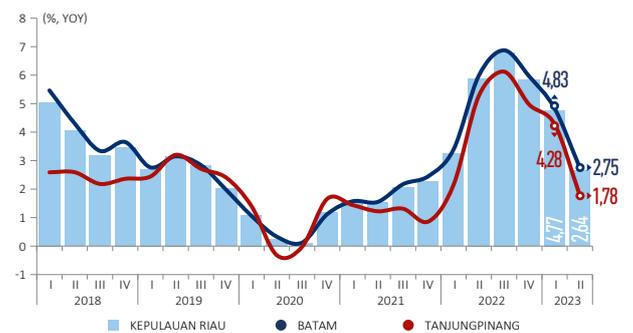
Sumber: BPS (data diolah)

II 2023 bersumber dari penurunan harga semua kelompok barang dan jasa kecuali Kelompok Pakaian dan Alas Kaki serta Kelompok Kesehatan. Penurunan inflasi secara tahunan tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan harga Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Transportasi dan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran yang memberikan andil inflasi tahunan pada triwulan sebelumnya sebesar 1,91%, 1,47%, dan 0,17% menjadi masing-masing sebesar 0,37%, 1,16%, dan 0,04%.

Penurunan tekanan inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau disebabkan oleh penurunan harga aneka cabai, minyak goreng, bayam dan telur ayam ras. Penurunan harga pada Kelompok Transportasi disebabkan oleh penurunan tarif angkutan udara, bensin dan mobil sejalan dengan normalisasi permintaan, penurunan harga minyak global, dan penurunan biaya pajak bea balik nama ke-2. Disamping itu, penurunan harga juga terjadi pada Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran yang disebabkan oleh penurunan sejumlah komoditas seperti kue kering berminyak, ayam bakar, ketupat/lontong sayur sejalan dengan normalisasi harga pasca HBKN Ramadhan dan Idul Fitri.

3.2 PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT KOTA

Secara spasial, 2 Kota IHK di Provinsi Kepri yakni Kota Batam dan Kota Tanjungpinang pada triwulan II 2023 mencatatkan inflasi namun dengan tren yang menurun. Inflasi Kota Batam tercatat sebesar 2,75% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,83% (yoy). Sementara itu, inflasi Kota Tanjungpinang juga mengalami penurunan menjadi sebesar 1,78% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 4,28% (yoy). Dengan demikian, inflasi gabungan 2 Kota IHK di Provinsi Kepri menunjukkan inflasi sebesar 2,64% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 4,77% (yoy).



Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 3.3 Perkembangan Inflasi Tahunan Kepulauan Riau, Batam, dan Tanjungpinang (yoy)

3.2.1 Inflasi Kota Batam

Kota Batam pada triwulan II 2023 mengalami inflasi sebesar 2,75% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,83% (yoy). Inflasi di Kota Batam pada triwulan II 2023 yang lebih rendah tersebut disebabkan oleh andil inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang turun sebesar 1,50% (yoy), andil inflasi Kelompok Transportasi yang turun sebesar 0,30% (yoy), dan andil inflasi Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran yang turun sebesar 0,13% (yoy), serta andil inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang turun sebesar 0,05% (yoy). Penurunan andil Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau terindikasi disebabkan oleh penurunan harga komoditas aneka cabai, minyak goreng, dan aneka sayur seperti bayam dan kangkung. Sementara itu, penurunan harga Kelompok Transportasi didorong oleh penurunan tarif angkutan udara, bensin dan mobil.

3.2.2 Inflasi Kota Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang pada triwulan II 2023 mengalami inflasi sebesar 1,78% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,28% (yoy). Penurunan Inflasi di Kota Tanjungpinang terjadi karena

Tabel 3.5 Andil Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa di Kota Penghitungan IHK (% - yoy)

Periode	I-2022		II-2022		III-2022		IV-2022		I-2023		II-2023	
	Batam	Tj. Pinang										
Makanan, Minuman dan Tembakau	1,57	0,58	3,60	3,10	2,92	2,58	2,24	1,65	1,93	1,72	0,44	-0,15
Pakaian dan Alas Kaki	0,17	0,05	0,15	0,03	0,08	0,04	0,08	0,04	0,13	0,02	0,16	0,01
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan bakar	0,15	0,31	0,18	0,34	0,23	0,53	0,32	0,59	0,42	0,37	0,39	0,37
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,23	0,23	0,25	0,28	0,27	0,25	0,25	0,18	0,15	0,04	0,10	0,02
Kesehatan	0,01	0,09	0,01	0,09	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	0,02	0,01	0,02
Transportasi	0,43	0,26	0,90	0,69	2,40	1,85	2,11	1,65	1,46	1,52	1,16	1,12
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,02	0,00	-0,02	-0,01	-0,02	-0,04	-0,02	-0,03	0,01	-0,02	0,01	-0,02
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0,02	0,02	0,04	0,05	0,04	0,06	0,04	0,06	0,05	0,05	0,01	0,02
Pendidikan	0,11	0,11	0,11	0,11	0,17	0,13	0,17	0,13	0,17	0,15	0,17	0,15
Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	0,33	0,11	0,45	0,22	0,46	0,29	0,31	0,31	0,16	0,24	0,02	0,13
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,39	0,37	0,32	0,37	0,32	0,35	0,43	0,32	0,35	0,16	0,30	0,13
Umum	3,39	2,15	5,98	5,27	6,87	6,12	5,95	4,96	4,83	4,28	2,75	1,78

Sumber: BPS (data diolah)

adanya penurunan andil inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang turun sebesar 1,87% (yoy), andil inflasi Kelompok Transportasi yang turun sebesar 0,40% (yoy), dan andil inflasi Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran yang turun sebesar 0,10% (yoy), serta andil inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang turun sebesar 0,04% (yoy). Penurunan andil Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang terindikasi disebabkan oleh penurunan harga komoditas yaitu aneka cabai, minyak goreng, aneka sayur seperti bayam dan kangkung. Sementara itu, penurunan harga Kelompok Transportasi didorong oleh penurunan harga ban luar mobil dan biaya pengiriman barang.

3.3 ARAH PERKEMBANGAN INFLASI

Inflasi gabungan 2 Kota IHK di Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 diperkirakan berada di bias bawah rentang target sasaran inflasi 2023 yakni 3,0±1%, mempertimbangkan perkembangan sejumlah indikator harga yang menunjukkan penurunan harga pada sejumlah komoditas dan moderasi dampak dari kenaikan BBM di tahun sebelumnya. Tekanan inflasi diperkirakan menurun dari Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau seiring dengan meningkatnya produksi pangan karena memasuki masa panen di triwulan III 2023. Selain itu, tekanan inflasi pada Kelompok Transportasi juga diperkirakan akan menurun seiring dengan harga bahan bakar yang relatif menurun dibandingkan periode sebelumnya.

Tekanan inflasi pada keseluruhan tahun diperkirakan mengalami tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya serta lebih rendah dibandingkan dengan prakiraan sebelumnya. Prakiraan tersebut sejalan dengan berkurangnya tekanan Inflasi dari komoditas global dan juga membaiknya rantai pasok dunia. Hal tersebut juga disebabkan oleh dampak *high based effect* dari penyesuaian BBM pada tahun 2022 yang berdampak pada lebih rendahnya inflasi tahunan pada tahun 2023. Prakiraan tersebut juga didukung oleh informasi hasil *liaison*

yang menyatakan bahwa rata-rata produsen sudah melakukan *price in* kenaikan harga pada awal tahun dan tidak akan menaikkan harga jual sampai akhir tahun.

Di sisi lain, sejumlah risiko inflasi hingga akhir tahun 2023 masih membayangi yang dapat meningkatkan tekanan inflasi antara lain: (1) fenomena El Nino yang banyak mempengaruhi wilayah di bawah ekuator dan menyebabkan kekeringan yang berdampak pada menurunnya produktivitas pangan; (2) potensi peningkatan permintaan menjelang musim liburan dan HBKN; (3) peningkatan mobilitas; (4) risiko inflasi global yang masih tinggi akibat ketegangan Rusia-Ukraina yang berlanjut; (5) peningkatan harga minyak dunia sejalan dengan adanya rencana pembatasan produksi dari negara-negara OPEC. Sementara itu, faktor yang menahan kenaikan inflasi antara lain adalah pengetatan kebijakan moneter di negara maju maupun negara berkembang dan kondisi permintaan yang belum sepenuhnya pulih.

3.4 UPAYA PENGENDALIAN INFLASI

Sinergi antar instansi dan lembaga dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus ditingkatkan dan diperkuat sebagai upaya pengendalian inflasi di tengah peningkatan tekanan inflasi global dan dinamika pasokan domestik yang mendorong Inflasi Provinsi Kepri melebihi target sasaran inflasi nasional. Berbagai upaya dilakukan dalam kerangka 4K yaitu, memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif. Upaya pengendalian yang telah dilakukan pada triwulan II 2023 yakni:

- Mengintensifkan pemantauan ketersediaan stok dan harga bahan pangan** pada level distributor bersama Satgas Pangan, termasuk **melakukan sidak pasar bersama Forkopimda** untuk memastikan ketersediaan stok, kewajaran harga dan masa kadaluwarsa bahan pokok penting.

- b. **Konsisten melakukan pemantauan distribusi, ketersediaan stok kebutuhan pokok di tingkat distributor, sub dan pasar.**
- c. **Pelaksanaan kegiatan operasi pasar untuk mengantisipasi peningkatan permintaan menjelang Idul Fitri sebanyak 50 titik di seluruh kabupaten dan kota se-Kepri, serta SPHP beras oleh Bulog di 285 titik jaringan Rumah Pangan Kita dan Toko Pangan Kita di Batam dan Tanjungpinang. Selain itu, secara konsisten melaksanakan stabilisasi harga dan pasokan pangan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk mengantisipasi peningkatan permintaan menjelang HBKN Idul Adha sebanyak 12 titik di 5 daerah yaitu Kota Batam (7 titik), Kota Tanjungpinang (2 titik), Kab. Karimun (1 titik), Kab. Natuna (1 titik), dan Kab. Bintan (1 titik).**
- d. Memastikan **kelancaran transportasi laut** dan melakukan pemantauan agar tidak terjadi spekulasi harga angkutan laut selama Ramadhan dan Idul Fitri.
- e. **Kick Off event Hack4ID berkolaborasi dengan Gerakan Nasional 1000 Start-Up Digital Kemkominfo dalam rangka mendorong inovasi** yang berkaitan dengan GNPIP.
- f. **Inovasi untuk mempermudah akses bahan produksi bagi para petani** dengan membentuk Kelompok Petani Muda dan Gerai Tani di Kab. Natuna melalui bantuan teknis dan PSBl.
- g. Mengoptimalkan **Gerai Pangan dan Koperasi mitra TPID** untuk penjualan hasil panen petani seperti cabai merah dan sayuran, serta hasil ikan.
- h. **Melaksanakan Sekolah Lapang pertanian cabai dengan metode Produksi Lipat Ganda (Proliga)** bekerja sama dengan Korem 033 Wira Pratama Kepulauan Riau kepada 63 petani disertai pemberian bantuan teknis di lahan seluas 2 Ha.
- i. **Penyerahan bantuan bibit cabai** kepada PKK di Kota Batam dan Tanjungpinang masing-masing sebanyak 5.000 bibit yang mendukung pertanian rumah tangga sehingga mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga sejalan dengan program percepatan penurunan *stunting*.
- j. **Melaksanakan sinergi program melalui HLM TPID sebanyak 7 kali pada triwulan II 2023** yaitu di Provinsi Kepri bersama Mendagri, Kota Batam, Kab. Lingga, Kota Tanjungpinang, dan Kab. Karimun.
- k. **Perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD)** antara Prov. Kepulauan Riau dengan Prov. Sumatera Selatan (G2G) serta intra provinsi antara Koperasi di Batam dan Karimun (B2B).

Dalam jangka panjang, TPID akan terus mendorong upaya peningkatan produktivitas petani/peternak/nelayan melalui program penguatan kelembagaan petani/peternak/nelayan, perluasan lahan pertanian, pengembangan sentra produksi pangan, menerapkan teknik budidaya yang teruji antara lain Program Lipat Ganda (Proliga), menerapkan metode pertanian organik, menerapkan *integrated farming* yang menghubungkan peternakan dan pertanian, akselerasi *urban farming*/program Pekarangan Pangan Lestari (P2L), dan penerapan

digital farming. Selain itu, TPID juga terus mendorong diversifikasi penggunaan pupuk organik, serta memfasilitasi *business matching* antara produsen/petani/peternak/nelayan dengan agregator/pembeli dan lembaga pembiayaan. Selain itu, TPID juga akan mendorong efisiensi arus barang dan bongkar muat khusus komoditas bahan pangan di pelabuhan/bandara. Serta, TPID akan mendorong diversifikasi pangan dan konsumsi produk olahan untuk mengurangi tekanan pasokan komoditas segar misalnya aneka cabai.

BAB IV

Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan Dan UMKM

Asset* (yoy)



Tw II
2023

11,12%
Rp 85,97T



Tw I
2023

9,70%
Rp 83,29T

Kredit* (yoy)



Tw II
2023

10,92%
Rp 46,06T



Tw I
2023

13,08%
Rp 45,16T

Kredit** (yoy)



Tw II
2023

8,73%
Rp 67,33T



Tw I
2023

10,88%
Rp 65,81T

Dana* (yoy)



Tw II
2023

7,92%
Rp 72,97T



Tw I
2023

11,32%
Rp 71,84T

LDR*



Tw II
2023

63,12%



Tw I
2023

62,86%

NPL*



Tw II
2023

2,29%



Tw I
2023

2,14%

UMKM



Tw II
2023

8,89%
Rp 12,05T



Tw I
2023

9,76%
Rp 11,54T

* dari bank yang berlokasi di Kepri,

** kepada proyek yang berlokasi di Kepri

Secara umum, kinerja Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih terjaga meskipun mengalami perlambatan pada triwulan II 2023. Perlambatan tersebut tercermin dari penurunan laju penyaluran kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK), namun tetap disertai dengan terjaganya kualitas kredit. Risiko kredit pada segmen korporasi, segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), maupun segmen kredit sektor rumah tangga masih terjaga (< 5%).



Kinerja perbankan di Provinsi Kepri pada triwulan II 2023 mengalami perlambatan tercermin dari penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek dan jumlah DPK yang menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Penyaluran kredit oleh bank berdasarkan lokasi proyek di Provinsi Kepri tumbuh sebesar 8,73% (yoy), lebih rendah dari triwulan I 2023 yang tumbuh sebesar 10,88% (yoy). Selain itu, DPK yang dihimpun oleh perbankan di Provinsi Kepri tumbuh sebesar 7,92% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,32% (yoy). Kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Kepri yang tercermin dari rasio LDR pada triwulan II 2023 mengalami pengetatan menjadi sebesar 63,12%, setelah pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar 62,86%. Penyaluran kredit yang terjaga turut didukung oleh kualitas kredit yang relatif baik sebagaimana rasio *NPL gross* yang tercatat stabil sebesar 2,29%.

Kinerja penyaluran kredit UMKM masih tumbuh positif meski melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dengan risiko kredit yang tetap terjaga. Penyaluran kredit kepada UMKM yang berlokasi di Provinsi Kepri pada triwulan II 2023 tumbuh sebesar 8,89% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,76% (yoy). Namun demikian risiko kredit sebagaimana tercermin dari rasio *NPL kredit UMKM* pada triwulan II 2023 mengalami sedikit peningkatan menjadi sebesar 3,63%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,46%. Perlambatan kinerja penyaluran kredit pada sektor UMKM bersumber dari Lapangan Usaha (LU) Perdagangan Besar dan Eceran dan LU Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan.

4.1 PERKEMBANGAN PERBANKAN PROVINSI KEPRI

Penyaluran kredit perbankan untuk proyek yang berlokasi di Provinsi Kepri pada triwulan II 2023 tumbuh sebesar 8,73% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2023 sebesar 10,88% (yoy). Demikian halnya secara lokasi bank, kredit yang disalurkan oleh perbankan di Provinsi Kepri tumbuh 10,92% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya sebesar 13,08% (yoy). Perlambatan kredit lokasi proyek terutama disebabkan oleh penurunan penyaluran kredit pada LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan Besar dan Eceran, LU Akomodasi dan Makan Minum, serta LU Real Estate, Sewaan, dan Jasa Perusahaan. Berdasarkan jenis penggunaan, perlambatan kredit didorong oleh kredit modal kerja dan konsumsi.

Di sisi lain, aset perbankan tumbuh sebesar 11,12% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 9,70% (yoy). Namun demikian, jumlah DPK tumbuh sebesar 7,92% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,32% (yoy). Perlambatan tersebut bersumber dari seluruh jenis DPK yaitu giro, tabungan, dan deposito. Pada triwulan II 2023, kemampuan pelaku usaha dalam membayar angsuran kredit relatif stabil tercermin dari tingkat kredit bermasalah (rasio *NPL gross*) yang masih terjaga sebesar 2,29%.

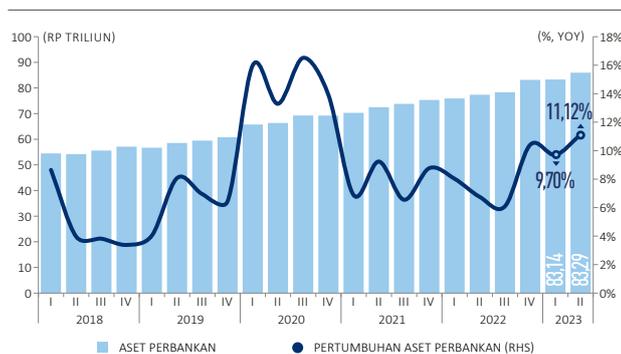
4.1.1 Perkembangan Aset Perbankan

Aset perbankan di Provinsi Kepri pada triwulan II 2023 berjumlah Rp85,97 triliun atau tumbuh 11,12% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 9,70% (yoy). Peningkatan aset bersumber dari

Tabel 4.1 Perkembangan Indikator Utama Perbankan Kepri

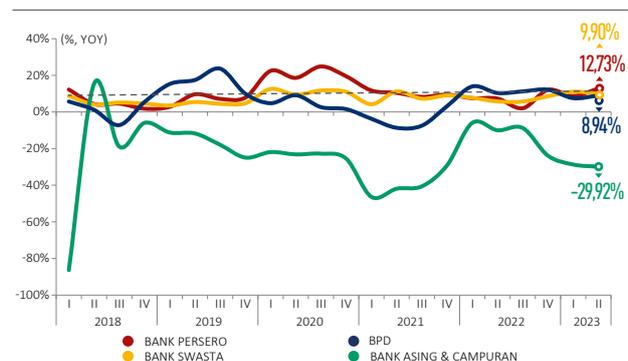
	2021 (Rp Triliun)				2022 (Rp Triliun)				2023 (Rp Triliun)		Pertumbuhan (%, YoY)	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	Tw I 2023	Tw II 2023
Total Aset*	70,28	72,47	73,82	75,31	75,92	77,37	78,31	83,14	83,29	85,97	9,70%	11,12%
Total Dana*	61,88	63,16	64,03	66,21	64,53	67,61	66,05	72,87	71,84	72,97	11,32%	7,92%
Total Kredit*	37,63	37,97	38,44	40,15	39,94	41,52	42,98	44,88	45,16	46,06	13,08%	10,92%
Total Kredit**	53,33	58,01	56,44	59,69	59,35	61,92	63,13	64,86	65,81	67,33	10,88%	8,73%
NPL*	4,16%	3,71%	3,63%	2,98%	2,97%	2,90%	3,41%	1,91%	2,14%	2,29%	-	-
LDR*	60,81%	60,11%	60,03%	60,63%	61,89%	61,41%	65,08%	61,58%	62,86%	63,12%	-	-

Sumber: Bank Indonesia
*) dari bank yang berlokasi di Kepri,
**) kepada proyek yang berlokasi di Kepri



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.1 Perkembangan Aset Perbankan



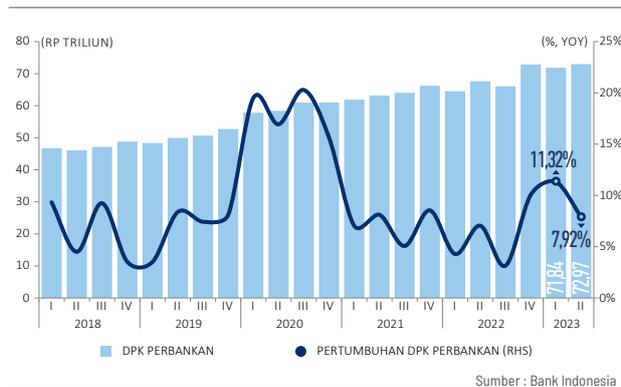
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.2 Pertumbuhan Aset Berdasarkan Kelompok Bank

kelompok Bank Persero dan BPD yang tumbuh masing-masing sebesar 12,73% (yoy) dan 8,94% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya masing-masing sebesar 8,69% (yoy) dan 7,52% (yoy). Sementara itu, aset perbankan dari kelompok Bank Swasta mengalami penurunan sebesar 9,90% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 11,06% (yoy). Kelompok Bank Asing dan Campuran juga mengalami kontraksi sebesar -29,92% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -28,70% (yoy). Secara keseluruhan, struktur aset perbankan di Provinsi Kepri pada triwulan II 2023 tercatat didominasi oleh kelompok Bank Swasta Nasional yakni sebesar 46,79%, diikuti oleh Bank Persero (46,57%), BPD (6,61%) serta Bank Asing dan Campuran (0,03%).

4.1.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan

Pada triwulan II 2023, total DPK di Kepri berjumlah Rp72,97 triliun atau tumbuh 7,92% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 11,32% (yoy). Perlambatan tersebut bersumber dari seluruh jenis DPK yaitu giro, tabungan, dan deposito masing-masing tumbuh sebesar 15,35% (yoy), 7,96% (yoy), dan -3,08% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2023 sebesar 20,24% (yoy), 11,11% (yoy), dan -1,56% (yoy). Struktur DPK pada triwulan I 2023 masih didominasi tabungan dengan pangsa 45,10%, diikuti giro 34,93% dan deposito 19,97%. Penempatan dana yang tinggi pada instrumen simpanan jangka pendek (giro dan tabungan) mengindikasikan masih rendahnya preferensi masyarakat untuk menjadikan simpanan bank sebagai instrumen investasi.

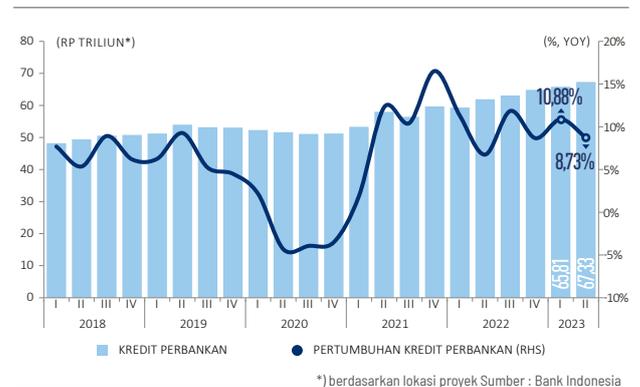


Grafik 4.3 Perkembangan DPK Perbankan

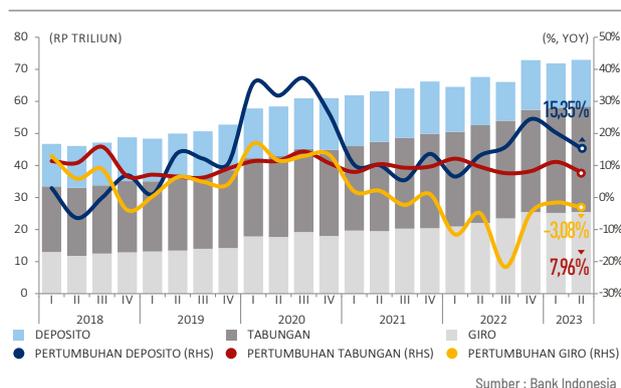
4.1.3 Perkembangan Kredit Perbankan

Jumlah penyaluran kredit (berdasarkan lokasi proyek) di wilayah Provinsi Kepri pada triwulan II 2023 sebesar Rp67,33 triliun atau tumbuh 8,73% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 10,88% (yoy). Perlambatan terutama bersumber dari kredit modal kerja dan kredit konsumsi yang menurun dari 15,34% (yoy) dan 10,28% (yoy) pada triwulan I 2023 menjadi 2,39% (yoy) dan 9,68% (yoy) pada triwulan II 2023. Sementara itu, kredit investasi tumbuh sebesar 11,65% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 7,08% (yoy). Secara keseluruhan, struktur kredit pada triwulan II 2023 masih didominasi oleh kredit modal kerja dengan pangsa sebesar 36,76%, diikuti oleh kredit investasi sebesar 35,73%, dan kredit konsumsi 35,20%.

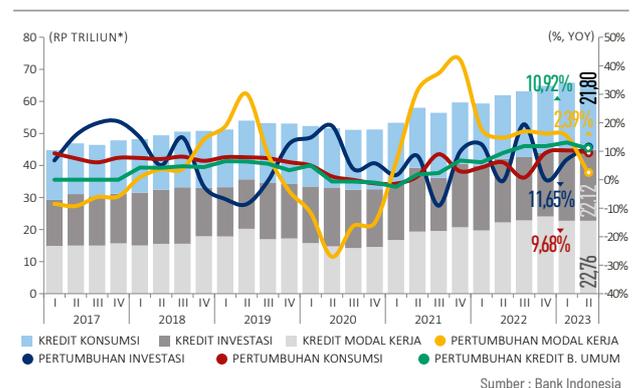
Pada triwulan II 2023, rata-rata tingkat suku bunga kredit perbankan di Provinsi Kepri tercatat 8,90%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 8,92%. Penurunan tersebut sejalan dengan perlambatan penyaluran kredit pada triwulan II 2023. Penurunan suku bunga terjadi pada kredit konsumsi dari 9,73% menjadi 9,56%. Sementara itu, rata-rata tingkat suku bunga kredit investasi dan modal kerja naik dari masing-masing 8,65% dan 8,42%, menjadi masing-masing sebesar 8,68% dan 8,50%. Kenaikan juga terjadi pada suku bunga simpanan (DPK) terutama pada giro dan deposito. Rata-rata suku bunga giro dan deposito pada triwulan berjalan masing-masing tercatat sebesar 1,74% dan 3,68%, naik dari triwulan sebelumnya sebesar 1,55% dan 3,55%.



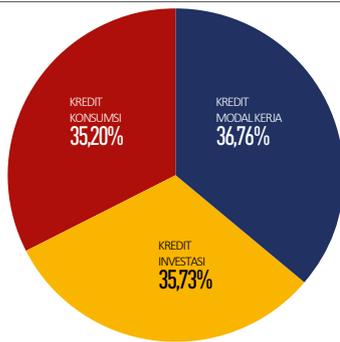
Grafik 4.5 Perkembangan Kredit Perbankan



Grafik 4.4 DPK Perbankan Berdasarkan Jenis Simpanan



Grafik 4.6 Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan

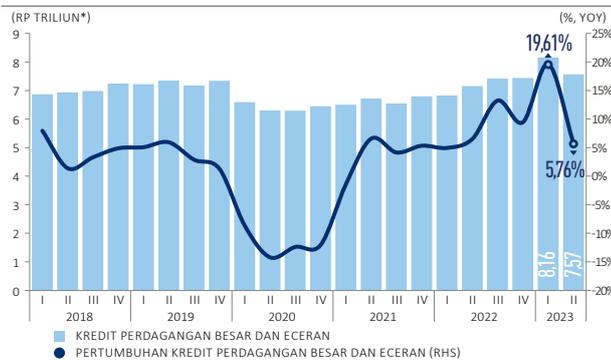


*) berdasarkan lokasi proyek Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.7 Porsi Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan

Secara sektoral, penurunan penyaluran kredit bersumber dari LU Perdagangan Besar dan Eceran dan LU Industri Pengolahan. Kredit pada kedua sektor tersebut pada triwulan II 2023 tumbuh masing-masing sebesar 5,76% (yoy) dan 7,31% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2023.

Secara spasial, penyaluran kredit di wilayah Provinsi Kepri masih terkonsentrasi di Kota Batam dengan jumlah kredit pada triwulan II 2023 sebesar Rp51,48 triliun atau 76,47% dari total kredit di Provinsi Kepri. Kondisi tersebut sejalan dengan peran Kota Batam sebagai pusat ekonomi di Provinsi Kepri yang memiliki pangsa > 60% dalam PDRB Kepri. Penyaluran kredit terbesar kedua berlokasi di Kota Tanjungpinang dengan pangsa 9,42% dari total kredit atau sebesar



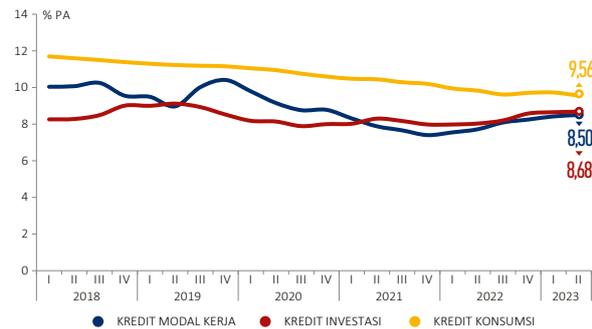
*) berdasarkan lokasi proyek Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.9 Kredit Sektor Perdagangan Besar dan Eceran



*) berdasarkan lokasi proyek Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.10 Kredit Sektor Industri Pengolahan



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.8 Perkembangan Suku Bunga Kredit

Rp6,34 triliun, diikuti Kabupaten Karimun dengan pangsa 4,70% dari total kredit atau sebesar Rp3,17 triliun.

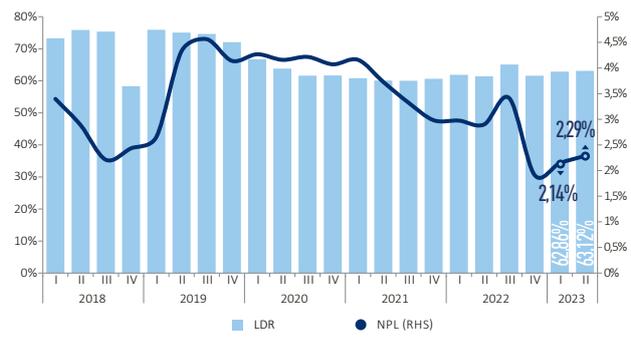
4.1.2 Intermediasi dan Risiko Kredit Perbankan

Kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Kepri yang tercermin dari rasio LDR pada triwulan II 2023 mengalami pengetatan menjadi 63,12%, setelah pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar 62,86%. Peningkatan rasio tersebut didukung oleh penyaluran kredit yang masih terjaga di tengah kondisi perekonomian yang membaik sehingga mendorong peningkatan pendapatan. Penyaluran kredit yang terjaga turut didukung oleh kualitas kredit yang tetap terjaga sebagaimana rasio *NPL gross* yang tercatat stabil sebesar 2,29%.

Tabel 4.2 Penyaluran Kredit (Spasial)

KABUPATEN/KOTA	Triwulan II 2023	
	Kredit (Rp Triliun*)	Porsi (%)
Batam	51,48	76,47%
Tanjungpinang	6,34	9,42%
Karimun	3,17	4,70%
Lingga	0,60	0,89%
Natuna	2,65	3,93%
Bintan	2,79	4,14%
Kep. Anambas	0,30	0,45%
Kepulauan Riau	67,33	100,00%

Sumber: Bank Indonesia
*)Berdasarkan lokasi proyek



*) berdasarkan lokasi proyek Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.11 Intermediasi dan Risiko Kredit Perbankan Kepri

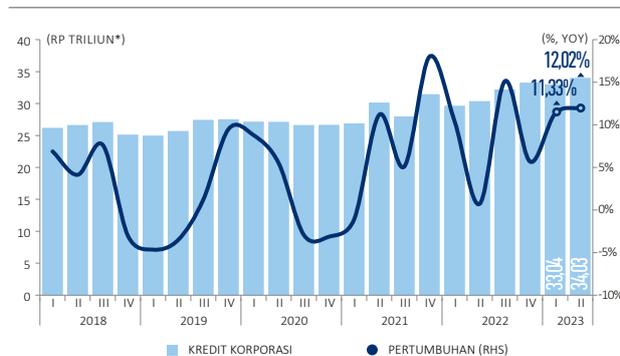
4.2 ASESMEN PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Pembiayaan pada sektor korporasi dan rumah tangga juga tetap terjaga sejalan dengan pemulihan ekonomi di daerah yang terus berlangsung. Momentum tersebut juga didukung oleh kebijakan keterbukaan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang mendorong penurunan suku bunga kredit. Peningkatan kinerja sektor korporasi tersebut kemudian berpengaruh terhadap ketahanan sektor rumah tangga khususnya rumah tangga pekerja pada sektor industri. Di sisi lain, penyaluran kredit UMKM mengalami perbaikan disertai dengan risiko kredit yang tetap terjaga sejalan dengan peningkatan kemampuan bayar pelaku usaha.

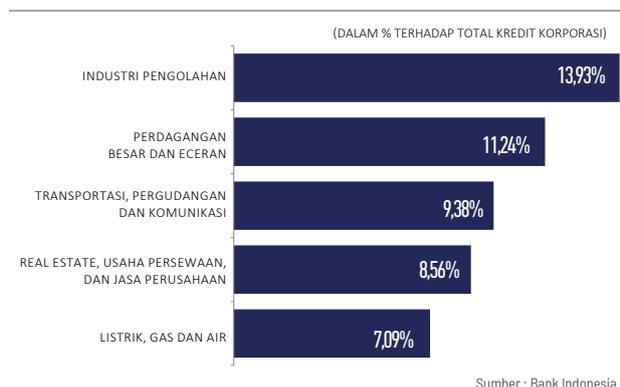
4.2.1 Ketahanan Sektor Korporasi

Kinerja penyaluran kredit ke sektor korporasi mengalami percepatan sejalan dengan perekonomian yang terus mengalami pemulihan. Pada triwulan II 2023, penyaluran kredit korporasi (lokasi proyek) berjumlah Rp34,03 triliun atau tumbuh 12,02% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berjumlah Rp33,04 triliun atau tumbuh 11,33% (yoy).

Pangsa penyaluran kredit ke sektor korporasi didominasi oleh LU Industri Pengolahan dengan pangsa sebesar 13,93% dari total kredit yang disalurkan kepada korporasi berdasarkan lapangan usaha. Pangsa penyaluran kredit selanjutnya diikuti oleh LU Perdagangan



Grafik 4.12 Perkembangan Kredit Korporasi



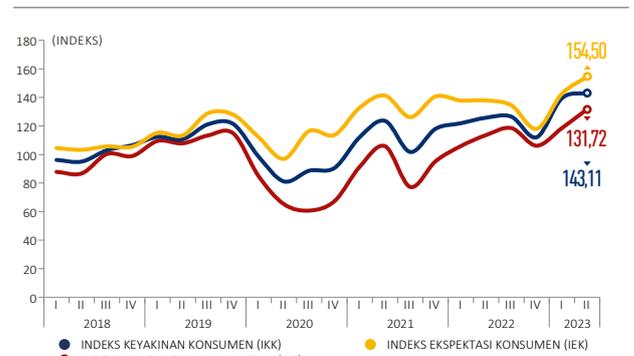
Grafik 4.13 Pangsa Kredit Korporasi (5 LU Terbesar)

Besar dan Eceran (11,24%), LU Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi (9,34%), serta LU Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan (8,56%). Sementara, pangsa LU lainnya pada triwulan I 2023 masih < 8%.

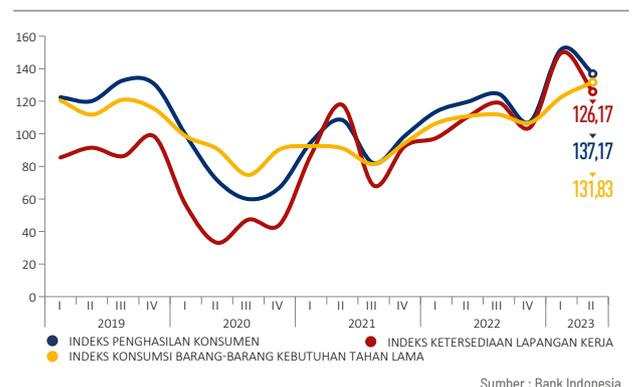
Kualitas penyaluran kredit korporasi masih terjaga, tercermin dari rasio *Non Performing Loan (NPL)* yang masih berada di bawah 5% yakni sebesar 4,06%, menurun dari triwulan sebelumnya sebesar 4,12%. Penurunan NPL kredit korporasi terutama bersumber dari LU Konstruksi serta LU Pertambangan dan Penggalian yang memiliki NPL masing-masing sebesar 9,37% dan 26,76%. Meskipun demikian, penurunan tertahan oleh LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan Besar dan Eceran serta LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang masing-masing tercatat meningkat menjadi sebesar 0,90%, 2,40% dan 6,71%.

4.2.2 Ketahanan Sektor Rumah Tangga

Ketahanan sektor rumah tangga mengalami perlambatan seiring dengan perlambatan penyaluran kredit konsumsi dan tingkat penghasilan rumah tangga. Hal ini tercermin dari Indeks Penghasilan Konsumen yang mengalami penurunan pada triwulan II 2023 sebesar 137,17 dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 152,00 sejalan dengan jumlah hari kerja yang berkurang seiring dengan periode Lebaran dan Hari Raya Idul Fitri. Perlambatan juga terjadi pada Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja yang menunjukkan penurunan pada triwulan II 2023. Namun demikian, hasil Survei Konsumen Bank Indonesia juga menunjukkan tingkat keyakinan konsumen yang masih



Grafik 4.14 Survei Konsumen



Grafik 4.15 Survei Konsumen

terjaga optimis sebesar 143,11 (>100) meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Sejalan dengan perlambatan Indeks Penghasilan Konsumen, penyaluran kredit rumah tangga juga mengalami penurunan. Kredit rumah tangga tumbuh sebesar 9,98% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,33% (yoy). Perlambatan pertumbuhan ini terjadi pada kredit multiguna yang pada triwulan II 2023 tumbuh sebesar 0,89% (yoy), jauh lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 11,87% (yoy). Perlambatan kredit rumah tangga juga turut disebabkan oleh perlambatan kredit konsumsi.

Jumlah DPK milik perseorangan pada triwulan II 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,37% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,39% (yoy). Akselerasi pertumbuhan DPK perseorangan terutama pada deposito yang tumbuh sebesar 2,06% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -2,70% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan DPK perseorangan tertahan pada giro dan tabungan yang mengalami perlambatan masing-masing sebesar 4,74% dan 6,46% (yoy) pada triwulan II 2023, menurun dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,82% dan 6,66% (yoy) pada triwulan I 2023.

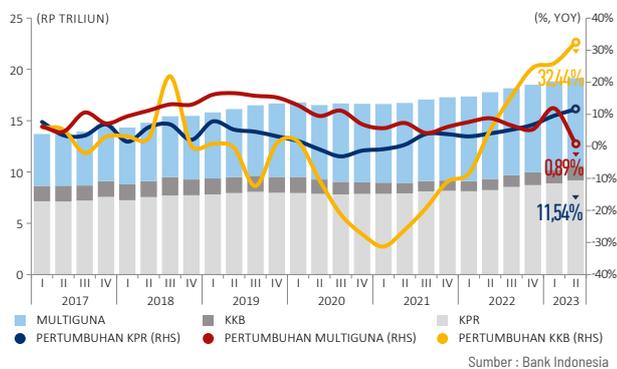
Dengan perkembangan tersebut, struktur DPK perseorangan masih didominasi jenis tabungan dengan pangsa 73,10%, diikuti deposito

22,18% dan giro 4,72%. Tingginya pangsa tabungan terhadap total DPK perseorangan menunjukkan kecenderungan preferensi masyarakat untuk menyimpan dana pada instrumen yang lebih likuid.

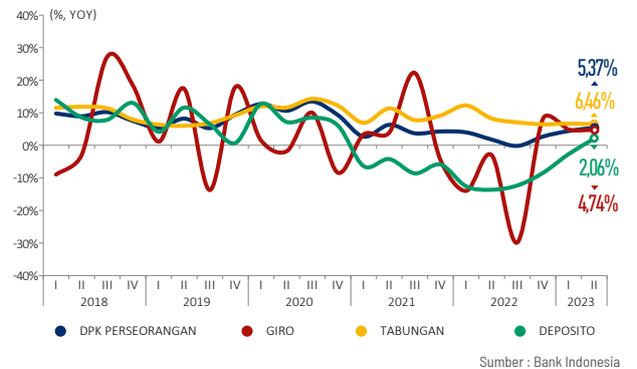
Dari sisi risiko kredit, NPL kredit rumah tangga pada triwulan II 2023 mencatat peningkatan namun masih dibawah threshold 5%. NPL kredit rumah tangga tersebut meningkat menjadi 2,00% dari sebelumnya sebesar 1,78% pada triwulan I 2023. Peningkatan NPL terjadi pada Kredit Pemilikan Rumah dari 2,43% menjadi 2,71%, Kredit Kendaraan Bermotor dari 0,42% menjadi 0,48%, dan Kredit Multiguna dari 1,40% menjadi 1,66%. Meskipun demikian, NPL masih terjaga karena tertahan oleh NPL Kredit Peralatan Rumah Tangga yang menurun dari 0,90% pada triwulan sebelumnya menjadi 0,80%.

4.2.3 Ketahanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

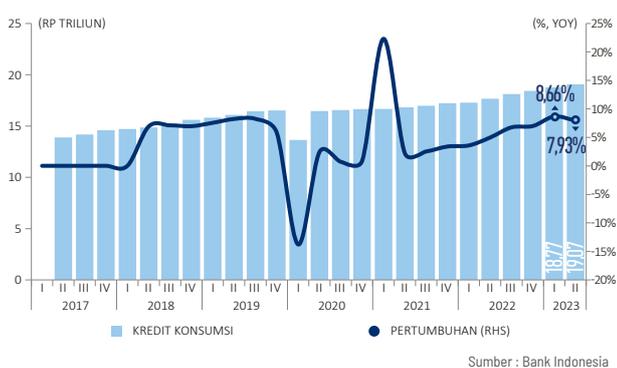
Penyaluran kredit UMKM (lokasi proyek) pada triwulan II 2023 mengalami perlambatan namun risiko kredit tetap terjaga. Penyaluran kredit UMKM pada triwulan II 2023 tumbuh positif sebesar 8,89% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,76% (yoy). Selain itu, risiko kredit mengalami peningkatan, tercermin dari kenaikan rasio NPL kredit UMKM sebesar 3,46% menjadi 3,63%. Namun demikian, rasio NPL kredit UMKM masih terjaga di bawah 5%.



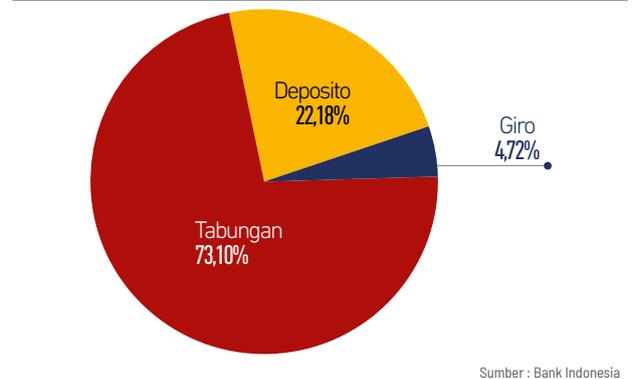
Grafik 4.16 Kredit Rumah Tangga



Grafik 4.18 DPK Perseorangan



Grafik 4.17 Kredit Konsumsi



Grafik 4.19 Pangsa DPK Perseorangan

Tabel 4.3 Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga

KATEGORI	2021				2022				2023	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Kredit Rumah Tangga	2,03%	2,02%	2,03%	1,84%	2,10%	1,98%	1,87%	1,61%	1,78%	2,00%
Kredit Pemilikan Rumah	3,07%	3,00%	2,92%	2,63%	2,85%	2,83%	2,57%	2,28%	2,43%	2,71%
Kredit Kendaraan Bermotor	1,42%	1,91%	1,68%	1,03%	0,88%	0,61%	0,55%	0,45%	0,42%	0,48%
Kredit Peralatan Rumah Tangga	2,56%	2,54%	2,06%	2,21%	2,89%	1,93%	1,12%	0,79%	0,90%	0,80%
Kredit Multiguna	1,08%	1,09%	1,19%	1,17%	1,39%	1,40%	1,42%	1,26%	1,40%	1,66%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	1,78%	1,79%	1,91%	1,80%	3,39%	1,60%	1,67%	1,22%	1,73%	1,70%

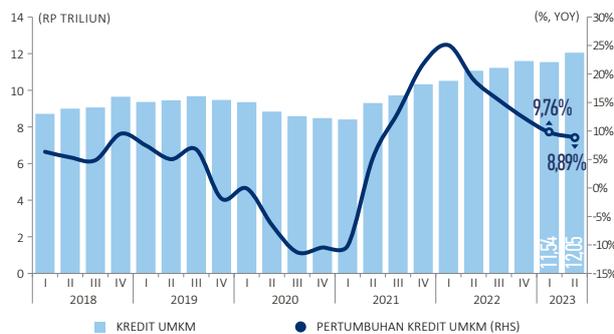
Sumber: Bank Indonesia

Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit tercatat sebesar 17,90%, meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 17,53%. Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit di Provinsi Kepri tersebut semakin mendekati 20% sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan Lapangan Usaha, penyaluran kredit UMKM masih terkonsentrasi pada LU Perdagangan Besar & Eceran yakni sebesar 45,62%, diikuti LU Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi sebesar 10,61% dan LU Industri Pengolahan yang memiliki pangsa sebesar 8,66%. Adapun pangsa penyaluran kredit UMKM pada LU lainnya masing-masing masih < 8%.

Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM). Pembiayaan inklusif merupakan penyediaan dana yang diberikan bank untuk UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR) dalam Rupiah dan valuta asing. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau juga terus mendorong UMKM agar dapat terus bertumbuh dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi digital antara lain melalui dukungan dalam penyelenggaraan pameran, kurasi produk, pelatihan, dan *business matching* terhadap para pelaku usaha UMKM yang dilakukan secara keberkelanjutan.

Perlambatan kredit UMKM pada triwulan II 2023 bersumber dari LU Perdagangan Besar dan Eceran yang melambat sebesar 2,93% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh melambat sebesar 7,86% (yoy). Selain itu, LU Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan juga tercatat melambat sebesar 10,52% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 19,95%.

Dalam rangka mendukung penguatan UMKM di Provinsi Kepri, Pemerintah berperan dalam penyaluran pembiayaan mikro dan ultra mikro oleh perbankan, melalui subsidi bunga pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Bank Indonesia turut berperan antara lain dengan mendorong pengembangan UMKM melalui kebijakan kewajiban bank untuk memenuhi secara bertahap



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.20 Perkembangan Kredit UMKM



BOKS 2

Flagship Event Gebyar Melayu Pesisir Untuk Peningkatan Promosi Produk UMKM Unggulan Kepulauan Riau

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, Bank Indonesia melaksanakan program pengembangan UMKM dengan tujuan meningkatkan kualitas dan daya saing usaha. Salah satu program pengembangan UMKM yang dijalankan adalah perluasan pasar melalui promosi perdagangan dalam bentuk *showcase* produk. Pada tahun 2023, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (KPwBI Kepri) menyelenggarakan berbagai kegiatan *showcase* produk UMKM dalam rangkaian Gebyar Melayu Pesisir (GMP). GMP merupakan *flagship event* pengembangan UMKM yang diinisiasi oleh KPwBI Kepri sejak tahun 2021 dan mendapatkan respon yang baik dari pelaku UMKM, pemerintah daerah (Pemda), maupun masyarakat.

Berbeda dari penyelenggaraan di tahun-tahun sebelumnya yang terfokus di Kota Batam, cakupan GMP tahun 2023 diperluas di seluruh Kabupaten/Kota se-Kepri. Sejak awal tahun 2023, telah diselenggarakan *Road to GMP* di seluruh Kabupaten/Kota yang bersinergi dengan *flagship event* masing-masing Pemda. *Road to GMP* diawali pada Bulan Mei 2023 di Kabupaten Karimun bersinergi dengan penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Quran dan Hadits (STQH) Tingkat Provinsi Kepri yang dihadiri oleh lebih dari 70 ribu masyarakat Karimun. Keberhasilan pelaksanaan *Road to GMP* di Kabupaten Karimun menjadi awal yang baik bagi GMP tahun 2023 dan dilanjutkan di Kabupaten/Kota lainnya.

Tidak hanya melalui sinergi *event* dengan Pemda, *Road to GMP* juga diselenggarakan dalam berbagai kesempatan lainnya. Salah satunya adalah *showcasing* produk UMKM unggulan Kepri dalam rangka kehadiran Wakil Presiden RI pada saat pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kepri di Lagoi, Bintan. Selain itu, bekerja sama dengan PT Angkasa Pura dan Pemprov Kepri, diselenggarakan *showcasing* produk UMKM unggulan Kepri di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta selama bulan Juli. Beberapa pejabat negara juga turut hadir, yaitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada *Road to GMP* Kota Batam, Batam Jazz and Fashion (Bajafash), serta Menteri Dalam Negeri pada *Road to GMP* dalam rangka Peringatan HUT Kemerdekaan RI di Kabupaten Natuna.

Rangkaian *Road to GMP* berdampak positif bagi promosi produk-produk UMKM. Sampai dengan pertengahan bulan Agustus 2023, rangkaian *Road to GMP* telah dikunjungi lebih dari 100 ribu orang dan mencatatkan penjualan produk UMKM dalam *showcasing* mencapai Rp1,28 miliar.

Di samping *showcasing*, *Road to GMP* juga dilengkapi dengan kurasi produk UMKM untuk menemukan produk-produk potensial dari seluruh Kabupaten/Kota. Selain itu, bekerja sama dengan instansi terkait, dibuka layanan dan konsultasi perizinan meliputi izin usaha, sertifikasi halal, hingga izin edar BPOM.

Rangkaian GMP akan ditutup dengan perayaan puncak pada bulan September 2023. *Event* puncak GMP tersebut disinergikan dengan forum internasional Indonesia Malaysia Thailand *Growth Triangle* (IMT-GT). Dalam puncak GMP nantinya, akan diselenggarakan *showcasing* produk UMKM unggulan dari Kepri, provinsi se-Sumatera, serta *tenant* dari Malaysia dan Thailand. Dalam *showcasing* tersebut akan dilayani pembayaran secara non-tunai terutama melalui kanal pembayaran QR antar negara (QRIS *cross border*). Selain itu, akan diselenggarakan penampilan seni/budaya dari Kabupaten/Kota se-Kepri serta delegasi IMT-GT dari Sumatera, Malaysia, dan Thailand. Puncak GMP akan ditutup dengan jalan sehat dan pemecahan rekor MURI peserta makan mie tarempa terbanyak se-Indonesia.



Gambar B2.1 Kunjungan Gubernur Kepri dalam Showcasing di Kabupaten Karimun



Gambar B2.2 Kurasi Produk UMKM Unggulan



Gambar B2.3 Pelayanan Perizinan



Gambar B2.4 Edukasi Digitalisasi Pembayaran (QRIS)



Gambar B2.5 Kunjungan Menparekraf dalam Showcasing



Gambar B2.6 Wakil Presiden mengunjungi Booth UMKM



Gambar B2.7 Pembukaan Gerai Nusantara di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta



Gambar B2.8 Bupati Bintan Bertransaksi menggunakan QRIS di Booth Bank Indonesia

BAB V

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Inflow Uang Kartal



Tw II
2023

Rp 1,56T



Tw I
2023

Rp 1,69T

Outflow Uang Kartal



Tw II
2023

Rp 3,12T



Tw I
2023

Rp 1,67T

Net Flow Uang Kartal



Tw II
2023

Rp 1,56T
Net Inflow



Tw I
2023

Rp 14,6M
Net Inflow

Transaksi RTGS



Tw II
2023

Rp 37,47T
-5,90% (yoy)



Tw I
2023

Rp 38,32T
6,37% (yoy)

Transaksi SKNBI



Tw II
2023

Rp 2,54T
2,26% (yoy)



Tw I
2023

Rp 2,75T
9,78% (yoy)

Sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian, aktivitas transaksi pembayaran tunai menggunakan Rupiah dan transaksi Uang Kertas Asing di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengalami peningkatan pada triwulan II 2023. Selain itu, transaksi pembayaran nontunai turut mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran digital khususnya *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).



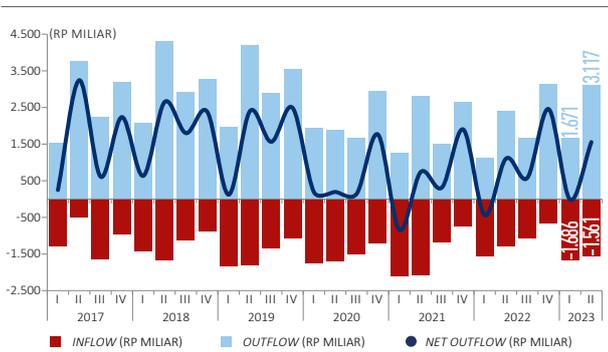
Aktivitas transaksi pembayaran tunai pada triwulan II 2023 mencatatkan *net outflow* sebesar Rp1,56 triliun, berbeda arah dibandingkan triwulan I 2023 yang tercatat *net inflow* sebesar Rp14,63 miliar. Perkembangan aliran uang tersebut sejalan dengan pola musiman kebutuhan uang tunai yang meningkat selama periode HBKN Idul Fitri. Selain itu, aktivitas pembayaran nontunai secara tahunan meningkat. Hal ini tercermin dari peningkatan transaksi QRIS dan Uang Elektronik (UE) yang didukung oleh meningkatnya preferensi dan akseptasi masyarakat terhadap penggunaan transaksi nontunai.

5.1 TRANSAKSI PEMBAYARAN TUNAI

5.1.1 Aliran Uang Kartal Masuk/Keluar (*Inflow*¹/*Outflow*²)

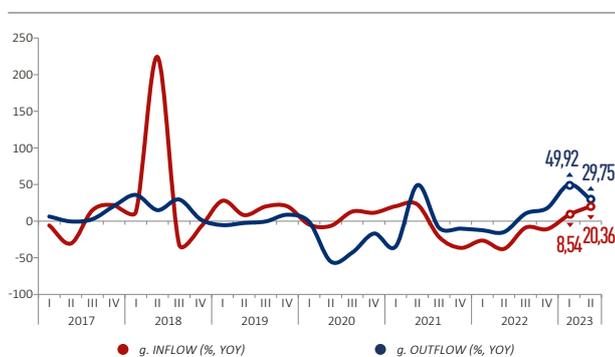
Pada triwulan II 2023, pergerakan aliran uang tunai tercatat mengalami *net outflow* sebesar Rp1,56 triliun. Jumlah tersebut berbalik arah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai *net inflow* sebesar Rp14,63 miliar. Hal ini sejalan dengan pola naiknya permintaan uang tunai selama periode HBKN Idul Fitri.

Jumlah aliran uang kartal yang keluar (*outflow*) pada triwulan II 2023 berjumlah Rp3,12 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2023 sebesar Rp1,67 triliun. Pada saat yang sama, aliran uang kartal yang



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.1 Perkembangan Inflow dan Outflow Kepri



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.2 Perkembangan Pertumbuhan Inflow dan Outflow

- ¹ *Inflow* : aliran uang masuk ke Bank Indonesia melalui setoran bank
- ² *Outflow* : aliran uang keluar dari Bank Indonesia melalui penarikan bank

masuk (*inflow*) tercatat sebesar Rp1,56 triliun, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp1,69 triliun. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan uang tunai di Provinsi Kepri, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau terus menyelenggarakan kegiatan kas titipan³ yang tersebar di tiga tempat yakni Kota Tanjungpinang, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Karimun. Selama periode Januari – Juni 2023 kas titipan telah melakukan pengiriman sebanyak empat kali. Selain itu, telah dilaksanakan kegiatan kas keliling dalam kota dan kas keliling luar kota untuk daerah 3T (terdepan, terluar dan terpencil) untuk menjamin tersedianya Rupiah yang layak edar bagi seluruh masyarakat Kepri.

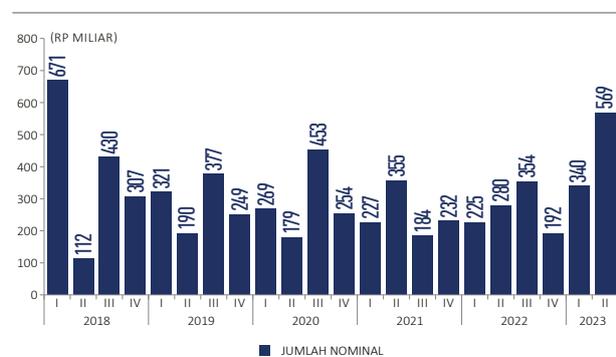
5.1.2 Penyediaan Uang Kartal Layak Edar

Bank Indonesia berperan dalam penyediaan uang kartal layak edar yang melibatkan beberapa aspek penting, mulai dari penerbitan uang yang berkualitas, pengaturan jumlah uang beredar, edukasi masyarakat, hingga pemeliharaan kualitas uang layak edar. Dalam rangka memelihara kualitas uang layak edar di masyarakat, Bank Indonesia menjalankan *Clean Money Policy* dengan melakukan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) yang berasal dari penukaran oleh masyarakat maupun setoran perbankan.

Jumlah uang kartal tidak layak edar yang dimusnahkan pada triwulan II 2023 tercatat sebanyak Rp569 miliar, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berjumlah Rp340 miliar. Peningkatan jumlah pemusnahan UTLE tersebut tidak terlepas dari peningkatan arus *inflow* pasca HBKN Idul Fitri. Pemusnahan uang kartal tidak layak edar ini meliputi uang yang mengalami kerusakan berat maupun telah mencapai masa edarnya.

5.1.3 Upaya Menekan Peredaran Uang Palsu (UPAL)

Dalam rangka meningkatkan kecintaan, pemahaman, dan kebanggaan terhadap Rupiah maka sejumlah kegiatan edukasi Cinta, Bangga dan Paham (CBP) Rupiah terus dilakukan ke masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan ciri keaslian uang Rupiah, menumbuhkan



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.3 Perkembangan Pemusnahan UTLE

- ³ Kas Titipan merupakan salah satu upaya mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia terkait pagedaran uang sekaligus memfasilitasi perbankan dalam hal penyetoran dan penarikan uang tunai dikarenakan keterbatasan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah. Pelaksana Kas Titipan yaitu Bank Mandiri Tanjungpinang, Bank Riau Kepri Natuna dan BNI Tanjung Balai Karimun.

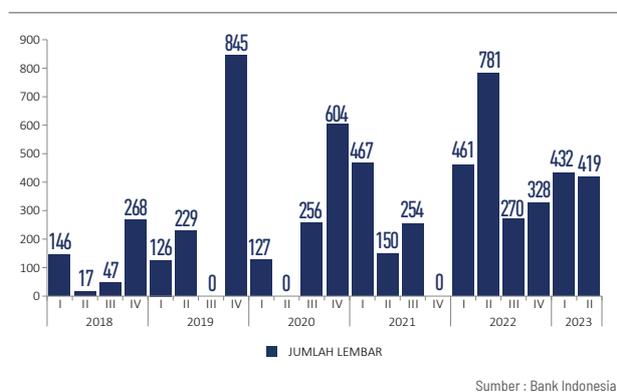
kecintaan pada Rupiah dan membangkitkan kebanggaan menggunakan Rupiah sebagai salah satu simbol kedaulatan negara. Selama triwulan II 2023, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan 13 kali edukasi CBP Rupiah.

Melalui edukasi CBP Rupiah tersebut diharapkan pemahaman masyarakat dalam mengenali ciri keaslian uang Rupiah semakin meningkat dan dapat menekan peredaran uang palsu. Selama triwulan II 2023 terdapat 419 lembar temuan uang palsu di wilayah Kepri, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebanyak 432 lembar uang palsu.

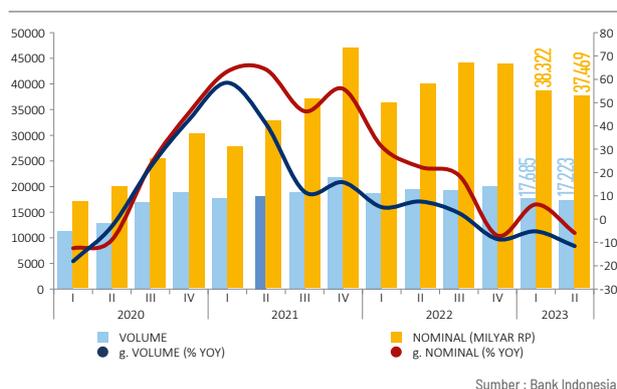
5.2 TRANSAKSI PEMBAYARAN NONTUNAI

5.2.1 Transaksi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (RTGS)

Nominal transaksi sistem *Real-Time Gross Settlement* (RTGS) triwulan II 2023 menurun dibandingkan triwulan I 2023. Transaksi BI-RTGS di Provinsi Kepri pada triwulan II 2023 tercatat mencapai Rp37,47 triliun atau terkontraksi sebesar 5,90% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,37% (yoy). Sejalan dengan penurunan nominal transaksi tersebut, volume transaksi juga mengalami penurunan. Tren penurunan transaksi RTGS sejalan dengan tersedianya alternatif layanan transfer dana BI-FAST.



Grafik 5.4 Perkembangan Temuan Uang Palsu



Grafik 5.5 Perkembangan RTGS di Provinsi Kepri

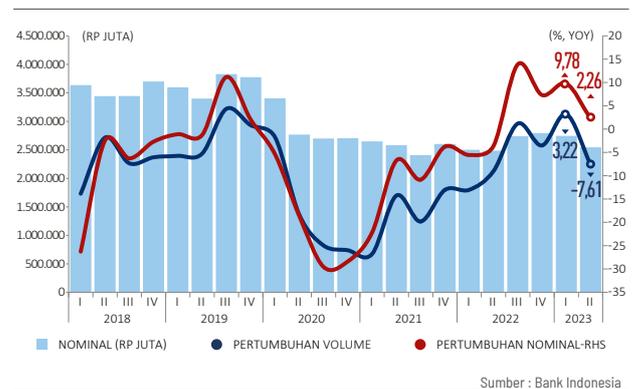
5.2.2 Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Pada saat yang sama, pertumbuhan jumlah transaksi kliring selama triwulan II 2023 mengalami penurunan dari 9,78% (yoy) atau Rp2,75 triliun menjadi 2,26% (yoy) atau Rp2,54 triliun. Sementara itu, jumlah warkat SKNBI yang dipertukarkan menurun dari 67.233 lembar menjadi 60.104 lembar. Penurunan transaksi pertukaran warkat SKNBI salah satunya disebabkan oleh hadirnya layanan BI-Fast Bank Indonesia yang menawarkan biaya lebih murah dan layanan 24/7. BI-FAST merupakan infrastruktur sistem pembayaran yang disediakan oleh Bank Indonesia yang dapat diakses melalui aplikasi yang disediakan industri sistem pembayaran dalam memfasilitasi transaksi pembayaran ritel bagi masyarakat. BI FAST merupakan pembayaran ritel nasional yang akan menggantikan SKNBI. BI FAST memiliki perbedaan dari segi: 1) nominal transaksi maksimal sebesar Rp250 juta per transaksi; 2) waktu layanan yang tersedia setiap saat; 3) kanal pembayaran tersedia lebih lengkap antara lain menggunakan *counter*, kanal *mobile / internet*, QR, ATM, EDC; dan 4) melayani transaksi transfer kredit, transfer debit, serta akan dikembangkan untuk melayani transaksi dengan instrumen kartu ATM/debet, kartu kredit, dan uang elektronik. Secara perlahan, layanan transfer kredit dan transfer debit SKNBI akan dialihkan ke BI FAST, sementara itu ke depan SKNBI difokuskan untuk memproses transaksi cek dan bilyet giro (*paper based*).

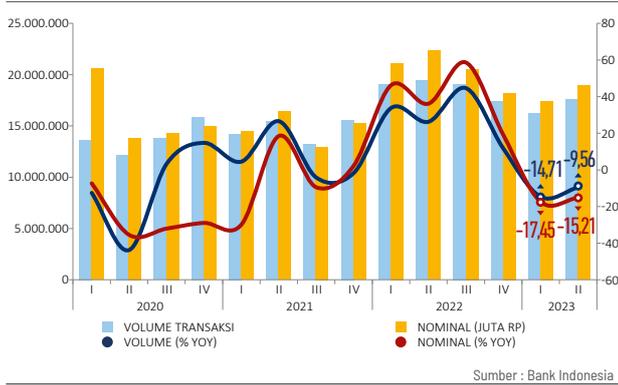
5.2.3 Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (UE)

Transaksi menggunakan kartu debit pada triwulan II 2023 mengalami akselerasi dari sisi nilai transaksi maupun sisi volume transaksi seiring dengan preferensi masyarakat dalam menggunakan QRIS untuk pembayaran transaksi nominal kecil. Nilai transaksi kartu debit terkontraksi sebesar 15,21% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 17,45%. Sementara itu, volume transaksi terkontraksi sebesar 9,56% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 14,71% (yoy).

Di sisi lain, volume menggunakan kartu kredit pada triwulan II 2023 tumbuh sebesar 31,19% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2023 yang tumbuh sebesar 29,99% (yoy). Selain itu, nominal transaksi meningkat dari 684.341 transaksi menjadi 723.347 transaksi.



Grafik 5.6 Perkembangan Transaksi Kliring di Provinsi Kepri

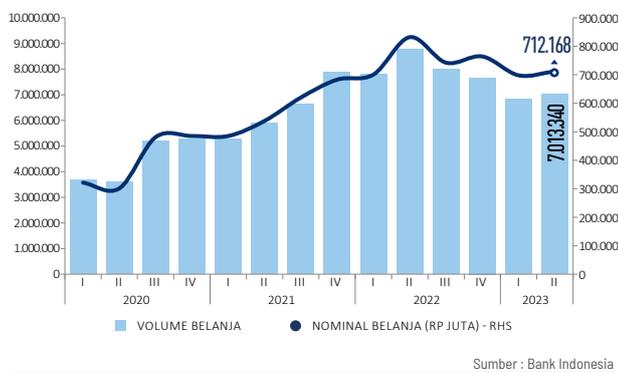


Grafik 5.7 Perkembangan Transaksi Kartu Debit

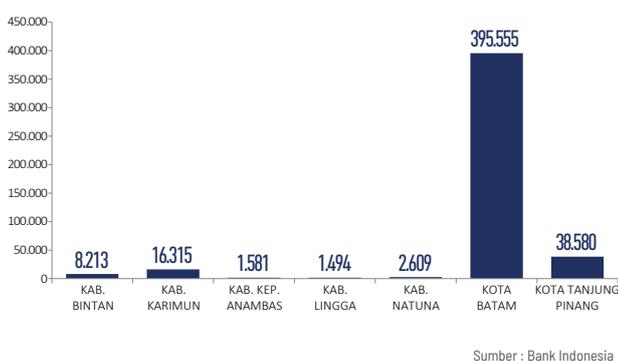
Jumlah transaksi menggunakan UE di wilayah Kepri pada triwulan II 2023 tercatat Rp712,17 miliar, lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2023 sebesar Rp698,01 miliar. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan peningkatan pengeluaran masyarakat selama periode HBKN Idul Fitri. Sebagai upaya untuk meningkatkan transaksi menggunakan UE, Bank Indonesia terus mendorong penggunaan transaksi nontunai khususnya QRIS.

5.2.4 Perkembangan QRIS

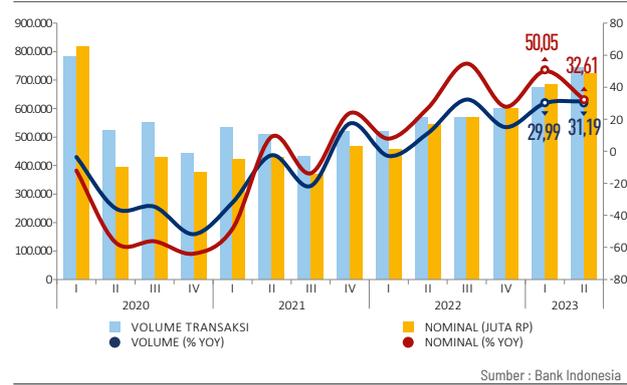
Sampai dengan akhir triwulan II 2023, jumlah *merchant* QRIS di Provinsi Kepri telah mencapai 464.347 *merchant*, tumbuh 0,25% (mtm) atau 6,08% (ytd), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya



Grafik 5.9 Perkembangan Transaksi UE di Provinsi Kepri

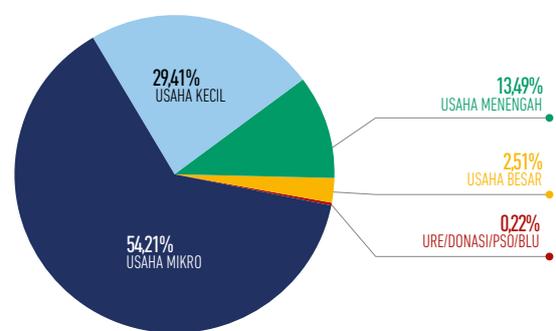


Grafik 5.10 Perkembangan QRIS berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Kepri

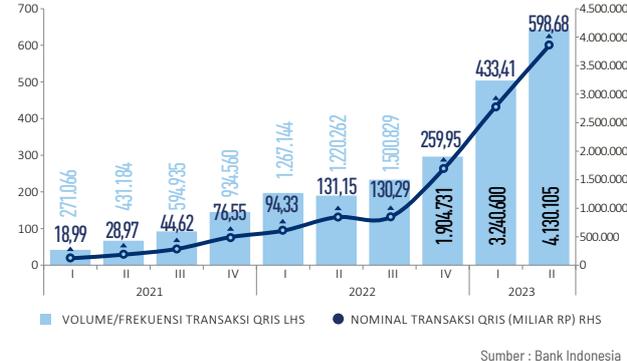


Grafik 5.8 Perkembangan Transaksi Kartu Kredit

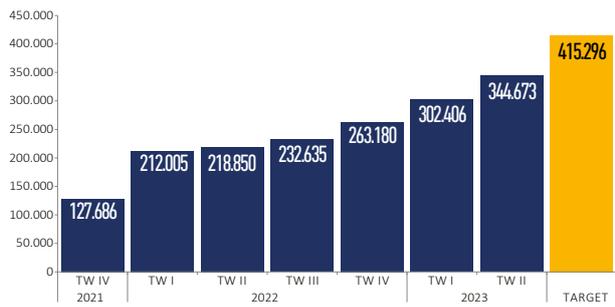
sebanyak 448.833 *merchant* yang tersebar di sekolah/universitas, pusat perbelanjaan/pasar, pusat kuliner, dan jasa transportasi umum. Jumlah *merchant* QRIS di Provinsi Kepri didominasi kategori Usaha Mikro sebesar 54,21% atau 251.722 *merchant*, diikuti oleh Usaha Kecil sebesar 29,41% atau 136.557 *merchant*, serta Usaha Menengah, Usaha Besar, dan URE/Donasi/Usaha yang masing-masing tercatat sebesar 13,49%, 2,65%, dan 0,22%. Volume transaksi QRIS di Provinsi Kepri terus mengalami pertumbuhan hingga Juni 2023 tercatat sebanyak 4.130.105 transaksi dengan nilai Rp598,68 miliar. Jumlah pengguna QRIS juga terus tumbuh positif pada triwulan II 2023 mencapai 344.673 pengguna atau lebih tinggi dari triwulan I 2023 yang mencapai 302.406 pengguna.



Grafik 5.11 Perkembangan Merchant QRIS berdasarkan Kelompok Usaha



Grafik 5.12 Perkembangan Volume Transaksi QRIS di Provinsi Kepri



Sumber : Bank Indonesia (data diolah)

Grafik 5.13 Perkembangan Jumlah Pengguna QRIS di Provinsi Kepri

5.2.5 Intensifikasi Sistem Pembayaran Nontunai

Upaya perluasan penggunaan transaksi digital (QRIS) terus dilakukan pada berbagai sektor dan segmen pengguna. Sebagai upaya mendorong akselerasi implementasi QRIS di Kepri, beberapa strategi yang dilakukan antara lain: (1) Sinergi dan kolaborasi bersama Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan *stakeholders* terkait; (2) Edukasi/sosialisasi, *on boarding*, *showcasing*, dan *QRIS Experience* melalui berbagai kegiatan seperti (a) *QRIS Goes to School/Campus*, (b) Kolaborasi pada kegiatan/ *event* strategis di Kepri, dan (c) Sinergi *event* strategis BI; (3) Sinergi dan kolaborasi bersama media; (4) Mendorong penggunaan *QRIS Cross Border* utamanya dengan Malaysia melalui publikasi, sosialisasi, dan edukasi. Upaya perluasan implementasi QRIS yang dilaksanakan selama triwulan II 2023 antara lain:

- Rapat koordinasi sebagai wujud sinergi dan komitmen bersama dalam rangka mendorong akselerasi QRIS diantaranya: (1) Rakor dengan seluruh PJP yang diperdalam dengan *bilateral meeting* bersama PJP Besar; (2) Rakor lintas agama untuk mendorong implementasi QRIS di tempat ibadah; (2) Rakor bersama OPD untuk mendorong implementasi QRIS pada pembayaran pajak dan retribusi daerah; (3) Rakor bersama Pelindo dan ASDP untuk mendorong implementasi QRIS pada sektor transportasi.
- Sinergi dan kolaborasi bersama media juga senantiasa dilakukan untuk memperkuat komunikasi kebijakan antara lain: penyampaian terkait manfaat, keamanan transaksi dan metode pembayaran QRIS yang CeMuMuAH, penyampaian *key message* dari DKom dan DKSP terkait penyalahgunaan QRIS di rumah ibadah dalam rangka mencegah potensi kejadian serupa di Kepri, dan terkait *QRIS Cross Border*.
- Sinergi pada *event* strategis di Bank Indonesia diantaranya: Serambi Rupiah, Program Rabbani Ramadhan, Ekspedisi Rupiah Berdaulat, *Road To GMP*, dan Kegiatan Donor Darah yang dilaksanakan di Kepri.

5.2.6 Pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) terus dilakukan dalam rangka perluasan *cashless society* dan keuangan inklusif dengan menyediakan saluran pembiayaan nontunai dalam pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah. Implementasi ETPD

sepanjang tahun 2022 dan 2023 terus mengalami peningkatan khususnya di wilayah Kepri. Hasil dari pengisian Indeks ETPD Semester I 2023 menunjukkan seluruh wilayah di Provinsi Kepri telah mencapai tahap ETPD Digital. Hal tersebut sejalan dengan penggunaan kanal digital (QRIS dan non QRIS) untuk pendapatan pajak dan retribusi yang semakin meningkat, namun masih dapat terus didorong. Potensi peningkatan realisasi melalui kanal digital cukup tinggi pada pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan mineral bukan logam serta retribusi pelayanan kesehatan dan parkir tepi jalan umum seiring dengan besarnya pangsa terhadap total pajak dan retribusi daerah.

Adapun strategi yang dilakukan oleh Bank Indonesia Kepri dalam mendorong implementasi ETPD, diantaranya: perluasan kanal pembayaran digital dalam transaksi Pemerintah Daerah, peningkatan transaksi non-tunai melalui QRIS dan Teller untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah, penguatan aspek lingkungan strategis, khususnya pelaksanaan sosialisasi oleh Pemerintah Daerah, serta koordinasi dan sinergi bersama Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Selain itu, beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mendorong implementasi ETPD di Kepri sepanjang triwulan II 2023: *Coaching Clinic* dan Pendampingan Pengisian *Championship TP2DD*, *Capacity Building* dan Studi Banding TP2DD Kepri di Bali, dan *Coaching Clinic* dan Pendampingan Pengisian IETPD

5.2.7 Bantuan Sosial Nontunai

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Kepri mendukung akselerasi elektronifikasi transaksi pemerintah melalui program penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) nontunai. Program Bansos yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) antara lain adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako dan Program Kartu Pra Kerja. Sampai dengan triwulan II 2023, penyaluran bantuan PKH di Provinsi Kepri pada tahap 2 yakni pada periode April s.d. Juni 2023 disalurkan kepada 45.273 KPM sebesar Rp33,47 miliar dengan realisasi penyerapan sebesar 96,34%.

Penanggulangan kemiskinan juga dilakukan melalui Program Sembako yang merupakan program Bansos pangan dari Kementerian Sosial sebagai transformasi dari Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Berdasarkan data hingga Juni 2023, jumlah penerima Program Sembako di Kepri tercatat sebanyak 145.903 KPM dengan total bantuan sebesar Rp29,18 miliar atau terserap sebesar 83,04%.

5.3 TRANSAKSI KUPVA BB DAN PJP LR

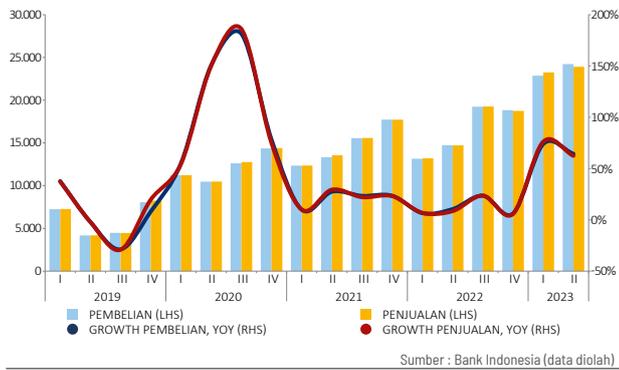
Dalam rangka menjaga kelancaran transaksi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) dan Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR) di Provinsi Kepri, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan *monitoring* perizinan dan pengawasan terhadap operasional 114 KUPVA Bukan Bank dan 59 PJP Layanan Remitansi yang berada di Provinsi Kepri hingga triwulan II 2023.

Tabel 5.1 Penyaluran PKH Tahap 2 di Wilayah Provinsi Kepri

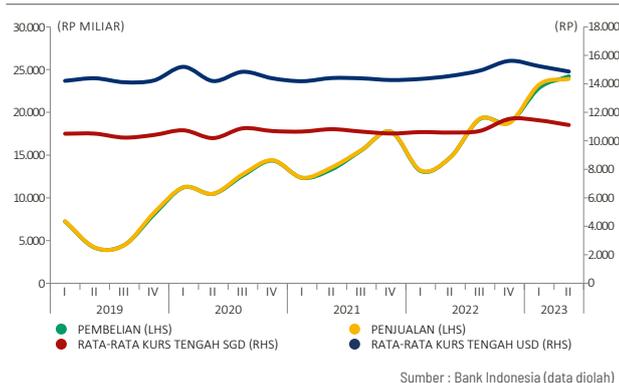
KAB/KOTA	Penyalur	SP2D (Jml KPM)	SP2D (Nominal)	Penyaluran (Jml KPM)	Penyaluran (Nominal)	% Penyaluran (Jml KPM)	% Penyaluran (Nominal)	Penyerapan (Jml KPM)	% Penyerapan (Jml KPM)	Mekanisme
BINTAN	BRI	3.811	Rp 2.885.275.000	3.811	Rp 2.885.275.000	100,00%	100,00%	3.776	99,08%	NON TUNAI
BINTAN	POS	249	Rp 171.600.000	241	Rp 165.600.000	96,79%	96,50%	241	100,00%	TUNAI
KARIMUN	BNI	6.664	Rp 5.112.800.000	6.664	Rp 5.112.800.000	100,00%	100,00%	6.411	96,20%	NON TUNAI
KARIMUN	POS	109	Rp 75.775.000	90	Rp 64.250.000	82,57%	84,79%	90	100,00%	TUNAI
KEPULAUAN ANAMBAS	BRI	925	Rp 708.287.000	925	Rp 708.287.000	100,00%	100,00%	827	89,41%	NON TUNAI
KEPULAUAN ANAMBAS	POS	121	Rp 83.075.000	104	Rp 72.125.000	85,95%	86,82%	104	100,00%	TUNAI
KOTA BATAM	BRI	20.839	Rp15.281.450.000	20.838	Rp 15.280.350.000	100,00%	99,99%	19.793	94,99%	NON TUNAI
KOTA BATAM	POS	943	Rp 685.775.000	842	Rp 615.175.000	89,29%	89,71%	842	100,00%	TUNAI
KOTA TANJUNG PINANG	BNI	4.610	Rp 3.401.250.000	4.610	Rp 3.401.250.000	100,00%	100,00%	4.433	96,16%	NON TUNAI
KOTA TANJUNG PINANG	POS	178	Rp 138.075.000	170	Rp 131.625.000	95,51%	95,33%	170	100,00%	TUNAI
LINGGA	BRI	4.030	Rp 2.862.575.000	4.030	Rp 2.862.575.000	100,00%	100,00%	3.981	98,78%	NON TUNAI
LINGGA	POS	733	Rp 513.375.000	724	Rp 506.400.000	98,77%	98,64%	724	100,00%	TUNAI
NATUNA	POS	2.325	Rp 1.732.950.000	2.224	Rp 1.667.025.000	95,66%	96,20%	2.224	100,00%	TUNAI
NATUNA	POS	2.216	Rp 1.655.450.000	2.190	Rp 1.637.150.000	98,83%	98,89%	2.190	100,00%	TUNAI

5.3.1 Perkembangan Transaksi KUPVA Bukan Bank (KUPVA BB)

Transaksi jual beli valas melalui KUPVA BB selama triwulan II 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dengan jumlah transaksi pembelian Uang Kertas Asing (UKA) tercatat sebesar Rp24,22 triliun atau tumbuh 64,41% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp22,86 triliun. Di sisi lain, total transaksi penjualan UKA pada triwulan II 2023 berjumlah Rp23,90 triliun atau tumbuh 62,41% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp23,24 triliun. Adapun mata uang yang mendominasi transaksi penjualan valuta asing pada triwulan II 2023 yakni Dolar Singapura (72,32%), Dolar Amerika Serikat (14,74%), Renminbi Tiongkok (7,92%), dan Ringgit Malaysia (2,85%).



Grafik 5.14 Perkembangan Transaksi KUPVA

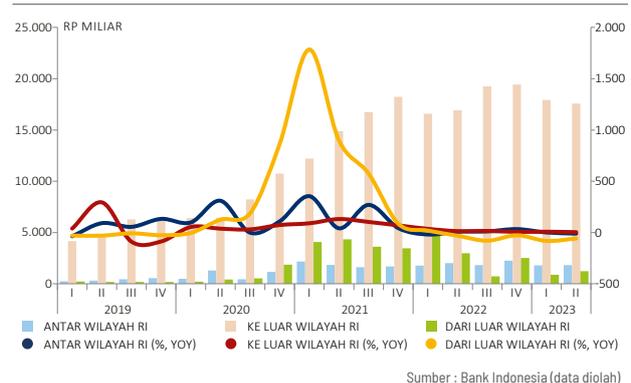


Grafik 5.15 Pergerakan Transaksi KUPVA & Nilai Tukar Rupiah

5.3.2 Perkembangan Transaksi Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR)

Transaksi transfer dana melalui PJP LR di wilayah Provinsi Kepri pada triwulan II 2023 tercatat terkontraksi sebesar 5,82% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 11,22% (yoy). Penurunan transaksi terutama terjadi pada jenis transaksi antar wilayah RI dan ke luar wilayah RI sejalan dengan membaiknya mobilitas masyarakat seiring dengan mereda pandemi Covid-19.

Berdasarkan jenis transaksinya, komposisi transaksi pada PJP LR di Kepri masih didominasi oleh jenis transaksi ke luar wilayah Indonesia dengan pangsa sebesar 85,18%, diikuti transaksi antar wilayah di Republik Indonesia sebesar 8,83% dan transaksi masuk dari luar wilayah Indonesia sebesar 5,99%. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa PJP LR di Provinsi Kepri lebih banyak digunakan untuk memfasilitasi pengiriman dana keluar wilayah Indonesia antara lain untuk keperluan pembayaran transaksi pembelian barang impor maupun transaksi lainnya. Sejalan dengan transaksi pada PJP LR yang meningkat, jumlah PJP LR di Kepri mengalami peningkatan pada triwulan II 2023 menjadi berjumlah 59 dengan sebaran 44 PJP LR di Kota Batam, 6 di Kota Tanjungpinang serta 9 di Kabupaten Karimun, dibandingkan dengan triwulan I 2023 yang berjumlah 58 PJP LR.



Grafik 5.16 Perkembangan Transaksi Pada PJP LR



BOKS 3

Festival Ekonomi Dan Keuangan Digital Sebagai Bentuk Sinergi Dalam Rangka Akselerasi Ekosistem Ekonomi Dan Keuangan Digital Di Provinsi Kepulauan Riau

Akselerasi inovasi teknologi dan transformasi digital menjadi salah satu upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai upaya meningkatkan *awareness* terhadap urgensi digitalisasi ekonomi dan keuangan inklusif serta untuk meningkatkan kolaborasi Otoritas di Pusat dan Daerah, kolaborasi industri dan masyarakat dalam mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan Indonesia, serta mendorong optimalisasi inovasi dan stabilitas di bidang Ekonomi dan Keuangan Digital (EKD), Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023 di Kepulauan Riau (Kepri) dengan mengangkat tema besar *"Synergy and Innovation of Digital Economy: Fostering Growth"*. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri turut mendukung momentum tersebut melalui kolaborasi antara Pemda, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), akademisi, media, dan komunitas masyarakat.

Sebagai upaya mendukung FEKDI, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri melakukan serangkaian kegiatan seperti Rapat Koordinasi (*High Level Meeting*, *Focus Group Discussion*, dan Rapat Koordinasi Lainnya), Sosialisasi, *Showcasing* QRIS, dan *On Boarding* QRIS. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi dilakukan sebagai upaya memperkuat sinergi dan komitmen bersama. Rapat koordinasi tersebut telah dilakukan dengan PJP untuk mendorong implementasi program akselerasi akseptasi digital. Selain dengan PJP, koordinasi juga dilakukan dengan Pemda khususnya pada sektor transportasi untuk mengimplementasikan pembayaran nontunai pada pelabuhan dan bandara yang menjadi titik keluar masuk Provinsi Kepri yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Selanjutnya telah dilaksanakan *High Level Meeting* sebagai upaya mendorong akselerasi implementasi kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) secara *top down*.



Gambar B3.1 Kegiatan Rapat Koordinasi, *Focus Group Discussion*, dan *High Level Meeting*



Gambar B3.2 Sosialisasi, Experience, On Boarding, dan Showcasing QRIS

2. Kegiatan Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat melalui sinergi *event* strategis di wilayah Kepri. Disamping itu, fokus sasaran peserta kegiatan adalah siswa dan mahasiswa selaku *agent of change*, penduduk dengan kategori literasi digital cukup tinggi, serta pengguna aktif media sosial sehingga dapat membantu penyebaran informasi dan edukasi terkait QRIS. Lebih lanjut, juga dilakukan komunikasi kepada pemuka agama terkait transaksi aman menggunakan QRIS sebagai mitigasi risiko penyalahgunaan QRIS.

Pada kegiatan sosialisasi disertai dengan *post-test*, *experience* QRIS Rp1, *on boarding* dan *showcasing* QRIS. Post Test terkait materi sosialisasi dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menilai pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. *Experience* QRIS Rp1 dimaksudkan agar peserta dapat langsung mencoba kemudahan dalam bertransaksi QRIS yang dilakukan baik melalui QRIS rumah ibadah, lembaga sosial, dan/atau UMKM.

3. Nonton Bersama Live Streaming Pembukaan FEKDI

Sebagai acara puncak FEKDI 2023, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri bersama dengan Pemda, PJP dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk turut serta dalam menyaksikan *opening ceremony* FEKDI. Nonton bersama ini dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui dan memahami informasi terkini mengenai sinergi dan inovasi dalam mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional, salah satunya terkait implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dan Kartu Kredit Indonesia (KKI). Kegiatan nonton bareng kemudian dilanjutkan dengan *Capacity Building* dan Pendampingan Pengisian *Championship* Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) bagi Tim Teknis TP2DD se-Kepri sebagai bentuk konkrit akselerasi ETPD di Kepri.

Pada Semester I 2023, jumlah user QRIS telah mencapai 218.850 user dan jumlah merchant QRIS tercatat sebesar 456.605 atau tumbuh 17,73% (yoy). Mayoritas merchant berlokasi di Kota Batam dengan porsi mencapai 85,37%. Secara kategori usaha, merchant QRIS didominasi oleh kategori Usaha Mikro dengan pangsa sebesar 55,1%, diikuti kategori Usaha Kecil (29,5%), dan Usaha Menengah (12,4%). Dari segi transaksi, hingga Semester I 2023 telah terdapat 7.370.705 volume transaksi atau 2 kali lipat dibanding volume transaksi sepanjang tahun 2022. Sementara itu untuk nilai transaksi tercatat sebesar Rp1.086 Triliun, jumlah tersebut 4,8 kali lipat lebih banyak dari nominal transaksi selama semester I 2022.

Melalui serangkaian kegiatan tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Kepri akan terus mendukung dan berupaya dalam pembentukan ekosistem dan sistem pembayaran non tunai yang lancar, khususnya terkait ETPD di Kepri, agar masyarakat luas juga dapat merasakan manfaat dari program tersebut.



Gambar B3.3 Nonton Bersama Live Streaming Pembukaan FEKDI 2023

BAB VI

Kesejahteraan Masyarakat dan Ketenagakerjaan

Jumlah Angkatan Kerja



Februari
2023

1.107.353
 Jiwa

Februari
2022

1.057.918
 Jiwa

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja



Februari
2023

67,29%

Februari
2022

68,48%

Tingkat Pengangguran Terbuka



Februari
2023

7,61%

Februari
2022

8,02%

Nilai Tukar Petani



Tw II
2023

105,06

Tw I
2023

104,75

Tingkat Kemiskinan



Maret
2023

5,69%

September
2022

6,03%

Indeks Pembangunan Manusia



Tahun
2022

76,46

Tahun
2021

75,79

Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan perbaikan tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Nilai Tukar Petani (NTP) serta penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) seiring dengan tren pemulihan ekonomi yang terus berlanjut.



Tabel 6.1 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kepri

Indikator	Periode				Perubahan 1 Tahun	
	Feb'20	Feb'21	Feb'22	Feb'23	Orang	% Perubahan
Angkatan Kerja	1.129.501	1.153.878	1.057.918	1.107.353	49.435	4,67%
Bekerja	1.062.004	1.037.133	973.125	1.023.125	50.000	5,14%
Pengangguran	67.497	116.745	84.793	84.228	(565)	-0,67%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,98%	10,12%	8,02%	7,61%		-0,41%
- Perdesaan	2,33%	3,78%	5,69%	4,71%		-0,98%
- Perkotaan	6,30%	10,64%	8,25%	7,90%		-0,35%
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,23%	66,39%	66,48%	67,29%		

Sumber: BPS (data diolah)

6.1 KETENAGAKERJAAN

6.1.1 Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Kepri terus melanjutkan perbaikan tercermin dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)¹ pada Februari 2023 yang menurun. Perbaikan tersebut terjadi baik di perdesaan dan perkotaan yang mengalami penurunan TPT masing-masing dari 5,69% dan 8,25% pada Februari 2022 menjadi 4,71% dan 7,90% pada Februari 2023. Hal tersebut sejalan dengan mobilitas masyarakat yang meningkat dan normalisasi aktivitas usaha seiring pandemi Covid-19 yang telah berakhir.

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, hampir seluruh level pendidikan mengalami perbaikan TPT yaitu kelompok pendidikan universitas, diploma, SMA, dan SMP. Sementara kelompok pendidikan SMK dan ≤SD mengalami peningkatan 1,17 dan 0,73 persen poin pada Februari 2023. TPT tertinggi terjadi pada kelompok lulusan SMA sebesar 10,33%, diikuti SMK sebesar 9,41% dan diploma sebesar 8,16%. Sementara TPT terendah terjadi pada kelompok lulusan SD ke bawah (4,78%) serta kelompok berpendidikan universitas (5,12%). TPT yang cukup rendah dan menurun pada universitas dipengaruhi oleh kebutuhan dunia kerja yang tinggi untuk level pendidikan/keahlian yang lebih tinggi.

Penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kepri didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan dengan pangsa sebanyak 27,42% dari jumlah

Tabel 6.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Persentase Pengangguran					
		Feb'18	Feb'19	Feb'20	Feb'21	Feb'22	Feb'23
1	≤SD	3,83%	6,06%	3,47%	5,37%	4,05%	4,78%
2	SMP	6,52%	3,30%	4,59%	8,61%	8,69%	6,45%
3	SMA	11,98%	6,87%	6,38%	11,18%	10,83%	10,33%
4	SMK	5,21%	11,20%	10,37%	13,39%	8,24%	9,41%
5	Diploma I/II/III	3,15%	4,30%	9,29%	15,23%	10,00%	8,16%
6	Universitas	3,60%	4,37%	2,24%	9,59%	5,30%	5,12%

Sumber: BPS (diolah)

tenaga kerja pada Februari 2023. Hal ini mencerminkan bahwa LU Industri Pengolahan memiliki peran yang strategis sebagai penyumbang PDRB terbesar dan menyediakan lapangan kerja formal terbanyak di Provinsi Kepri. LU berikutnya yang banyak menyerap tenaga kerja secara berurutan yakni sektor Perdagangan Besar dan Eceran (17,24%), LU Administrasi Pemerintahan, Jasa Pendidikan dan Jasa Kesehatan (13,92%), LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (9,63%), dan Konstruksi (8,02%).

Buruh/karyawan merupakan status pekerjaan yang paling dominan di Provinsi Kepri dengan porsi sebesar 67,78%, diikuti kelompok berusaha sendiri (wiraswasta mandiri) sebesar 15,75%. Pangsa kelompok buruh/karyawan mengalami peningkatan sebesar 5,21 persen poin pada bulan Februari 2023 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan pangsa jumlah pekerja juga terjadi pada

Tabel 6.3 Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Feb-18	Feb'19	Feb'20	Feb'21	Feb'22	Feb'23
1	Industri Pengolahan	15,33%	18,82%	17,18%	26,14%	24,54%	27,42%
2	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Spd Motor	18,15%	17,64%	17,79%	20,16%	20,09%	17,24%
3	Administrasi Pemerintahan, jasa pendidikan dan jasa kesehatan	14,36%	10,30%	19,91%	13,94%	12,95%	13,92%
4	Konstruksi	6,70%	7,79%	7,56%	8,49%	9,46%	8,02%
5	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11,37%	13,00%	12,13%	7,98%	7,17%	5,59%
6	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,27%	7,80%	6,38%	6,82%	6,16%	9,63%
7	Transportasi dan Pergudangan	5,85%	4,56%	5,14%	5,79%	6,15%	5,39%
8	Informasi, Komunikasi, jasa keuangan, asuransi, real estat dan perusahaan	2,09%	1,73%	4,17%	4,78%	6,06%	5,87%
9	Jasa Lainnya	7,11%	5,89%	6,72%	4,63%	5,80%	5,62%
10	Tambang, Listrik, Air, dan Gas	1,19%	2,68%	3,01%	1,27%	1,62%	1,30%

Sumber: BPS (data diolah)

¹ Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) adalah rasio jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja

Tabel 6.4 Tenaga Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri (%)

No	Status Pekerjaan Utama	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Perubahan 1 tahun (Poin Persen)
		Februari	Februari	Februari	Februari	Februari	Februari	
1	Berusaha Sendiri	22,25	20,41	19,22	19,06	15,46	15,75	0,29
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	6,64	6,41	5,11	6,34	7,55	6,59	-0,96
3	Berusaha dibantu buruh tetap	4,17	4,50	4,25	3,60	3,93	3,86	-0,07
4	Buruh/karyawan	58,64	59,49	63,48	61,04	62,57	67,78	5,21
5	Pekerja Bebas	3,04	4,18	3,12	4,22	3,41	1,06	-2,35
6	Pekerja keluarga/tak dibayar	5,27	5,00	4,82	5,74	7,08	4,96	-2,12
TOTAL		100	100	100	100	100	100	

Sumber: BPS (diolah)

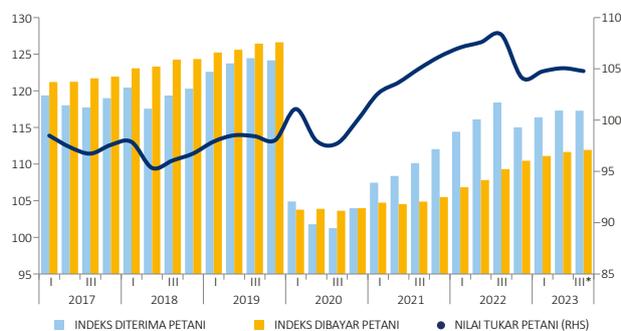
kelompok pekerja yang berusaha sendiri. Sementara itu, penurunan pangsa jumlah tenaga kerja terjadi pada kelompok berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, pekerja bebas, dan keluarga/tak dibayar. Kondisi ini terindikasi disebabkan oleh adanya peralihan dari pekerja pada sektor informal ke formal.

6.2 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

6.2.1 Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP adalah salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Nilai NTP yang semakin tinggi menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan petani. Berdasarkan analisis triwulanan, tingkat kesejahteraan petani pada triwulan II 2023 yang merupakan rata-rata bulan April-Juni 2023 mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya (Januari-Maret 2023). Rata-rata NTP pada triwulan II 2023 tercatat sebesar 105,06, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 104,75. Perbaikan tersebut terjadi seiring peningkatan Indeks yang Diterima (It) petani yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan Indeks yang Dibayar (Ib) petani. Kenaikan It terutama disebabkan oleh kenaikan harga jual komoditas sejalan dengan kenaikan harga komoditas di tingkat global.

Berdasarkan subsektor, NTP tertinggi tercatat pada sub kelompok Perikanan sebesar 109,35 dan NTP terendah tercatat pada sub kelompok Tanaman Pangan sebesar 98,71. Peningkatan NTP secara



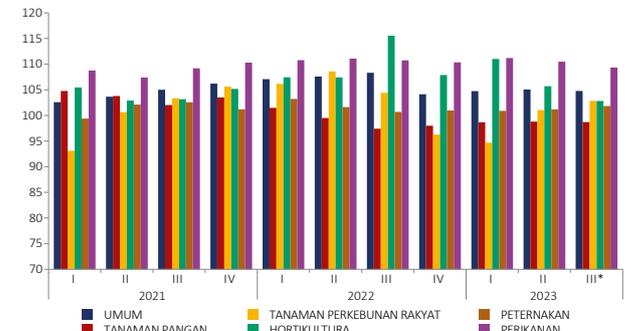
Sumber: BPS (data diolah)
*Juli 2023 (TW III)

Grafik 6.1 Perkembangan NTP

keseluruhan didorong oleh peningkatan NTP pada hampir seluruh sub kelompok petani kecuali sub kelompok Tanaman Perkebunan Rakyat dan Peternakan yang mengalami penurunan. Kenaikan NTP pada sub kelompok Perikanan didorong oleh meningkatnya harga komoditas ikan tongkol, kuwe, rajungan, cumi-cumi, kerapu, kakap, manyung, teri dan pari. Peningkatan NTP sub kelompok Holtikultura turut didorong oleh meningkatnya harga komoditas cabai hijau, sawi hijau, ketimun, kunyit, jengkol, bayam, kacang panjang, dan kangkung.

6.2.2 Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepri pada Maret 2023 tercatat sebanyak 142.500 orang, menurun dibandingkan periode Maret 2022 yang tercatat sebesar 151.680 orang. Pada periode Maret 2023, garis kemiskinan mengalami peningkatan dari Rp730.462/bulan/kapita pada September 2022 menjadi Rp742.526/bulan/kapita pada Maret 2023. Di sisi lain, Indeks Kedalaman Kemiskinan pada periode Maret 2023 tercatat sebesar 0,823%, lebih rendah dibandingkan dengan periode Maret 2022 sebesar 1,047%. Penurunan indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan pada Maret 2023 juga mengalami penurunan dari periode 0,252% pada Maret 2022 menjadi sebesar 0,181% pada Maret 2023.



Sumber: BPS (data diolah)
TW III data s.d. Juli 2023

Grafik 6.2 NTP Berdasarkan Subsektor

Tabel 6.5 Nilai Tukar Petani Provinsi Kepri

Sub Kelompok / Kelompok	2018 = 100										
	2021				2022				2023		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III*
1. Tanaman Pangan											
a. Indeks yang Diterima (It)	110,13	108,80	107,29	109,68	109,13	108,23	107,59	109,04	110,36	110,94	111,14
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	105,11	104,82	105,15	105,62	107,53	108,77	110,46	111,28	111,84	112,29	112,60
c. Nilai Tukar Petani (NTP-P)	104,78	103,79	102,03	103,53	101,49	99,50	97,41	97,99	98,67	98,80	98,71
2. Hortikultura											
a. Indeks yang Diterima (It)	111,43	107,61	108,20	111,07	115,06	116,38	127,04	119,47	123,41	117,88	114,96
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	105,01	104,58	104,88	105,60	107,09	108,34	109,95	110,74	111,16	111,52	111,80
c. Nilai Tukar Petani (NTP-H)	105,45	102,90	103,17	105,17	107,44	107,42	115,55	107,89	111,02	105,70	102,83
3. Tanaman Perkebunan Rakyat											
a. Indeks yang Diterima (It)	97,93	105,50	108,70	110,97	114,13	117,98	115,11	107,04	105,85	113,62	116,68
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	105,20	104,84	105,17	105,90	107,49	108,64	110,27	111,19	111,78	112,43	112,63
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pr)	93,11	100,64	103,36	105,63	106,17	108,59	104,41	96,27	94,69	101,06	102,84
4. Peternakan											
a. Indeks yang Diterima (It)	103,67	106,51	107,27	106,35	106,85	108,89	109,45	110,35	111,02	112,16	113,11
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	104,30	104,31	104,57	105,10	106,53	107,40	108,70	109,28	110,04	110,85	111,07
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pt)	99,39	102,11	102,58	101,18	103,22	101,64	100,69	100,98	100,89	101,19	101,83
5. Perikanan											
a. Indeks yang Diterima (It)	113,43	112,00	114,30	115,97	117,51	117,96	119,58	121,19	123,07	122,87	121,99
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	104,29	104,28	104,67	105,12	106,06	106,66	107,98	109,81	110,68	111,21	111,56
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pi)	108,77	107,40	109,20	110,31	110,79	111,08	110,75	110,36	111,20	110,49	109,35
Umum											
a. Indeks yang Diterima (It)	107,45	108,38	110,14	112,05	114,41	116,10	118,41	115,02	116,38	117,30	117,28
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	104,73	104,54	104,87	105,50	106,84	107,82	109,31	110,45	111,11	111,65	111,93
c. Nilai Tukar Petani (NTP)	102,60	103,66	105,02	106,20	107,08	107,59	108,33	104,14	104,75	105,06	104,78

Sumber: BPS (data diolah)
*Data s.d. Juli 2023

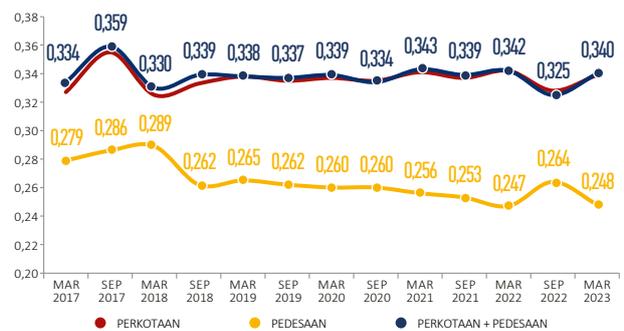
Tabel 6.6 Profil Kemiskinan di Provinsi Kepri

	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023
	Mar	Sept	Mar										
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	125.370	128.462	131.676	125.362	128.462	127.758	131.966	142.611	144.462	137.750	151.680	148.890	142.500
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,06	6,13	6,20	5,83	5,90	5,80	5,92	6,13	6,12	5,75	6,24	6,03	5,69
Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita)	513.237	536.027	559.291	567.972	594.059	602.038	614.727	617.532	642.425	653.853	684.070	730.462	742.526
Indeks Kedalaman Kemiskinan/P1 (%)	0,971	1,183	0,995	0,591	0,690	0,900	1,110	1,213	1,070	0,953	1,047	0,886	0,823
Indeks Keparahan Kemiskinan/ P2 (%)	0,228	0,313	0,243	0,107	0,130	0,18	0,290	0,423	0,280	0,218	0,252	0,186	0,181
Pertumbuhan Penduduk Miskin (yoy)	4,12%	7,82%	5,03%	-2,41%	-2,44%	1,91%	2,73%	11,63%	9,47%	-3,41%	5,00%	8,09%	-6,05%
Pertumbuhan Garis Kemiskinan (yoy)	4,71%	6,64%	8,97%	5,96%	6,22%	6,00%	3,48%	2,57%	4,51%	5,88%	6,48%	11,72%	8,55%

Sumber: BPS (data diolah)

6.2.3 Gini Ratio (GR)

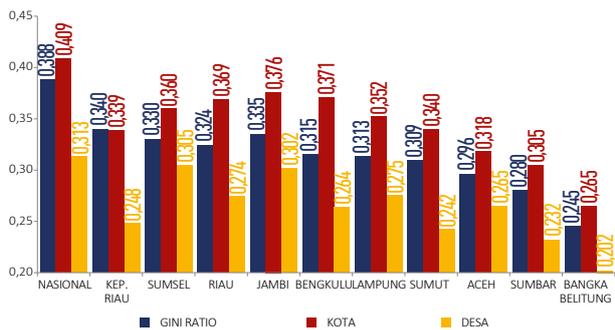
Gini Ratio² Provinsi Kepri pada Maret 2023 tercatat sebesar **0,340**, menurun dibandingkan Maret 2022 sebesar **0,342**. Penurunan Gini Ratio mengindikasikan bahwa tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk di Provinsi Kepri menunjukkan perbaikan ditandai dengan kesenjangan yang menyempit pada periode Maret 2022 - Maret 2023. Berdasarkan lokasi, tingkat ketimpangan pendapatan di wilayah perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan masyarakat di wilayah perdesaan. Gini Ratio di perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,339, menurun dari Maret 2022 tercatat sebesar 0,342, sementara Gini Ratio di perdesaan tercatat sebesar 0,248, sedikit meningkat



Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 6.3 Perkembangan Gini Ratio Provinsi Kepri

2 Gini Ratio merupakan rasio ketimpangan pengeluaran penduduk yang nilainya antara 0 sampai 1. Gini Ratio yang semakin tinggi mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

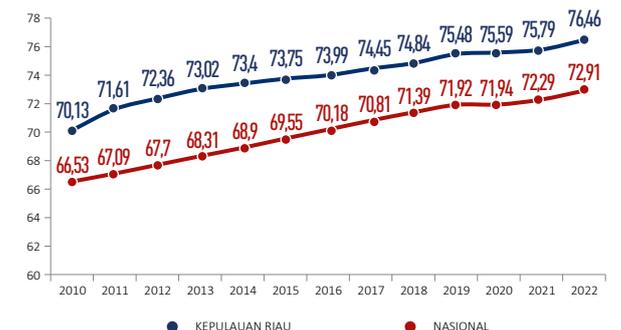


Grafik 6.4 Gini Ratio Provinsi di Wilayah Sumatera

dari Maret 2022 yang tercatat sebesar 0,247. Hal ini menunjukkan secara umum tingkat ketimpangan yang lebih rendah pada Maret 2023 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Sumatera, Indeks Gini Ratio di Provinsi Kepri berada di urutan pertama atau paling tinggi se-Sumatera, meskipun masih lebih rendah dibandingkan Gini Ratio secara nasional (0,388). Namun demikian, Gini Ratio Provinsi Kepri di wilayah perdesaan relatif cukup rendah (terendah ke-7) dibandingkan provinsi lain di Sumatera dan lebih rendah dari nasional (0,409).

6.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Provinsi Kepri pada tahun 2022 tercatat sebesar 76,46, meningkat 0,67 poin dibandingkan tahun sebelumnya 75,79. Peningkatan IPM Provinsi Kepri menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan yang tercermin dari Umur Harapan Hidup (UHH), rata-rata lama sekolah (RLS), dan standar hidup layak yang diukur dari nilai pengeluaran per kapita. Secara nasional, IPM Provinsi Kepri menduduki urutan ke-4 tertinggi setelah provinsi DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Kalimantan Timur. Sementara itu di kawasan Sumatera, IPM Provinsi Kepri menempati posisi teratas (tertinggi) dibandingkan provinsi lain. IPM Provinsi Kepri termasuk dalam kategori tinggi (nilai IPM 70 < IPM < 80).



Grafik 6.5 Perkembangan IPM Provinsi Kepri

Umur Harapan Hidup penduduk di Provinsi Kepri pada tahun 2022 tercatat 70,50 tahun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 70,12 tahun yang menunjukkan kualitas hidup masyarakat yang semakin baik. Tingkat Harapan Lama Sekolah (HLS) juga mengalami peningkatan menjadi 12,99 tahun yang diikuti peningkatan rata-rata lama sekolah menjadi 10,37 tahun. Peningkatan angka harapan sekolah maupun rata-rata lama sekolah memberikan sinyal positif bahwa kualitas SDM di Provinsi Kepri akan semakin baik. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat pengeluaran per kapita juga mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp14.469.000,-, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp14.122.000,-.

Secara kewilayahan, seluruh daerah di Provinsi Kepri mengalami peningkatan IPM, dimana IPM Kota Batam termasuk dalam kelompok IPM sangat tinggi dengan skor 81,67. Sementara itu 4 (empat) kota/kabupaten lainnya termasuk dalam kelompok IPM tinggi yang meliputi Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Karimun. Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga masuk dalam kategori IPM sedang (nilai IPM 60<IPM<70). Seluruh daerah mencatatkan peningkatan IPM dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 6.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri Menurut Komponen

Komponen	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	68,42	68,63	68,85	69,05	69,15	69,41	69,45	69,48	69,64	69,80	69,96	70,12	70,50
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,51	11,61	11,90	12,26	12,51	12,60	12,66	12,81	12,82	12,83	12,87	12,98	12,99
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,38	9,46	9,58	9,63	9,64	9,65	9,67	9,79	9,81	9,99	10,12	10,18	10,37
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Rp 0000	12.267	12.513	12.740	12.942	13.019	13.177	13.359	13.566	13.976	14.466	14.209	14.122	14.469
IPM		71,13	71,61	72,36	73,02	73,40	73,75	73,99	74,45	74,84	75,48	75,59	75,79	76,46

Sumber: BPS (data diolah)

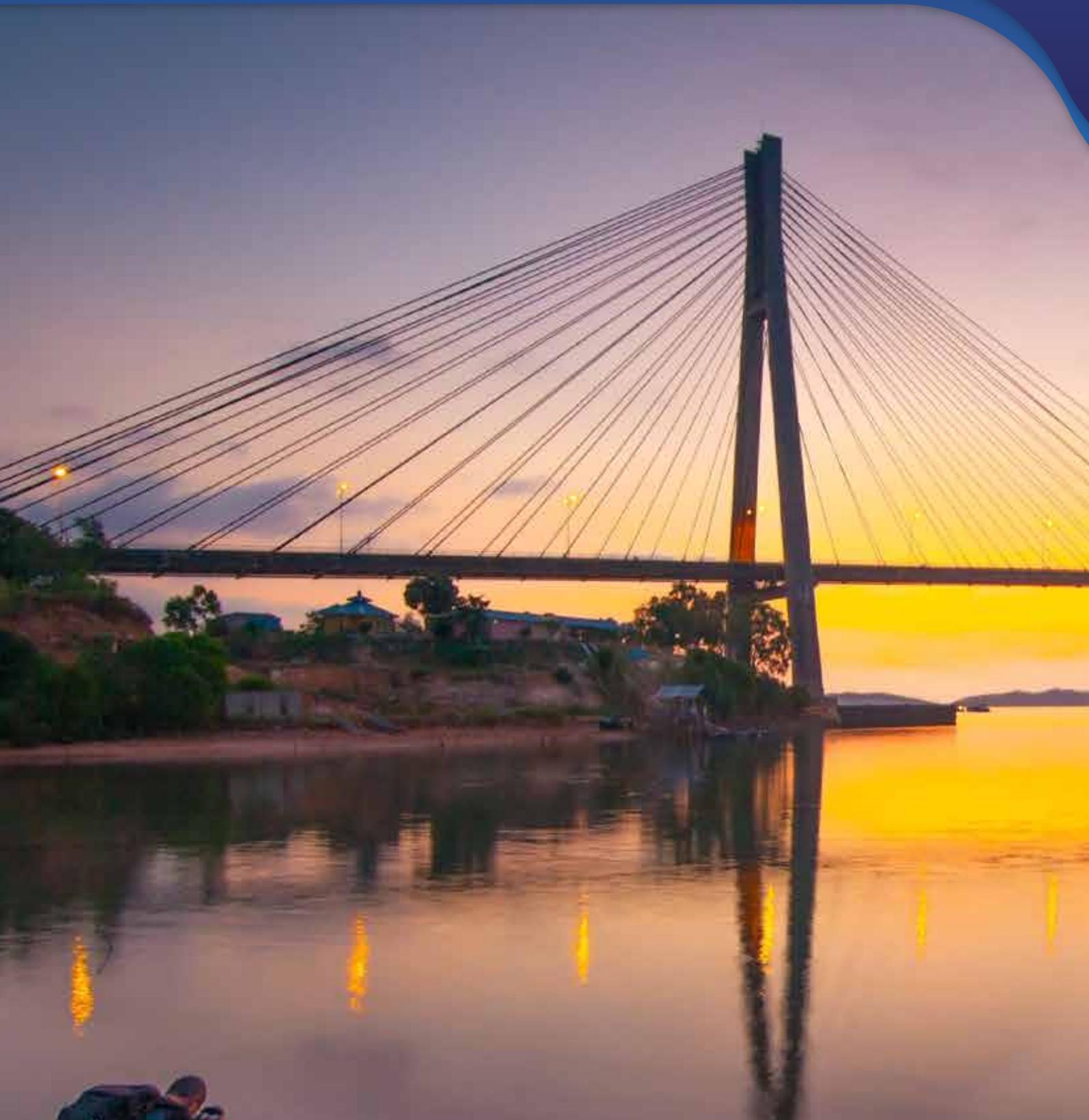
Tabel 6.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota

Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Karimun	66,40	66,82	67,67	68,52	68,72	69,21	69,84	70,26	70,56	71,10	71,44	71,70	72,65
Bintan	69,87	70,47	71,01	71,31	71,65	71,92	72,38	72,91	73,41	73,98	74,13	74,57	74,99
Natuna	66,29	67,76	68,80	69,39	70,06	70,87	71,23	71,52	72,10	72,63	72,72	73,09	73,47
Lingga	57,36	58,51	59,32	60,13	60,75	61,28	62,44	63,45	64,06	64,98	65,29	65,83	66,57
Kepulauan Anambas	63,03	63,71	64,32	64,86	65,12	65,86	66,30	67,06	67,53	68,48	68,80	69,23	69,61
Batam	76,98	77,82	78,39	78,65	79,13	79,34	79,79	80,26	80,54	81,09	81,11	81,12	81,67
Tanjungpinang	73,76	74,86	75,91	76,70	77,29	77,57	77,77	78,00	78,33	78,73	78,91	78,93	79,64
Kepulauan Riau	71,13	71,61	72,36	73,02	73,40	73,75	73,99	74,45	74,84	75,48	75,59	75,79	76,46

Sumber: BPS (data diolah)

BAB VII

Prospek Perekonomian Daerah



Perekonomian global diperkirakan tumbuh melambat namun lebih baik dari estimasi sebelumnya sejalan dengan penghapusan kebijakan Zero Covid di Tiongkok, penghapusan status darurat Covid-19, perbaikan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan beberapa negara maju di Eropa seiring dengan perbaikan upah dan keyakinan konsumen, perbaikan rantai pasokan global, serta pertumbuhan negara berkembang yang masih kuat. Kondisi tersebut turut mempengaruhi penurunan inflasi terutama di negara berkembang. Sejalan dengan prakiraan ekonomi global yang lebih optimis, perekonomian domestik tetap kuat dan berpotensi lebih tinggi. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) secara keseluruhan tahun 2023 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya didukung oleh perbaikan pertumbuhan di beberapa sektor dan perkembangan inflasi di daerah yang relatif terkendali.

Tekanan inflasi domestik termasuk Provinsi Kepri diperkirakan dapat dijaga di rentang sasaran inflasi nasional $3,0 \pm 1\%$ (yoy). Hal tersebut didukung oleh perbaikan rantai pasokan, normalisasi harga pangan dan energi global, serta upaya pengendalian inflasi di daerah yang terus diperkuat melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) khususnya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).



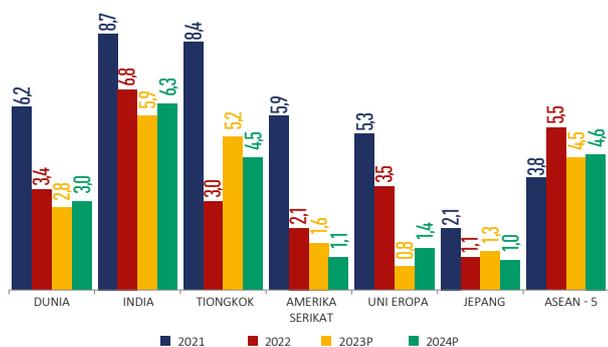
7.1 PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI

Ekonomi global diprakirakan tumbuh melambat di tengah ketidakpastian yang masih tinggi terutama di negara maju, namun tertopang oleh ekonomi negara berkembang yang masih kuat.

Pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 diprakirakan melambat dibandingkan tahun 2022 terutama dipengaruhi oleh ekonomi negara maju seperti Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara maju di Eropa yang menerapkan kebijakan moneter ketat dan adanya peningkatan risiko Stabilitas Sistem Keuangan (SSK). Fragmentasi ekonomi, perdagangan dan investasi yang masih berlangsung akibat ketegangan geopolitik juga menjadi faktor penahan perekonomian global.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi global berpotensi membaik sejalan dengan penghapusan kebijakan *Zero Covid Policy* di Tiongkok dan penghapusan status darurat Covid-19 oleh *World Health Organization* (WHO). *Outlook* terbaru dari *International Monetary Fund* (IMF) pada bulan Juli 2023 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 akan tumbuh sebesar 3,0% (yoy), melambat dari pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang diestimasikan sebesar 3,5% (yoy). Prakiraan pertumbuhan tahun 2023 tersebut lebih optimis dibandingkan prakiraan pada April 2023 yaitu sebesar 2,6% (yoy).

Tekanan inflasi global relatif tinggi meskipun mulai berkurang. Hal tersebut disebabkan oleh tekanan inflasi negara maju yang masih tinggi dipengaruhi oleh perekonomian yang lebih kuat dan pasar tenaga kerja yang ketat. Dengan berlanjutnya gangguan rantai pasokan dan ketatnya pasar tenaga kerja terutama di AS dan Eropa, diprakirakan akan mendorong kenaikan lebih lanjut suku bunga kebijakan moneter di negara maju, termasuk *Federal Funds Rate* (FFR). Inflasi yang masih tinggi mendorong kebijakan moneter ketat berlanjut lebih lama di berbagai negara khususnya negara maju. Kebijakan moneter tersebut selanjutnya berpengaruh pada mata uang dolar AS yang tetap kuat dan meningkatkan risiko tekanan inflasi dari komoditas impor bagi perekonomian domestik. Berdasarkan rilis IMF, inflasi global tahun 2023 diproyeksikan sebesar 7,0% (yoy), sementara inflasi negara ASEAN-5 (Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia) diprakirakan sebesar 4,3% (yoy).



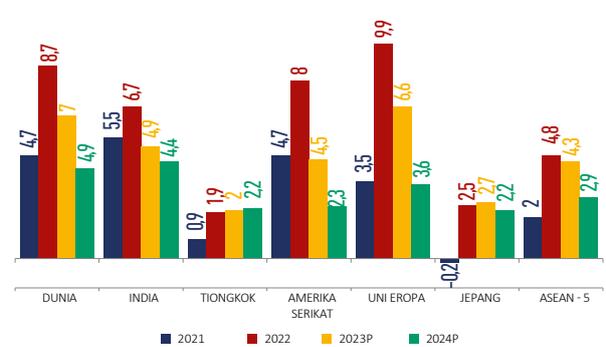
Grafik 7.1 Pertumbuhan Ekonomi Negara Mitra Dagang (% ,yoy)

Tren perbaikan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap terus berlanjut sejalan dengan tekanan inflasi yang diperkirakan menurun lebih cepat meski ketidakpastian ekonomi dunia yang masih tinggi. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 berada pada kisaran 4,5% s/d 5,3%. Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Informasi dan Komunikasi. Konsumsi rumah tangga diprakirakan tumbuh tinggi dipengaruhi keyakinan pelaku ekonomi yang meningkat dan perbaikan mobilitas masyarakat pasca pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Selain itu, investasi membaik didorong perbaikan prospek bisnis, peningkatan aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA), serta penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berlanjut.

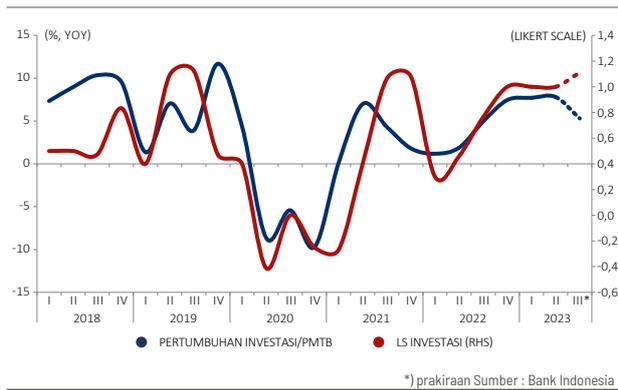
Sejalan dengan perbaikan perekonomian domestik, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri tahun 2023 diperkirakan menguat.

Pertumbuhan tersebut diperkirakan sebagai dampak dari pembangunan infrastruktur yang berjalan secara masif serta iklim investasi yang tetap kondusif. Kondisi ini berpotensi menjadikan Indonesia sebagai pilihan bagi investor di tengah tingginya ketidakpastian di negara maju. Selain itu, posisi geografis Provinsi Kepri yang strategis berada di selat Malaka di antara negara Singapura dan Malaysia juga menjadi nilai tambah. Inflasi Provinsi Kepri yang sudah kembali ke dalam sasaran 3,0±1% lebih cepat dari perkiraan juga menjadi faktor pendukung percepatan ekonomi Provinsi Kepri. **Dengan pertimbangan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Provinsi Kepri pada tahun 2023 di prakirakan tumbuh pada kisaran 4,93% - 5,73% (yoy).**

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh menguat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari sisi eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, penghapusan kebijakan *zero COVID-19* di Tiongkok yang merupakan salah satu mitra dagang utama Provinsi Kepri berdampak pada iklim politik dan ekonomi di Tiongkok sehingga turut berdampak pada perkembangan industri di Provinsi Kepri. Selain itu, pencabutan aturan PPKM oleh pemerintah pada akhir tahun 2022 dan pencabutan status darurat COVID-19 oleh WHO pada Mei 2023, serta posisi geografis Provinsi Kepri yang strategis turut



Grafik 7.2 Perkembangan Inflasi Negara Mitra Dagang (% ,yoy)



Grafik 7.3 Likert Scale Perkiraan Investasi

mendukung peningkatan mobilisasi masyarakat sehingga diperkirakan akan mendorong akselerasi perekonomian Provinsi Kepri. Di sisi lain, ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, masih ketatnya pasar tenaga kerja di negara maju yang mendorong kebijakan moneter ketat, risiko perubahan iklim global, serta risiko resesi di negara mitra dagang, menjadi faktor yang berisiko menahan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri.

Selanjutnya di sisi internal/domestik, ketidakpastian global berpotensi berdampak pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri sisi permintaan yakni kinerja konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor. Meskipun demikian, di sisi domestik, tahun politik menjelang pemilu 2024 berpotensi mendorong konsumsi pemerintah. Konsumsi rumah tangga berisiko tertahan akibat peningkatan inflasi yang bersumber dari impor. Selain itu, permintaan ekspor dari Provinsi Kepri berisiko tertahan dipengaruhi ekspor nonmigas yang menurun sejalan dengan penurunan harga komoditas dan perlambatan ekonomi global, sedangkan impor menurun terbatas di tengah kondisi membaiknya aktivitas ekonomi domestik serta ancaman resesi di negara mitra dagang. Sementara, konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat menjelang pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.

Dari sisi lapangan usaha, kinerja perekonomian pada tahun ini diperkirakan bersumber dari lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi serta perdagangan besar dan eceran. Pertumbuhan

pada lapangan usaha industri pengolahan didorong membaiknya sistem logistik dan iklim investasi pasca pandemi. Sementara itu, pertumbuhan pada lapangan usaha konstruksi sejalan dengan masifnya pembangunan di Provinsi Kepri, terutama pembangunan jalan di Kota Batam. Selain itu, pembukaan sektor *Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE)*, pelaksanaan *sport events* dan atraksi pariwisata yang kembali normal di wilayah Kepri akan mendorong sektor pariwisata untuk tumbuh lebih tinggi serta menghasilkan *multiplier effect* pada sektor lainnya.

7.2 PROSPEK INFLASI

Mencermati perkembangan realisasi inflasi dan perkembangan terkini baik di global maupun nasional, inflasi Provinsi Kepri tahun 2023 diperkirakan menurun atau lebih rendah dari inflasi tahun 2022 dan berada di dalam sasaran inflasi $3,0 \pm 1\%$ (yoy). Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas secara global yang turut berdampak pada penurunan harga komoditas pangan. Terkendalnya inflasi juga didukung oleh langkah antisipatif melalui GNPIP dalam menjaga harga komoditas pangan yang rentan terhadap tekanan inflasi. Sementara itu, peningkatan inflasi pada tahun ini dipengaruhi oleh fenomena *El Nino* yang mengganggu produksi komoditas pertanian, gangguan rantai pasok yang mempengaruhi harga bahan baku, penurunan *credit rating* AS yang mendorong kenaikan harga emas dunia, dan peningkatan mobilitas masyarakat. Selain itu, perusahaan *Fast Moving Consumer Goods* melakukan penyesuaian harga produk dengan mempertimbangkan inflasi pada tahun sebelumnya turut menjadi faktor pendorong tekanan inflasi.

Namun demikian, kebijakan pengetatan moneter yang terukur dan sinergi TPID melalui GNPIP diperkirakan dapat meredam tekanan inflasi sehingga dapat mencapai target sasaran inflasi. Di samping itu, moderasi tarif angkutan sejalan dengan penambahan jumlah armada/ rute penerbangan menahan tekanan inflasi menjadi lebih tinggi. Terjaganya inflasi di dalam kisaran sasaran tersebut tidak terlepas dari konsistensi kebijakan moneter yang didukung dengan eratnya sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah dalam koordinasi TPID. Ke depan Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran $3,0 \pm 1\%$ (yoy) pada tahun 2023 dan $2,5 \pm 1\%$ pada tahun 2024.

Tabel 7.1 Risiko Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2023

Komponen	Faktor Pendorong / Penahan	Arah
Investasi	Iklim investasi yang semakin baik sejalan dengan pembangunan infrastruktur jalan yang masif.	▲
Proyeksi Perekonomian Global	IMF melakukan revisi pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 sebesar 3,0% pada Juli 2023, meningkat dari periode April 2023 yang tumbuh 2,9%.	▲
Pariwisata	Pariwisata yang diperkirakan akan jauh lebih baik sejalan dengan pencabutan aturan PPKM pada akhir Desember 2022 dan pencabutan status darurat COVID-19 oleh WHO pada Mei 2023.	▲
Kebijakan moneter ketat dalam negeri dan di negara maju	Risiko perlambatan investasi akibat suku bunga yang tinggi. Peningkatan inflasi yang bersumber dari impor dan risiko resesi di negara mitra dagang dapat mengurangi permintaan ekspor	▲
Risiko Geopolitik	Risiko geopolitik seperti konflik Rusia-Ukraina, ketegangan di semenanjung Taiwan dapat berdampak terhadap harga pangan, energi, dan rantai pasok dunia	▼
Risiko Perubahan Iklim Global	Risiko perubahan iklim global dapat berdampak produktivitas pertanian yang mulai menurun akibat dampak dari pemanasan global. Pada kondisi domestik, penurunan produktivitas pertanian mulai terjadi di beberapa wilayah produsen dan pemasok terutama pada saat memasuki musim kemarau.	▼

Tabel 7.2 Risiko Inflasi Kepulauan Riau Tahun 2023

Komponen	Faktor Pendorong / Penahan
Upside Risk	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya anomali cuaca El Nino menyebabkan kekeringan mengurangi produksi pertanian • Peningkatan mobilitas masyarakat dengan akselerasi vaksinasi dan terkendalinya kasus penyebaran COVID-19. • Kenaikan harga pupuk dan pestisida yang menyebabkan kenaikan biaya produksi. • Isu penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak yang masih berlanjut • Kenaikan cukai rokok yang berlaku mulai 1 Januari 2023. • Risiko geopolitik yang dapat mendorong kenaikan harga minyak dunia yang berdampak pada kenaikan harga BBM, avtur, dan bahan bakar RT. • Kenaikan tarif listrik non subsidi mulai bulan April 2023. • Pulihnya aktivitas dunia usaha yang meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat sehingga mendorong permintaan/daya beli. • Peningkatan ketidakpastian global mendorong kenaikan harga emas perhiasan.
Downside Risk	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan infrastruktur yang memperlancar logistik bahan pangan. • Pelaksanaan implementasi program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang lebih masif mendorong ketersediaan bahan pangan dan normalisasi harga pangan. • Penambahan jumlah armada, rute, dan frekuensi dari maskapai angkutan udara • Berdasarkan hasil <i>Liaison</i>, rata-rata produsen sudah melakukan price in kenaikan harga pada awal tahun dan tidak akan menaikkan harga jual sampai akhir tahun.

Tekanan inflasi gabungan 2 Kota IHK di Provinsi Kepri pada tahun 2023 diprakirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2022 dan berada dalam sasaran inflasi nasional 3,0±1% (yoy). Inflasi pada tahun 2023 diprakirakan bersumber dari kenaikan harga (1) kelompok makanan, minuman dan tembakau; (2) transportasi, dan (3) penyediaan makanan dan minuman. Tekanan inflasi diperkirakan akan menurun sejalan dengan pasokan bahan pangan yang semakin terjaga, penurunan harga komoditas global, dan didukung oleh berbagai upaya pengendalian inflasi melalui GNPIP. Risiko inflasi yang perlu diperhatikan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Potensi kenaikan harga energi dan bahan pangan global sebagai dampak ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang masih berlangsung, seperti kenaikan harga komoditas global seperti gandum dan pupuk serta proteksionisme pangan oleh negara-negara di dunia.
2. Potensi risiko terjadinya *El Nino* yang berdampak di wilayah utara ekuator termasuk Provinsi Kepri sehingga menyebabkan gangguan cuaca pada kegiatan melaut akibat gelombang tinggi dan penurunan hasil perikanan akibat memanasnya suhu di beberapa titik perairan. Selain itu, terdapat potensi kekeringan ringan yang dapat menekan produktivitas pertanian di beberapa sentra produsen dan pemasok. *El Nino* yang diperkirakan berdampak kuat di wilayah selatan ekuator termasuk sebagian Sumatera dan seluruh Jawa akan berpotensi mengurangi pasokan bahan pangan ke Provinsi Kepri.
3. Potensi peningkatan mobilitas masyarakat didorong relaksasi aturan kunjungan untuk wisatawan yang mendorong kenaikan tarif angkutan udara dan harga di sektor jasa seperti penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman.
4. Peningkatan upah minimum provinsi dan pemberian insentif seperti tunjangan hari raya, tunjangan gaji pegawai, dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) berpotensi mendorong daya beli masyarakat secara keseluruhan dan peningkatan permintaan di berbagai produk konsumsi.

5. Peningkatan cukai rokok pada tahun 2023 sebesar 10%.
6. Meningkatnya harga emas perhiasan sejalan dengan peningkatan harga emas global karena penurunan *credit rating* Amerika Serikat.

Upaya pengendalian inflasi selama tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif).

Memasuki triwulan II 2023, tekanan inflasi diperkirakan masih tinggi terutama memasuki periode Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri sehingga diperlukan beberapa upaya pengendalian inflasi antara lain sebagai berikut:

- a. Melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan GNPIP untuk mengendalikan inflasi pangan melalui 7 program unggulan GNPIP yakni: (1) Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah, (2) Perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD), (3) Pemberian Subsidi Ongkos Angkut, (4) Gerakan Tanam dan Replikasi Model Bisnis, (5) Dukungan Pengadaan/Pemanfaatan Alsintan dan Saprotan, (6) Penguatan Infrastruktur TIK, Digitalisasi Data dan Informasi Pangan, (7) Koordinasi dan Komunikasi Melalui HLM TPID.
- b. Meningkatkan produksi pangan di Provinsi Kepri dengan mengoptimalkan *urban farming*, penggunaan teknik budidaya yang lebih baik seperti Program lipatan ganda (*Proliga*), *digital farming* maupun *integrated farming* untuk mencapai hasil produksi yang optimal dengan biaya yang lebih efisien. Upaya peningkatan produksi pangan juga dapat dilakukan dengan mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui penggunaan Dana Desa untuk pengembangan budidaya komoditas pangan strategis.
- c. Pelaksanaan KAD yang didukung dengan ketersediaan data neraca pangan yang akurat, logistik yang efisien, gudang penyimpanan yang memadai, dan pusat distribusi berupa pasar sentral/pasar induk untuk memudahkan pengawasan stok dan lalu lintas barang.
- d. Memperkuat sinergi antar instansi dalam TPID melalui penyalarsan program yang dapat mendukung GNPIP dan kebijakan pengendalian inflasi daerah.

- e. Terus melanjutkan pengawasan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari pengalihan subsidi BBM secara tepat waktu dan sasaran sehingga dapat menjaga daya beli masyarakat khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang rentan terhadap inflasi.
- f. Mendorong penggunaan *Smart Green House* untuk mengatasi masalah siklus tanam agar memperoleh produktivitas tanaman yang berkesinambungan sepanjang tahun sehingga jumlah pasokan tetap stabil.

7.3 REKOMENDASI

Dalam rangka mendorong momentum pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri, sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah dan *stakeholders* lainnya akan terus diperkuat. Sehubungan hal tersebut, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengendalikan laju inflasi, antara lain:

1. Menjaga konsumsi rumah tangga sebagai mesin pertumbuhan dengan mengendalikan tingkat inflasi tetap rendah dan stabil.
2. Mengoptimalkan dampak belanja APBN maupun APBD dengan mempercepat penggunaan anggaran yang efisien serta tepat sasaran.
3. Meningkatkan daya saing investasi dengan pemberian insentif yang menarik, kemudahan perizinan, dan konsistensi aturan bagi investor.
4. Mendorong hilirisasi komoditas Sumber Daya Alam (SDA) terutama di bidang maritim.
5. Meningkatkan sinergi antar lembaga untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan pangan, bahan baku pertanian untuk menghadapi risiko potensi kenaikan harga pangan global.
6. Menjaga kestabilan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau terutama untuk beberapa komoditas yang rentan terhadap perubahan harga sehingga tingkat inflasi tetap terkendali dan stabil, tidak mengalami inflasi maupun deflasi secara ekstrim.
7. Mendorong implementasi program GNPIP yang dirumuskan oleh TPID dalam rangka pengendalian inflasi terutama komoditas pangan.
8. Memperkuat *linking and matching* kebutuhan pekerja di dunia usaha dengan lulusan perguruan tinggi, sekolah vokasi, serta Balai Pelatihan dan Sertifikasi Profesi.
9. Meningkatkan efisiensi biaya logistik dengan memperkuat interkoneksi antar daerah baik melalui jalur darat maupun jalur laut sehingga dapat mendorong kelancaran arus barang.
10. Mendorong pertumbuhan yang inklusif melalui penguatan kapasitas, akses pasar dan kemudahan pembiayaan bagi UMKM.
11. Mengoptimalkan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan keunggulan *Free Trade Zone* (FTZ) melalui sejumlah paket insentif investasi sebagai daya tarik investasi.
12. Memperkuat pemulihan pariwisata melalui penguatan aspek 3A (Akses, Amenitas, Atraksi) dan 2P (Pelaku dan Promosi).
13. Mengoptimalkan digitalisasi pembayaran terutama dalam implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dalam rangka peningkatan dan perbaikan secara berkesinambungan untuk dapat meningkatkan akseptansi di daerah.
14. Meningkatkan upaya sosialisasi penggunaan QRIS untuk meningkatkan jumlah pengguna dan transaksi QRIS.

Lampiran

**Tabel 1 Ringkasan Eksekutif
Indikator Ekonomi Dan Moneter Triwulanan
Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau**

INDIKATOR	2021				2022				2023	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
MAKRO										
Laju Inflasi (yoy)*	1,56	1,52	2,07	2,26	3,24	5,89	6,79	5,83	4,77	2,64
IHK MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	109,67	109,15	110,11	113,91	115,17	122,6	121,07	122,34	122,64	124,07
IHK PAKAIAN DAN ALAS KAKI	103,73	104,49	105,07	105,59	106,72	107,0	106,50	107,10	109,05	109,92
IHK PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	100,55	100,69	100,86	100,98	101,49	101,8	102,39	103,04	103,89	104,11
IHK PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	103,19	104,04	104,19	104,77	108,04	109,3	109,77	109,94	110,89	111,22
IHK KESEHATAN	102,22	102,32	102,66	103,09	103,27	103,1	103,23	103,41	103,52	103,66
IHK TRANSPORTASI	98,42	98,88	97,82	101,81	101,79	106,0	117,08	119,05	114,25	116,10
IHK INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	99,38	99,39	99,42	99,33	99,05	99,1	99,03	99,03	99,18	99,17
IHK REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	104,26	105,17	105,20	105,19	105,33	107,2	107,46	107,52	107,73	107,82
IHK PENDIDIKAN	112,16	112,16	114,18	114,18	114,18	114,2	117,34	117,34	117,40	117,40
IHK PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	104,11	104,34	104,43	106,14	108,03	109,8	110,07	110,18	110,22	110,25
IHK PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	110,10	112,19	112,37	113,13	116,65	117,7	117,85	120,28	122,36	122,72
Pertumbuhan PDRB (yoy)**	-1,19	6,90	2,97	5,27	2,83	5,01	6,03	6,40	6,51	5,04
Ekspor Non Migas (Juta USD**)	0,67	12,85	10,19	10,94	9,900	12,88	13,34	3,45	3,15	-6,14
Impor Non Migas (Juta USD**)	1,73	12,52	9,36	9,09	9,610	12,47	14,33	4,41	3,17	-7,57
PERBANKAN										
Giro (Rp miliar)	19.688	19.526	20.291	20.462	20.975	22.098	23.498	25.467	25.220	24.908
Tabungan (Rp miliar)	26.346	27.823	28.294	29.429	29.538	30.479	30.451	31.850	32.820	32.626
Deposito (Rp miliar)	15.849	15.817	15.444	16.324	14.022	15.037	12.097	15.554	13.803	14.571
Total DPK (Rp miliar)	61.883	63.166	64.029	66.214	64.535	67.613	66.046	72.871	71.843	72.106
Total Asset (Rp miliar)	70.281	72.473	73.816	75.306	77.159	77.367	78.314	83.142	83,29	85,97
Total Kredit (Rp miliar)	53.331	58.013	56.444	59.691	63.402	61,9	63.127	64.861	65.810	65,81
Suku Bunga Kredit tertimbang kredit	8,97%	8,85%	10,29%	8,49%	8,48%	8,50%	8,62	8,82	8,92	8,90%
Suku Bunga Dep 3 bln tertimbang kredit	3,41%	3,18%	3,02%	2,71%	2,76%	2,43%	2,62%	3,22%	3,55%	3,67%
LDR (%)	86,18%	91,84%	88,15%	90,15%	98,24%	94,22%	95,58%	88,73%	93,50%	93%
NPL (%)	4,16%	3,71%	3,63%	3,26%	3,27%	2,87%	3,08%	2,18%	2,18%	2,42%
SISTEM PEMBAYARAN										
Inflow (miliar Rp)	2.114	2.086	1.084	760	1.540	1.297	1.088	680	1.686	1.561
Outflow (miliar Rp)	1.267	2.823	1.512	2.658	1.114	2.401	1.668	3.133	1.671	3.117
Volume Kliring (lembar)	66.718	77.113	68.023	71.673	69.279	70.929	68.779,0	48.087,0	50.215	66.535
Nominal Kliring (miliar Rp)	3.390.038	3.489.100	2.406.142	2.602.398	3.540.018	3.547.218	3.600.741	2.410.536	3.278.058	3.225.906

Sumber: Bank Indonesia

Ket: *) Mulai Januari 2020 menggunakan tahun dasar 2018 = 100

***) Data Sangat Sementara

***) Data Perbankan dari Bank Umum

Tabel 2 Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK)
Gabungan 2 Kota (Kota Batam Dan Kota Tanjungpinang)
Mulai Januari 2020, menggunakan Tahun Dasar 2018

No	KELOMPOK	Mar 2022		Juni 2022		Sep 2022		Des 2022		Mar 2023		Jun 2023	
		Indeks	%mtm										
UMUM		108,07	0,68	111,1	0,84	112,36	1,06	113,29	1,11	113,22	(0,29)	113,99	0,49
I.	MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	115,17	1,12	122,59	2,18	121,07	0,29	122,34	2,95	122,64	(1,28)	124,07	1,25
a.	MAKANAN	113,88	1,18	122,14	2,59	119,17	0,08	119,71	3,40	119,16	(1,78)	120,22	1,35
b.	MINUMAN YANG TIDAK BERALKOHOL	103,81	0,05	107,45	0,83	108,64	0,08	110,72	0,29	111,14	(0,10)	111,73	0,33
c.	MINUMAN BERALKOHOL	99,31	0,54	99,64	0,16	99,75	0,21	100,23	0,07	101,41	0,53	100,93	(0,59)
d.	ROKOK DAN TEMBAKAU	132,89	1,43	137,32	0,44	144,14	1,63	149,95	1,96	156,18	0,89	160,84	1,22
II.	PAKAIAN DAN ALAS KAKI	106,72	0,42	107,03	(0,00)	106,50	(0,26)	107,10	(0,11)	109,05	(0,02)	109,92	0,13
a.	PAKAIAN	106,77	0,33	107,58	0,14	106,83	(0,32)	107,35	(0,13)	109,92	0,21	110,77	0,23
B.	ALAS KAKI	106,53	0,76	104,92	(0,56)	105,24	0,00	106,13	0,00	105,85	(0,91)	106,63	(0,24)
III.	PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	101,49	0,21	101,81	0,04	102,39	0,10	103,04	0,02	103,89	0,04	104,11	0,03
a.	SEWA RUMAH	101,19	0,00	101,51	(0,00)	102,07	0,00	103,64	0,00	105,50	0,00	105,58	0,00
b.	PEMELIHARAAN, PERBAIKAN, DAN KEAMANAN TEMPAT TINGGAL/PERUMAHAN	102,95	0,20	103,53	0,27	104,31	0,64	104,33	0,03	104,99	0,26	105,48	0,21
C.	PENYEDIAAN AIR DAN LAYANAN PERUMAHAN LAINNYA	100,06	0,00	100,06	0,00	100,06	0,00	100,06	0,00	100,06	0,00	100,06	0,00
d.	LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	101,73	0,58	102,06	0,00	102,83	0,00	102,89	0,06	102,90	0,00	103,22	0,00
IV.	PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	108,04	0,84	109,30	0,48	109,77	0,31	109,94	0,00	110,89	0,07	111,22	0,06
a.	FURNITUR, PERLENGKAPAN DAN KARPET	102,15	0,09	103,28	0,29	103,64	(0,12)	103,69	0,05	103,96	0,00	103,96	0,00
b.	TEKSTIL RUMAH TANGGA	100,87	0,91	102,10	(0,00)	103,50	(0,75)	103,30	0,18	103,31	0,00	103,31	0,00
c.	PERALATAN RUMAH TANGGA	106,72	0,04	107,10	(0,00)	107,18	0,00	106,99	(0,19)	107,00	0,00	106,95	0,05
d.	BARANG PECAH BELAH DAN PERALATAN MAKAN MINUM	101,88	0,35	103,02	(0,00)	97,22	0,00	97,22	0,00	97,32	0,00	97,32	0,00
e.	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERUMAHAN DAN KEBUN	101,94	0,08	106,57	(0,00)	105,93	(0,25)	105,60	(0,31)	105,74	0,02	105,93	0,25
f.	BARANG DAN LAYANAN UNTUK PEMELIHARAAN RUMAH TANGGA RUTIN	112,74	1,40	114,06	0,85	116,07	0,72	116,52	0,05	118,30	0,12	118,96	0,07
V.	KESEHATAN	103,27	0,10	103,10	0,00	103,23	0,02	103,41	0,03	103,52	0,00	103,66	0,10
a.	OBAT-OBATAN DAN PRODUK KESEHATAN	104,50	0,23	104,12	0,00	104,43	0,05	104,84	0,08	105,12	0,00	105,44	0,23
b.	JASA RAWAT JALAN	100,49	0,00	100,49	0,00	100,49	0,00	100,49	0,00	100,49	0,00	100,49	0,00
c.	JASA RAWAT INAP	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
d.	JASA KESEHATAN LAINNYA	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,01	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00
VI.	TRANSPORTASI	101,79	1,02	106,04	0,93	117,08	6,98	119,05	1,25	114,25	0,40	116,10	0,99
a.	PEMBELIAN KENDARAAN	105,93	0,00	106,91	0,00	107,39	0,14	107,88	(0,00)	108,54	0,16	108,79	(0,00)
b.	PENGOPERASIAN PERALATAN TRANSPORTASI PRIBADI	101,87	0,22	101,53	(0,00)	116,60	14,11	117,43	0,22	117,01	0,31	115,26	(1,06)
c.	JASA ANGKUTAN PENUMPANG	97,28	4,21	115,58	3,79	127,08	(1,08)	133,20	4,53	112,62	0,86	124,55	6,74
d.	JASA PENGIRIMAN BARANG	124,52	0,00	124,39	0,00	124,39	0,00	124,39	0,00	132,81	0,00	132,81	0,00
VII.	INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	99,05	(0,00)	99,15	0,09	99,03	0,14	99,03	(0,00)	99,18	0,00	99,17	0,00
a.	PERALATAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	96,80	(0,01)	97,23	0,43	96,73	0,63	96,72	(0,01)	97,37	0,00	97,36	0,00
b.	LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	100,08	0,00	100,08	0,00	100,08	0,00	100,08	0,00	100,08	0,00	100,08	0,00
c.	ASURANSI	100,00	(0,00)	100,00	(0,00)	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
d.	JASA KEUANGAN	95,75	(0,00)	95,75	(0,00)	95,75	0,00	95,75	0,00	95,75	0,00	95,75	0,00
VIII.	REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	105,33	(0,00)	107,2	0,09	107,46	0,00	107,52	0,02	107,73	0,08	107,82	0,21
a.	BARANG REKREASI LAINNYA DAN OLAHRAGA	102,72	(0,00)	102,7	(0,00)	102,72	0,00	102,72	0,00	102,72	0,00	102,72	0,00
b.	LAYANAN REKREASI DAN OLAHRAGA	100,17	0,00	100,2	0,00	100,17	0,00	100,17	0,00	100,17	0,00	100,19	0,00
c.	LAYANAN KEBUDAYAAN	105,45	(0,00)	116,2	0,00	111,83	0,00	111,83	0,00	111,83	0,00	116,23	3,93
d.	KORAN, BUKU, DAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	109,27	(0,01)	111,2	0,18	112,65	0,01	112,76	0,04	113,21	0,17	112,60	(0,28)
IX.	PENDIDIKAN	114,18	(0,00)	114,2	(0,00)	117,34	1,46	117,34	0,00	117,40	0,00	117,40	0,00
a.	PENDIDIKAN DASAR DAN ANAK USIA DINI	114,90	0,00	114,9	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
b.	PENDIDIKAN MENENGAH	112,28	0,00	112,3	0,00	113,45	0,00	113,45	0,00	113,45	0,00	113,45	0,00
c.	PENDIDIKAN TINGGI	117,10	(0,00)	117,1	(0,00)	123,33	5,32	123,33	0,00	123,33	0,00	123,33	0,00
d.	PENDIDIKAN LAINNYA	110,00	(0,00)	110,0	(0,00)	110,84	0,00	110,84	0,00	111,32	0,00	111,32	0,00
X.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	108,03	0,11	109,8	0,23	110,07	0,09	110,18	0,00	110,22	0,00	110,25	0,00
a.	JASA PELAYANAN MAKANAN DAN MINUMAN	108,03	0,11	109,8	0,23	110,07	0,09	110,18	0,00	110,22	0,00	110,25	0,00
XI.	PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	116,65	1,75	117,7	0,10	117,85	(0,34)	120,28	1,07	122,36	0,49	122,72	(0,43)
a.	PERAWATAN PRIBADI	111,11	1,12	113,0	0,66	114,98	0,23	116,29	0,41	117,62	0,14	117,64	0,14
b.	PERAWATAN PRIBADI LAINNYA	128,81	2,98	128,4	(0,82)	124,79	(1,38)	129,68	2,33	133,20	1,14	134,27	(1,40)
c.	PERLINDUNGAN SOSIAL	100,00	0,00	100,0	0,00	103,63	0,00	103,63	0,00	107,25	0,00	107,25	0,00
d.	JASA LAINNYA	108,19	(0,00)	108,2	(0,00)	108,19	0,00	108,19	0,00	108,19	0,00	108,19	0,00

Sumber: BPS (data diolah)

Lampiran

Tabel 3 Perkembangan Inflasi Kota Batam, Tanjungpinang dan Nasional (% , mtm)

KOTA	2020				2021				2022				2023	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
1. Batam	1,06%	0,06%	-0,12%	1,05%	0,15%	0,45%	0,19%	0,58%	0,73%	0,84%	1,08%	1,14%	-0,32%	0,51%
2. Tanjungpinang	1,40%	0,09%	-0,32%	0,98%	-0,36%	0,36%	0,33%	0,42%	0,36%	0,80%	0,92%	0,85%	-0,03%	0,28%
3. Kepulauan Riau	1,1%	2,4%	-0,15%	1,04%	0,09%	0,43%	0,31%	0,56%	0,68%	0,84%	1,06%	1,11%	0,44%	0,49%
4. Nasional	2,96%	0,18%	-0,05%	0,45%	0,13%	0,08%	-0,04%	0,57%	0,66%	0,49%	1,17%	0,66%	4,97%	0,14%

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 4 Data Perbankan (Bank Umum)
Provinsi Kepulauan Riau

KETERANGAN	2022										2023					
	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	
ASET	76.048,30	77.104,29	77.366,71	77.610,92	77.600,78	78.313,65	80.292,60	81.337,76	83.141,73	80.474,81	82.450,89	83.291,12	83.366,22	84.375,56	85.970,71	
DANA PIHAK KETIGA	64.594,32	65.717,27	67.613,00	67.947,63	67.948,82	66.046,02	70.288,44	69.136,93	72.871,01	72.871,01	70.022,69	70.384,18	71.370,03	73.134,69	72.105,79	
a. Giro	19.980,87	21.864,57	22.097,66	22.238,86	22.347,39	23.497,77	25.327,70	25.053,26	25.467,00	25.467,00	24.651,44	25.067,74	25.089,07	24.176,70	24.908,42	
b. Tabungan	30.554,22	30.119,00	30.478,64	30.468,63	30.368,61	30.450,83	30.693,82	31.109,90	31.849,85	31.849,85	31.811,57	31.901,37	32.450,02	32.660,65	32.626,11	
c. Deposito	14.059,24	13.733,71	15.036,70	15.240,14	15.232,83	12.097,42	14.266,92	12.973,77	15.554,16	15.554,16	13.559,69	13.415,07	13.830,94	16.297,33	14.571,27	
KREDIT																
a. Jenis Penggunaan	60.142,80	60.665,10	61.920,11	61.983,70	61.627,65	63.126,58	63.875,60	63.562,24	64.861,08	64.656,03	65.373,13	65.809,74	65.809,74	65.809,74	65.809,74	
Modal Kerja	20.486,66	21.102,89	22.230,32	22.592,67	22.272,97	22.877,87	22.201,61	22.028,46	24.094,36	22.130,11	22.552,34	22.760,58	22.740,5	22.955,2	23.404,9	
Investasi	20.087,05	20.019,41	19.815,14	19.264,19	19.100,09	19.775,60	21.035,12	20.702,06	19.773,73	21.427,32	21.624,24	21.609,74	21.593,1	21.882,5	22.124,0	
Konsumsi	19.569,10	19.542,80	19.874,65	20.126,84	20.254,59	20.473,10	20.638,87	20.831,72	20.992,98	21.098,60	21.196,55	21.439,41	21.525,2	21.643,0	21.798,1	
b. Jenis Kredit	60.142,80	60.665,10	61.920,11	61.983,70	61.627,65	63.126,58	63.875,60	63.562,24	64.861,08	64.656,03	65.373,13	65.809,74	65.858,79	66.480,74	67.326,90	
UMKM	10.877,37	10.901,17	11.067,21	11.067,79	11.088,69	11.222,37	11.250,91	11.293,59	11.596,14	11.424,21	11.472,22	11.539,52	11.434	11.702	12.031	
Non UMKM	49.265,44	49.763,93	50.852,90	50.915,90	50.538,96	51.904,21	52.624,69	52.268,65	53.264,93	53.231,82	53.900,92	54.270,22	54.425	54.779	55.296	
c. Kolektibilitas	60.142,80	60.665,10	61.920,11	61.983,70	61.627,65	63.126,58	63.562,24	64.861,08	64.656,03	64.656,03	65.373,13	65.809,74	65.858,79	66.480,74	67.326,90	
Lancar	53.642,45	54.889,91	56.697,05	56.604,40	56.462,54	57.733,30	58.669,54	60.275,27	59.636,94	59.636,94	59.988,96	60.810,13	60.638,26	61.335,26	61.376,08	
D.P.Khusus	4.545,01	3.933,33	3.447,04	3.449,97	3.347,96	3.450,16	3.525,41	3.238,37	3.612,49	3.612,49	3.947,44	3.567,24	3.777,11	3.639,99	4.324,22	
Kurang Lancar	125,78	150,49	119,52	263,43	216,04	382,10	187,27	216,85	255,81	255,81	232,55	238,59	280,82	325,79	357,33	
Diragukan	466,40	491,34	439,06	461,45	487,95	442,87	591,27	434,17	437,96	437,96	491,95	482,21	437,73	455,47	563,14	
Macet	1.363,16	1.200,03	1.217,43	1.204,45	1.113,16	1.118,15	588,74	696,40	712,83	712,83	712,24	711,57	724,86	724,23	706,14	
RATIO																
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	93,11%	92,31%	91,58%	91,22%	90,70%	95,58%	90,43%	93,82%	88,73%	88,73%	93,36%	93,50%	92,28%	90,90%	93,37%	
b. Non Performing Loans (NPL)	3,25%	3,04%	2,87%	3,11%	2,95%	3,08%	2,15%	2,08%	2,18%	2,18%	2,20%	2,18%	2,19%	2,26%	2,42%	

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 5 Data Perbankan (Bank Umum)
Wilayah Kepulauan Riau **)

KETERANGAN	2022						2023								
	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
ASET	18.177,73	18.610,94	18.749,80	18.827,19	18.617,59	18.489,44	19.317,96	19.196,48	19.125,82	18.328,34	18.699,89	18.421,29	17.925,68	18.192,57	18.727,78
DANA PIHAK KETIGA	14.784,02	15.214,03	16.483,20	16.716,18	16.564,98	14.753,33	16.980,78	14.947,33	16.589,18	17.882,80	14.961,78	13.865,61	13.664,48	15.728,93	14.145,02
a. Giro	4.913,17	5.585,88	5.590,55	5.304,06	5.092,15	5.556,84	6.586,00	6.453,30	6.072,65	6.648,31	5.801,20	5.599,69	6.102,04	4.762,74	5.112,66
b. Tabungan	7.206,03	6.957,28	7.063,35	7.218,28	7.085,91	7.070,94	7.052,95	7.177,73	7.389,74	7.208,97	6.955,54	6.601,12	6.936,95	7.144,64	6.945,09
c. Deposito	2.664,81	2.670,87	3.829,30	4.193,84	4.386,92	2.125,54	3.341,83	1.316,29	3.126,79	4.025,52	2.205,03	1.664,79	625,49	3.821,54	2.087,27
KREDIT															
a. Jenis Penggunaan	13.205,38	13.011,20	13.149,99	13.280,47	13.212,31	13.596,99	13.677,20	14.042,93	14.264,89	15.007,64	15.171,85	15.290,47	15.442,06	14.812,14	14.328,13
Modal Kerja	3.611,55	3.601,84	3.689,57	3.828,44	3.840,08	3.865,25	3.888,73	3.883,86	3.853,34	3.754,40	3.778,22	3.784,02	3.784,83	3.809,07	3.878,83
Investasi	2.661,16	2.479,42	2.436,57	2.317,87	2.204,34	2.469,20	2.471,85	2.783,15	2.963,37	3.758,50	3.873,33	3.885,78	4.084,44	4.213,42	4.323,58
Konsumsi	6.932,67	6.929,94	7.023,85	7.134,16	7.167,89	7.262,55	7.316,62	7.375,92	7.448,18	7.494,75	7.520,30	7.620,67	7.621,84	7.460,65	7.642,88
b. Jenis Kredit	13.205,38	13.011,20	13.149,99	13.280,47	13.212,31	13.596,99	13.677,20	14.042,93	14.264,89	15.007,64	15.171,85	15.290,47	15.491,11	15.483,13	15.845,29
UMKM	3.590	3.590	3.674	3.730	3.722	3.766	3.780	3.815	3.825	3.749	3.777	3.819	3.806	3.823	3.884
Non UMKM	9.615	9.421	9.476	9.550	9.490	9.831	9.897	10.228	10.440	11.258	11.395	11.472	11.685	11.660	11.962
c. Kolektibilitas	13.205,38	13.011,20	13.149,99	13.280,47	13.212,31	13.596,99	13.363,84	15.341,77	14.059,84	15.007,64	15.171,85	15.290,47	15.491,11	15.483,13	15.845,29
Lancar	11.420,02	11.490,89	11.695,02	11.716,71	11.777,31	12.125,58	12.459,34	14.207,94	12.386,13	13.596,36	13.594,00	13.835,43	13.965,78	13.928,88	14.354,21
D.P.Khusus	927,41	810,23	781,17	786,78	762,87	767,77	783,92	480,57	967,53	734,66	886,64	759,16	842,35	809,02	666,44
Kurang Lancar	29,38	32,74	26,56	108,96	107,55	133,68	82,63	132,17	131,79	115,47	110,76	137,35	146,27	205,06	193,94
Diragukan	381,04	421,53	383,37	403,86	380,90	383,73	399,72	226,73	386,17	375,76	386,88	371,22	362,23	361,73	456,85
Macet	447,54	255,82	263,88	264,16	183,68	186,23	(361,78)	294,37	188,22	185,39	193,57	187,31	174,48	178,45	173,86
RATIO															
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	89,32%	85,52%	79,78%	79,45%	79,76%	92,16%	80,55%	93,95%	85,99%	83,92%	101,40%	110,28%	113,01%	94,17%	101,29%
b. Non Performing Loans (NPL)	6,50%	5,46%	5,12%	5,85%	5,09%	5,17%	0,90%	4,26%	5,02%	4,51%	4,56%	4,55%	4,41%	4,81%	5,20%

Sumber: Bank Indonesia

Ket : Satuan Dalam Miliar Rupiah

**) Meliputi Tanjungpinang, Tanjung Balai Karimun, Natuna

Lampiran

Tabel 6 Data Perbankan (Bank Umum)
Kota Batam

KETERANGAN	2022										2023					
	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	
ASET	57.870,57	58.493,36	58.616,91	58.783,73	58.983,18	59.824,21	60.974,64	62.141,27	64.015,91	62.146,48	63.750,99	64.869,83	65.440,54	66.182,98	67.242,93	
DANA PIHAK KETIGA	49.810,31	50.503,25	51.129,81	51.231,46	51.383,84	51.292,69	53.307,65	54.189,61	56.281,84	54.988,21	55.060,91	56.518,57	57.705,55	57.405,76	57.960,77	
a. Giro	15.067,69	16.278,69	16.507,10	16.934,81	17.255,24	17.940,93	18.741,70	18.599,96	19.394,35	18.818,69	18.850,24	19.468,05	18.987,03	19.413,96	19.795,75	
b. Tabungan	23.348,19	23.161,72	23.415,29	23.250,35	23.282,69	23.379,89	23.640,87	23.932,17	24.460,11	24.640,88	24.856,02	25.300,25	25.513,07	25.516,01	25.681,02	
c. Deposito	11.394,43	11.062,84	11.207,41	11.046,30	10.845,91	9.971,88	10.925,09	11.657,47	12.427,37	11.528,64	11.354,65	11.750,27	13.205,45	12.475,79	12.484,00	
KREDIT																
a. Jenis Penggunaan	46.937,42	47.653,90	48.770,11	48.703,23	48.415,34	49.529,59	50.198,40	49.519,30	50.596,19	49.648,39	50.201,29	50.519,27	50.367,68	50.997,60	51.481,61	
Modal Kerja	16.875,11	17.501,05	18.540,75	18.764,22	18.432,89	19.012,63	18.312,88	18.144,60	20.241,02	18.375,71	18.774,12	18.976,57	18.955,71	19.146,17	19.526,06	
Investasi	17.425,89	17.539,99	17.378,57	16.946,32	16.895,75	17.306,40	18.563,27	17.918,91	16.810,36	17.668,82	17.750,92	17.723,96	17.508,62	17.669,10	17.800,38	
Konsumsi	12.636,42	12.612,86	12.850,80	12.992,68	13.086,70	13.210,56	13.322,25	13.455,79	13.544,80	13.603,85	13.676,25	13.818,74	13.903,35	14.182,33	14.155,18	
b. Jenis Kredit	46.937,42	47.653,90	48.770,11	48.703,23	48.415,34	49.529,59	50.198,40	49.519,30	50.596,19	49.648,39	50.201,29	50.519,27	50.367,68	50.997,60	51.481,61	
UMKM	7287036227	7310711039	7392981048	7.337,57	7.366,66	7.456,35	7.470,72	7.478,67	7.770,80	7.674,79	7.695,02	7.720,64	7.627,90	7.878,65	8.147,20	
Non UMKM	3965038449	4034318769	4137713368	41.365,66	41.048,68	42.073,24	42.727,68	42.040,63	42.825,38	41.973,60	42.506,27	42.798,63	42.739,77	43.118,96	43.334,41	
c. Kolektibilitas	46.937,42	47.653,90	48.770,11	48.703,23	48.415,34	49.529,59	50.198,40	49.519,30	50.596,19	49.648,39	50.201,29	50.519,27	50.367,68	50.997,60	51.481,61	
Lancar	42.222,43	43.399,02	45.002,03	44.887,69	44.685,23	45.607,72	46.210,20	46.067,34	47.250,81	46.040,58	46.394,96	46.974,70	46.672,48	47.406,37	47.021,87	
D.P.Khusus	3.617,60	3.123,10	2.665,87	2.663,19	2.585,09	2.682,40	2.741,49	2.757,81	2.644,96	2.877,83	3.060,80	2.808,08	2.934,76	2.830,98	3.657,79	
Kurang Lancar	96,41	117,75	92,97	154,46	108,49	248,42	104,64	84,68	124,02	140,34	121,79	101,24	134,55	120,72	163,39	
Diragukan	85,36	69,82	55,69	57,59	107,05	59,13	191,55	207,45	51,79	62,20	105,06	110,99	75,50	93,75	106,29	
Macet	915,62	944,21	953,56	940,29	929,48	931,92	950,52	402,03	524,61	527,44	518,67	524,26	550,38	545,78	532,28	
RATIO																
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	94,23%	94,36%	95,38%	95,07%	94,22%	96,56%	94,17%	91,38%	89,90%	90,29%	91,17%	89,39%	87,28%	88,84%	88,82%	
b. Non Performing Loans (NPL)	2,34%	2,37%	2,26%	2,37%	2,36%	2,50%	2,48%	1,40%	1,38%	1,47%	1,49%	1,46%	1,51%	1,49%	1,56%	

Sumber: Bank Indonesia

Ket : Satuan Dalam Miliar Rupiah

Tabel 7 Perputaran Kliring Batam, Tanjungpinang dan Tanjung Balai Karimun

JENIS	2021				2022								2023			
	III		IV		I		II		III		IV		I		II	
	Total	Rata-rata Perhari														
A. WARKAT KLIRING																
1. WARKAT (Lbr)	68.023	1.097	71.673	1.156	69.279	1.117	70.929	1.144	68.779	1.109	48.087	776	50.215	810	66.535	1.073
2. NOMINAL (Jt.Rp)	2.406.142	38.808.742	2.602.398	41.974.161	3.540.018	57.097.067	3.547.218	57.213.187	3.600.741	58.076.461	2.410.536	38.880	3.278.058	52.872	3.225.906	52.031

Sumber: Bank Indonesia

Daftar Istilah

Istilah	Arti
Akselerasi	Pertumbuhan yang lebih tinggi pada periode laporan dibandingkan dengan periode tertentu.
Andil Inflasi	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Bobot inflasi	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.
Capital Adequacy Ratio (CAR)	Rasio antara modal (modal inti dan modal pelengkap) terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana masyarakat (berupa tabungan, deposito, giro, dll) yang disimpan di suatu bank.
Derajat Desentralisasi Fiskal	Kemampuan daerah untuk memenuhi pendapatan daerah dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ekspor	Seluruh barang yang keluar dari suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersial maupun bukan komersial.
Faktor Fundamental	Faktor pendorong inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yakni interaksi pengeluaran lapangan usaha atau output gap, eksternal, serta ekspektasi inflasi masyarakat.
Faktor Non Fundamental	Faktor pendorong inflasi yang berada di luar kewenangan otoritas moneter, yakni produksi maupun distribusi bahan pangan (volatile food), serta harga barang/jasa yang ditentukan oleh pemerintah (<i>administered prices</i>).
Impor	Seluruh barang yang masuk suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersial maupun bukan komersial.
Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1-100
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.
Indeks Kondisi Ekonomi (IKE)	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1-100.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1-100.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Ukuran kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui pencapaian rata-rata 3 hal kualitas hidup yaitu pendidikan, kesehatan, daya beli.
Inflasi	Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (persistent).
Inflasi IHK	Kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu periode yang diukur dengan perubahan Indeks Harga Konsumen, yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.
Inflow	Jumlah aliran kas yang masuk ke kantor Bank Indonesia yang berasal dari perbankan dalam periode tertentu.
Investasi	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.
Kliring	Pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu
Kontraksi	Pertumbuhan yang negatif.
Kredit	Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur (bank) dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang atau pinjamannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Kualitas kredit	Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur (bank) dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang atau pinjamannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Istilah	Arti
Liaison	Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.
Loan to Deposit Ratio (LDR)	Rasio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pinjaman yang disalurkan dengan dana pihak ke tiga yang dihimpun pada suatu waktu tertentu.
Melambat	Pertumbuhan yang lebih rendah pada periode laporan dibandingkan dengan periode tertentu.
mtm (month to month)	Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya
Net-outflow	Selisih bersih antara jumlah <i>inflow</i> pada periode yang sama terdiri dari <i>net-outflow</i> bila terjadi <i>outflow</i> lebih besar dibandingkan <i>inflow</i> , dan <i>net-inflow</i> bila terjadi sebaliknya
Non Performing Loan (NPL)	Kredit atau pembiayaan yang termasuk dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
Omzet	Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.
Outflow	Jumlah aliran kas keluar dari Kantor Bank Indonesia kepada perbankan dalam periode tertentu.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Perusahaan	Suatu unit usaha yang diselenggarakan/dikelola secara komersial yang menghasilkan barang dan jasa sehomogen mungkin, umumnya terletak pada suatu lokasi dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi, bahan baku, pekerja, dan sebagainya yang digunakan dalam proses produksi.
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu. 1. PDRB atas dasar harga berlaku Penjumlahan nilai tambah bruto yang mencakup seluruh komponen faktor pendapatan yaitu gaji, bunga, sewa tanah, keuntungan, penyusutan dan pajak tak langsung dari seluruh sektor perekonomian 2. PDRB atas dasar harga konstan Perhitungan PDRB yang didasarkan atas produk yang dihasilkan menggunakan harga tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya.
qtq (quarter to quarter)	Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.
Real Time Gross Settlement (RTGS)	Proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan seketika (<i>real time</i>) dengan mendebet maupun mengkredit rekening peserta pada saat bersamaan sesuai perintah pembayaran dan penerima pembayaran.
Saldo Bersih	Selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "meningkat" dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "menurun" dan mengabaikan jawaban "sama".
Saldo Bersih Tertimbang (SBT)	Nilai yang diperoleh dari hasil perkalian saldo bersih sektor/subsektor yang bersangkutan dengan bobot sektor/subsektor yang bersangkutan sebagai penimbangannya.
Sektor ekonomi dominan	Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.
Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)	Survei triwulanan yang bertujuan untuk mendapatkan indikator pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha secara triwulanan.
Survei Konsumen (SK)	Survei bulanan yang bertujuan untuk mengetahui keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap kondisi perekonomian pada 6 bulan mendatang.
Uang Giral	Uang terdiri atas rekening giro, kiriman uang, simpanan berjangka dan tabungan yang sudah jatuh waktu, yang seluruhnya merupakan simpanan penduduk dalam Rupiah dan sistem moneter.
Uang Kartal	Uang yang terdiri atas uang kertas dan uang logam yang berlaku, tidak termasuk uang kas pada KPN dan bank umum.
yoY (year on year)	Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.



**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Tim Perumusan KEKDA Provinsi

Jl. Engku Putri No.1, Tlk. Kering Batam Kota,
Kota Batam, Kepulauan Riau

